



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016-2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepala Daerah terpilih harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) Tahun masa Jabatannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya Ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 -2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tatacara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2016-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Pasal 2

- (1) RPJMD memuat Visi, Misi dan Prioritas Program Pembangunan, berkedudukan dan sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rincian Visi, Misi dan Prioritas Program Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
SISTEMATIKA
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Pasal 3

Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
- 1.5 Sistematika Penulisan RPJMD

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- 3.2 Kerangka Pendanaan

BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

- 4.1 Permasalahan Pembangunan
- 4.2 Isu Strategis

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

- 5.1 Visi
- 5.2 Misi
- 5.3 Tujuan dan Sasaran

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

- 7.1 Kebijakan Umum Daerah
- 7.2 Kebijakan Kewilayahan
- 7.3 Kebijakan Pendanaan Pembangunan
- 7.4 Program Prioritas Bupati : TASIK SIAP
- 7.5 Program Pembangunan Daerah

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IX. INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

- 10.1 Pedoman Transisi dan Perubahan
- 10.2 Kaidah Pelaksanaan

BAB XI. PENUTUP

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 10 Oktober 2016
BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 10 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

H. ABDUL KODIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI
JAWA BARAT NOMOR 5/212/2016

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 5 TAHUN 2016
TENTANG : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2016-2021.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional yang merupakan upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan Negara yaitu untuk: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pelaksanaan pencapaian tujuan ini dilaksanakan melalui pembangunan daerah secara bertahap dan terencana melalui tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan.

Berdasarkan pertimbangan filosofis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditegaskan pula bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Daerah melaksanakan

pembangunan dengan tujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, menciptakan kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah dan sekaligus sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam kerangka pelaksanaan pembangunan daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan jangka panjang (dua puluh tahun), jangka menengah (lima tahunan) dan perencanaan pembangunan tahunan yang sinergis antar daerah serta antara pembangunan daerah dengan pembangunan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, program lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan. Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, masa jabatan kepala daerah adalah selama lima (5) tahun terhitung sejak pelantikan. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya dilantik berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.32-996 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat tanggal 15 Maret 2016 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 132.32-997 tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dan pada 23 Maret 2016 dilakukan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya bermaksud menyusun RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya

yang merupakan pelaksanaan pembangunan jangka panjang tahap ketiga. Pula, ini disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang RPJPD Kabupaten Tasikmalaya 2005-2025, RPJMD fase ke-3 diprioritaskan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas. Ditandai dengan tercapainya IPM sebesar 78,25 point; LPE (laju pertumbuhan ekonomi) 5-6 persen, proporsi penduduk miskin terhadap jumlah penduduk sebesar 11 persen, dan jumlah penduduk sebesar 1.828.970 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 0,88 %/tahun.

Guna pencapaian target yang ditetapkan RPJPD di atas, perlu dilakukan persiapan yang sungguh-sungguh dalam bentuk perencanaan yang lebih matang. Persiapan dalam bentuk analisa dan penghitungan ulang berdasarkan capaian historis dan proyeksi serta peramalan agar perencanaan yang ditetapkan akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pada Pasal 261 UU No. 23 Tahun 2014, perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

Secara teknokratis, RPJMD 2016-2021 disusun melalui tahapan proses evaluasi terhadap pelaksanaan dan pencapaian RPJMD 2011-2015, penelaahan terhadap RPJPD 2005-2025, maupun analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya lima tahun ke depan.

Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pelibatan ini adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta menciptakan konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang

dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Bahwa rencana pembangunan Daerah harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Semangat utama yang mendasari Penyusunan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 ini adalah pemenuhan kewajiban yang dilandasi nilai-nilai religius/Islami demi terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, efisien, dan memperhatikan keberlangsungan pemanfaatannya baik untuk generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.

Pembangunan berkelanjutan mengandung dua gagasan penting yaitu pertama kebutuhan; bahwa kebutuhan pokok manusia adalah untuk menopang hidup dan yang diprioritaskan adalah kaum miskin dan kedua keterbatasan yaitu kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan baik masa kini maupun masa yang akan datang. Oleh karena itu, pencapaiannya dapat dilakukan dengan pengelolaan yang baik terhadap kondisi dan modal ekonomi; kekuatan modal sosial; pengelolaan lingkungan hidup; terwujudnya *good and clean governance*; pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien dan kepemimpinan yang menggerakkan dan transformatif.

Semangat lain yang juga mendasari penyusunan RPJMD ini adalah semangat menciptakan kebahagiaan. *Spirit of Happiness*. RPJMD ini disusun tidak hanya untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran tetapi juga kebahagiaan. Kebahagiaan adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kesenangan, cinta, kepuasan atau kegembiraan, kesehatan, pendidikan, hubungan dan interaksisosial, kebebasan demokrasi, optimisme, keterlibatan religious dan penghasilan yang layak, bahagia menerima, bahagia memiliki dan bahagia menghasilkan sehingga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya menjadi manusia yang produktif dan dinamis.

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam

mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya adalah:

1. menetapkan visi, misi dan program pembangunan daerah jangka menengah
2. menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah dan perencanaan penganggaran.
3. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan Jawa Barat dan dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya.

1.3. Dasar Hukum

Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2016-2020, disusun berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor (SE Mendagri) No. 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Dearah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

1.4. Hubungan Antar Dokumen

Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 memiliki hubungan keterkaitan yang bermakna. Langkah perumusan dan penyusunan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diilustrasikan Gambar 1.

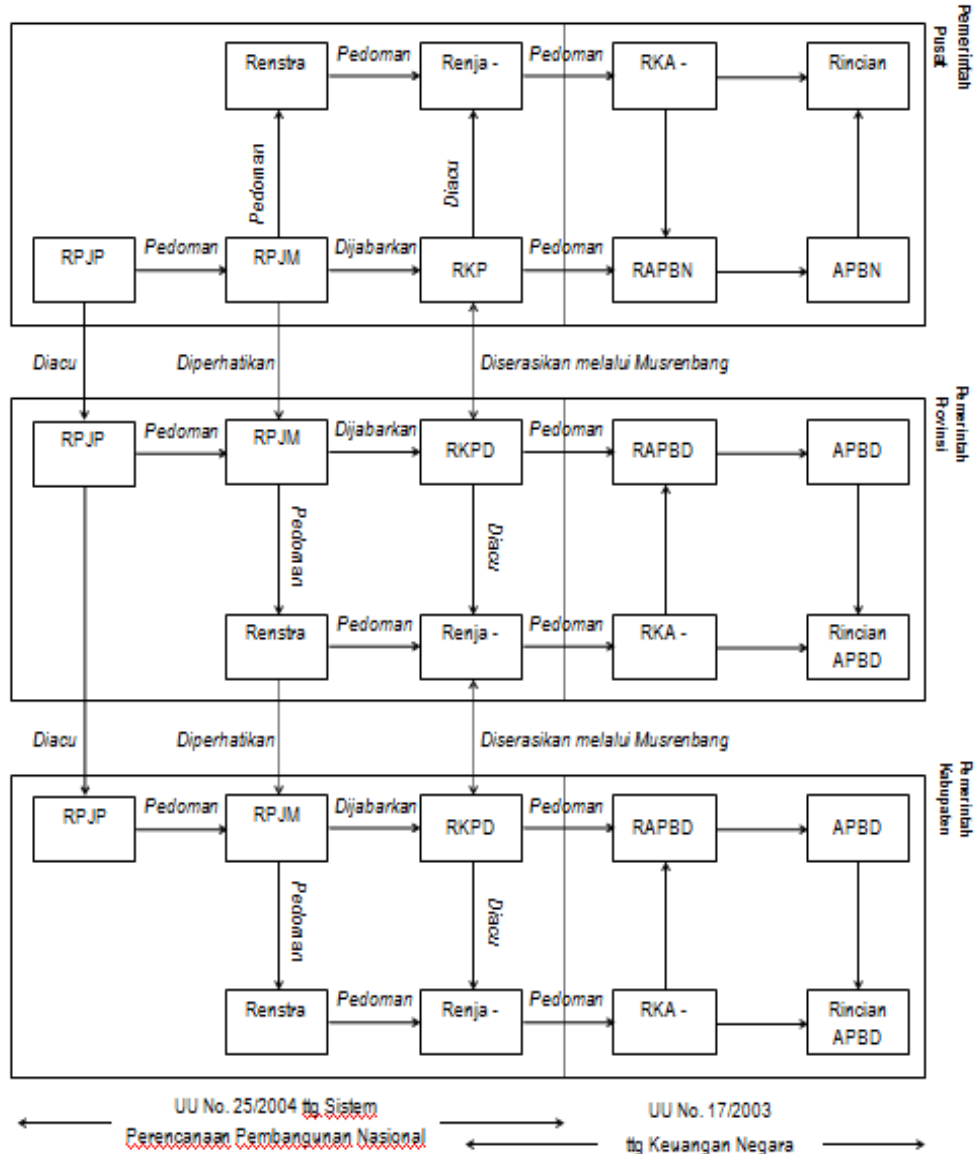
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan yang disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada pasal 54 ayat (2) menyebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota serta memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya.

Hubungan antar dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. RPJPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, sasaran, kebijakan umum sasaran pokok, dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD pada setiap 5 (lima) tahun sekali;
2. RPJMD memuat visi, misi, gambaran umum kondisi daerah, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten;
3. Renstra SKPD, merupakan penjabaran operasional bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif;
4. Renja SKPD, sebagai pedoman perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif; dan

- RKPD berfungsi sebagai pedoman perencanaan tahunan atas Renja SKPD yang merupakan bahan Musrenbang RKPD yang berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 selain berpedoman pada RPJPD, juga memperhatikan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten Tasikmalaya dimaksudkan untuk: (a) menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; dan (b) menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang kabupaten.



Gambar 1.1.

Hubungan Antar Dokumen

1.5. Sistematika Dokumen RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat kerangka dasar penyusunan yang menjadi konteks dan dasar penyusunan RPJMD, proses dan pendekatan, maksud dan tujuan, dasar hukum dan kedudukan RPJMD dalam hubungannya dengan dokumen perencanaan lain baik secara vertikal. Materi muatan bab 1 terdiri atas:

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Hubungan Antar Dokumen
- 1.5. Sistematika RPJMD

BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH

Sebagai pelaksanaan pendekatan teknokratis, hasilnya dituangkan dalam Bab 2. Digunakan analisis deskriptif capaian pembangunan lima tahun sebelumnya untuk dijadikan kerangka dasar penilaian, proyeksi dan target capaian pembangunan lima tahun ke depan. Materi muatan bab 2 terdiri atas:

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang meliputi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan masa depan. Materi muatan bab 3 terdiri atas:

3.1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011-2015

3.2. Neraca Daerah

3.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2011-2015

3.4. Kerangka Pendanaan Tahun 2016-2021

BAB IV. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat berbagai isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. Materi muatan bab 4 terdiri atas:

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.2. Isu Strategis Pembangunan Daerah

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Memuat rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Materi muatan bab 5 terdiri atas:

5.1. Visi

5.2. Misi

5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat strategi dan kebijakan yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Materi muatan bab 6 terdiri atas Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat kebijakan umum pembangunan daerah yang dituangkan dalam arah kebijakan dan program prioritas lima tahun ke depan. Materi muatan bab 7 terdiri atas:

7.1. Kebijakan Umum Pembangunan Daerah

7.2. Kebijakan Kewilayahan

7.3. Kebijakan Pendanaan

7.4. TASIK SIAP

7.5. Program Pembangunan Daerah

**BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

Memuat rencana program prioritas pembangunan daerah selama lima tahun ke depan dengan materi muatan Program Pembangunan Daerah dan Kerangka Pendanaan

BAB IX. INDIKATOR KINERJA DAERAH

Memuat indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator makro dan indikator kinerja setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Materi muatan bab 9 terdiri atas:

9.1. Target Indikator Makro Daerah

9.2 Target Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Urusan

BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Bagian ini menjelaskan pedoman transisi, kaidah pelaksanaan dan penutup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021. Materi muatan bab 10 terdiri atas:

10.1. Pedoman Transisi

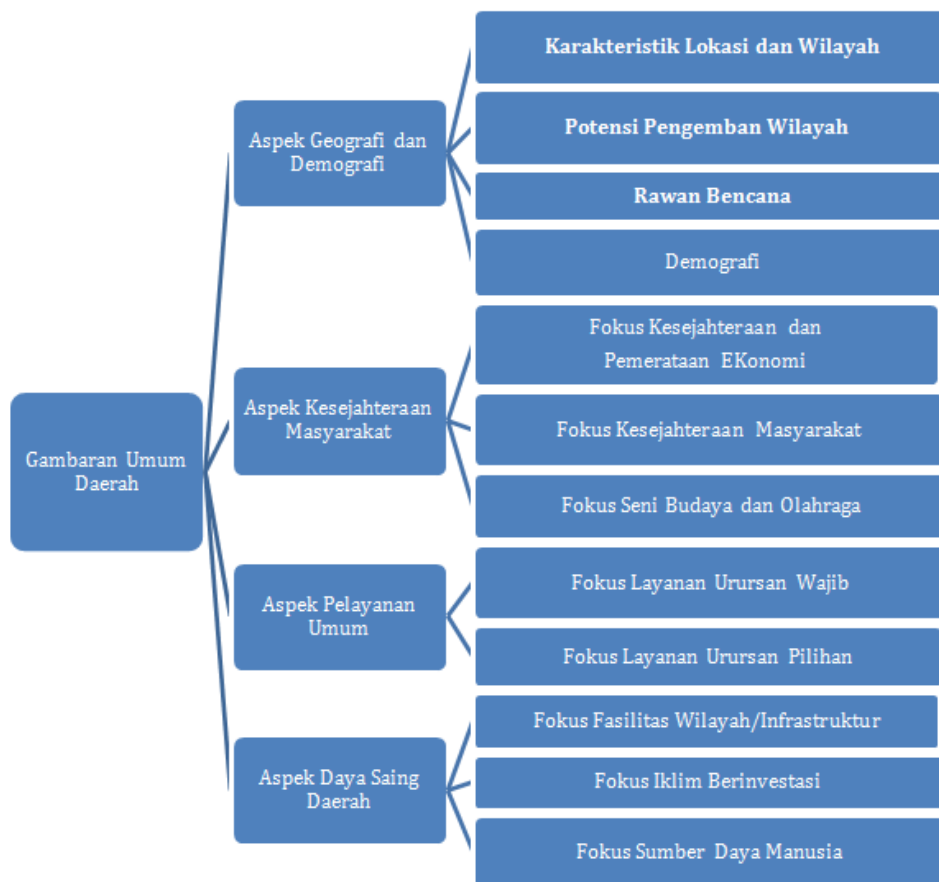
10.2. Kaidah Pelaksanaan

BAB XI. PENUTUP

Merupakan kesimpulan akhir berupa ringkasan dokumen RPJMD sekaligus kata-kata penutup RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Gambaran umum daerah memperlihatkan kondisi terkini perkembangan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sesuai paradigma pembangunan yang dipakai yaitu pembangunan manusia, maka pencapaian tujuan pembangunan daerah seringkali direpresentasikan dengan indikator pembangunan manusia, meskipun bukan satu-satunya patokan. Aspek penting dalam pembangunan daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi; aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; dan aspek daya saing daerah pada dasarnya diarahkan untuk dapat meningkatkan pembangunan manusia itu sendiri. Berikut disajikan sistematika gambaran umum capaian pembangunan Kabupaten Tasikmalaya.



Gambar 2.1.
Gambaran Umum Daerah

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Tasikmalaya secara geografis terletak di antara 7°02'29" dan 7°49'08" Lintang Selatan serta 107°54'10" dan 108°25'42" Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah :

Sebelah Utara : Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya
Sebelah Timur : Kabupaten Ciamis
Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
Sebelah Barat : Kabupaten Garut



Gambar 2.2.
Peta Kabupaten Tasikmalaya

Wilayah Kabupaten Tasikmalaya memiliki ketinggian berkisar antara 0 – 2.500 meter di atas permukaan laut (dpl). Secara umum wilayah tersebut dapat dibedakan menurut ketinggiannya, yaitu: bagian Utara merupakan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian berkisar antara 1.000–2.500 meter dpl dan

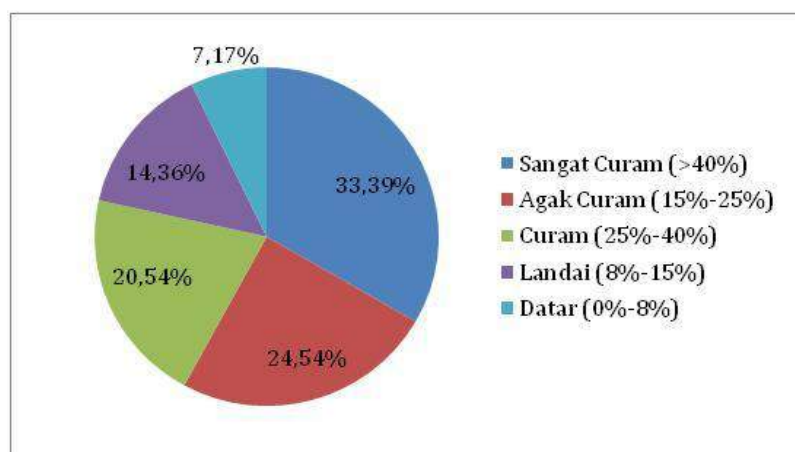
bagian Selatan merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 – 100 meter dpl.

Luas tanah Kabupaten Tasikmalaya setelah pemekaran dengan Kota Tasikmalaya adalah sebesar 270.882 hektar dimana 245.412 hektar dipergunakan sebagai lahan pertanian dan 25.470 hektar merupakan lahan bukan pertanian. Kecamatan Cipatujah memiliki luas lahan paling besar yaitu 24.667 hektar dengan luas lahan pertanian 20.876 hektar dan bukan pertanian 3.791 hektar. Sedangkan kecamatan dengan luas lahan paling kecil ialah Kecamatan Sukaresik yaitu 1.780 hektar di mana 1.655 hektar lahan pertanian dan 125 hektar lahan bukan pertanian.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Tasikmalaya merupakan tanah darat/tanah bukan sawah dan selebihnya merupakan sawah. Kabupaten Tasikmalaya di wilayah dataran rendah umumnya bertemperatur 34°C dengan kelembaban 50%. Pada daerah dataran tinggi bertemperatur 18° - 22° C dengan kelembaban berkisar antara 61%-73%. Curah hujan rata-rata per tahun 2.171,95 mm dengan jumlah hari hujan efektif selama satu tahun sebanyak 84 hari. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November, dengan musim hujan terjadi antara bulan Oktober dan musim kemarau terjadi antara bulan Juni-September.

Berdasarkan peta kelerengan, diketahui fisiografi dan bentuk wilayah Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas grup Marin (M), Fluvio Marin (B), Aluvial (A), Sistem Dataran (Plain system), Sistem Perbukitan (Hilly System), dan Sistem Vulkanik (Volcanik System). Sebagian besar daerah terdiri dari fisiografi Vulkanik. Bentuk wilayah sebagian besar bergelombang sampai berbukit, kecuali di kecamatan-kecamatan bagian utara, berbukit sampai bergunung.

Bentang alam berdasarkan kemiringan lahan Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh bentuk permukaan bumi agak curam sampai dengan curam yaitu sebesar 78,47% kondisi kemiringan lahan tersebut kurang menguntungkan untuk pengembangan prasarana dan sarana wilayah. Sedangkan kemiringan lahan yang sangat menunjang untuk pengembangan permukiman perkotaan hanya sebesar 21,53% dari total luas kabupaten, luasan tersebut umumnya terdistribusi di sekitar kota-kota kecamatan. Kondisi kemiringan lahan di Kabupaten Tasikmalaya disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.3.
Kondisi Kemiringan Lahan Kabupaten Tasikmalaya

Kabupaten Tasikmalaya pada umumnya bersifat tropis dengan temperatur 34o C pada wilayah dataran rendah dengan kelembaban 50%. Sedangkan pada daerah dataran tinggi mempunyai temperature 18o – 22o C dengan kelembaban udara berkisar antara 61% - 73%.Curah hujan rata-rata per tahun 2.171,95 mm, dengan jumlah hari hujan efektif selama satu tahun sebanyak 84 hari.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Pasal 6 Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana. Sistem pusat kegiatan terdiri atas sistem perkotaan dan sistem perdesaan. Sistem perkotaan terdiri atas Pusat Kegiatan Lokal/PKL dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi/PKLp. Pusat Kegiatan Lokal yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan meliputi Perkotaan Singaparna dan Perkotaan Karangnunggal.

Pusat Kegiatan Lokal Promosi adalah kawasan perkotaan yang ke depannya dipromosikan atau diajukan untuk ditetapkan sebagai PKL yang meliputi Perkotaan Manonjaya dan Perkotaan Ciawi. Selain PKL dan PKLp, rencana struktur ruang wilayah terdiri dari Pusat Pelayanan Kawasan atau PPK yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa yang meliputi; Perkotaan Rajapolah; Perkotaan Taraju; Perkotaan Cipatujah; Perkotaan Cibalong; Perkotaan Mangunreja; Perkotaan Bantarkalong; Perkotaan Cikatomas; dan Perkotaan Cineam.

Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, dibagi pula dalam beberapa kawasan strategis. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang perlu disusun rencana detailnya yaitu:

Tabel 2.1.
Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Kabupaten Tasikmalaya

No	Kriteria	Sub Kriteria	Penetapan
1	Sudut kepentingan ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi ekonomi cepat tumbuh; 2. Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; 3. Potensi ekspor; 4. Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; 5. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; 6. Fungsi mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan; 7. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau 8. Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan Perkotaan Singaparna b. Kawasan Perkotaan Ciawi c. Kawasan Perkotaan Karangnunggal d. Kawasan Perkotaan Manonjaya e. Kawasan Industri dan Perdagangan Kerajinan Rajapolah f. Kawasan wisata Pantai Karangtawulan g. Kawasan Wisata Alam Galunggung
2	Sudut kepentingan Sosial Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya; 2. Prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya; 3. Aset yang harus dilindungi dan dilestarikan; 4. Tempat perlindungan peninggalan budaya; 5. Tempat yang memberikan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan Budaya Kampung Naga b. Kawasan wisata Ziarah : Pamijahan c. Kawasan Pesantren Suryalaya d. Kawasan Pesantren Miftahul Huda; e. Kawasan Pesantren Cipasung

No	Kriteria	Sub Kriteria	Penetapan
		perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau 6. Tempat yang memiliki potensi pengembangan kualitas manusia (Akhlak, Iman dan takwa)	
3	Sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	1. Potensi SDA energi panas bumi. 2. Sumber daya alam strategis; 3. Pengelolaan kelestarian lingkungan pesisir.	a. Kawasan Geothermal Karaha Bodas di Kecamatan Kadipaten b. Kawasan Batu Mulia Jasper di Desa Buni Asih Kecamatan Pancatengah c. Kawasan Plasma Nuftah Sirah Cimunjul di Kecamatan Cipatujah d. Kawasan Pertambangan di Kecamatan Cipatujah, Cikalong dan Karangnunggal. e. Kawasan Pesisir di Kecamatan Cipatujah, Cikalong dan Karangnunggal.

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Tasikmalaya, 2012

KSK yang sudah disusun rencana rincinya adalah KSK Galunggung dan KSK Kawasan Pesisir, KSK pada sudut kepentingan ekonomi juga termasuk ke dalam RDTR Perkotaan yaitu Kawasan Perkotaan Singaparna, Ciawi, Karangnunggal, dan Manonjaya.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan wilayah rawan bencana sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari:

a) Kawasan rawan gempa bumi seluas kurang lebih 118.637 hektar meliputi :

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1) Kecamatan Bantarkalong; | 18) Kecamatan Mangunreja; |
| 2) Kecamatan Bojongasih; | 19) Kecamatan Manojaya; |
| 3) Kecamatan Bojonggambir; | 20) Kecamatan Padakembang; |
| 4) Kecamatan Ciawi; | 21) Kecamatan Pagerageung; |
| 5) Kecamatan Cibalong; | 22) Kecamatan Pancatengah; |
| 6) Kecamatan Cigalontang; | 23) Kecamatan Parungponteng; |
| 7) Kecamatan Cikalong; | 24) Kecamatan Puspahiang; |
| 8) Kecamatan Cikatomas; | 25) Kecamatan Rajapolahg; |
| 9) Kecamatan Cipatujah; | 26) Kecamatan Salawu; |
| 10) Kecamatan Cisayong; | 27) Kecamatan Salopa; |
| 11) Kecamatan Culamega; | 28) Kecamatan Sariwangi; |
| 12) Kecamatan Gunungtanjung; | 29) Kecamatan Singaparna; |
| 13) Kecamatan Jatiwaras; | 30) Kecamatan Sodonghilir; |
| 14) Kecamatan Kadipaten; | 31) Kecamatan Sukahening; |
| 15) Kecamatan Karangjaya; | 32) Kecamatan Sukaraja; |
| 16) Kecamatan Karangnunggal; | 33) Kecamatan Tanjungjaya; dan |
| 17) Kecamatan Leuwisari; | 34) Kecamatan Taraju |

b) Kawasan rawan gunung berapi seluas kurang lebih 8.806 hektar meliputi :

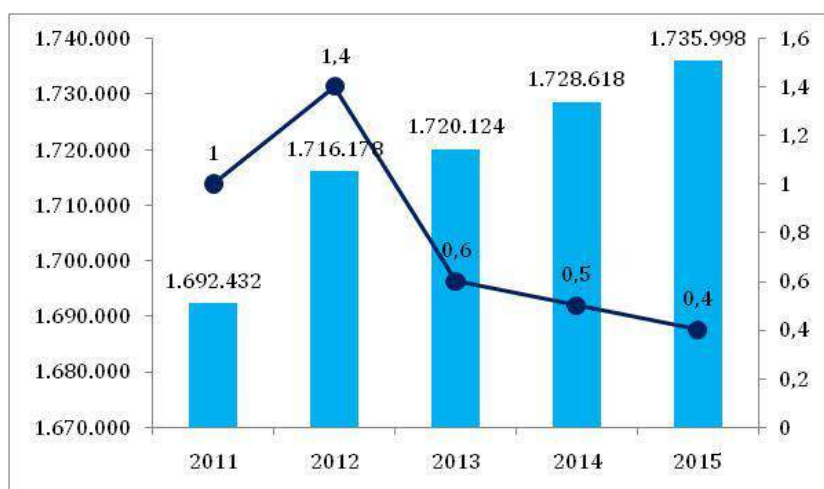
- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1) Kecamatan Cibalong; | 7) Kecamatan Padakembang; |
| 2) Kecamatan Cigalontang; | 8) Kecamatan Sariwangi; |
| 3) Kecamatan Cisayong; | 9) Kecamatan Singaparna; |
| 4) Kecamatan Jatiwaras; | 10) Kecamatan Sukaraja; |
| 5) Kecamatan Leuwisari; | 11) Kecamatan Sukaratu; dan |
| 6) Kecamatan Mangunreja; | 12) Kecamatan Tanjungjaya. |

c) Kawasan rawan tsunami seluas kurang lebih 5.525 hektar meliputi :

- 1) Kecamatan Cikalong;
- 2) Kecamatan Cipatujah; dan
- 3) Kecamatan Karangnunggal.

2.1.4. Demografi

Perkembangan demografi berperan penting dalam pembangunan karena merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan. Perkembangan jumlah dan pertumbuhan penduduk Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2015 disajikan dalam gambar berikut.



Sumber : BPS Pusat (2015)

Gambar 2.4.
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

Pada tabel berikut disajikan perkembangan rata-rata kepadatan penduduk per kilometer persegi dari tahun 2011-2014, di mana di Kabupaten Tasikmalaya kepadatan penduduk tidak merata. Kondisi ini penting diwaspadai karena berpotensi negatif dalam pembangunan. Pada daerah-daerah jarang penduduk, akan terjadi inefisiensi pembangunan terutama pembangunan fisik dan pemanfaatan sumberdaya alam. Sebaliknya pada daerah-daerah dengan tingkat kepadatan tinggi, tekanan penduduk terhadap sumberdaya alam juga akan tinggi, yang dapat mengancam kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya alam yang ada.

Tabel 2.2.
Rata-Rata Kepadatan Penduduk Per Kilometer Persegi
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No.	Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Cipatujah	257	258	261	262	263
2	Karangnunggal	580	600	607	609	612
3	Cikalong	435	443	448	450	452
4	Pancatengah	223	224	227	227	228
5	Cikatomas	353	364	368	369	371
6	Cibalong	522	526	532	534	537
7	Parungponteng	664	716	724	727	730
8	Bantarkalong	571	579	585	588	590
9	Bojongasih	494	502	508	510	513
10	Culamega	366	339	343	344	346
11	Bojonggambir	255	229	232	232	234
12	Sodonghilir	631	679	686	690	693
13	Taraju	637	676	685	687	690
14	Salawu	943	1.151	1.163	1.169	1.175
15	Puspahiang	725	946	957	961	966
16	Tanjungjaya	1.109	1.166	1.18	1.185	1.190

No.	Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014
17	Sukaraja	1.04	1.144	1.166	1.163	1,168
18	Salopa	435	401	408	407	409
19	Jatiwaras	537	659	639	669	672
20	Cineam	421	427	431	434	436
21	Karangjaya	259	261	265	265	267
22	Manonjaya	1.348	1.545	1.563	1.569	1,577
23	Gunungtanjung	638	767	776	779	783
24	Singaparna	3.372	2.669	2.712	2.712	2,726
25	Sukarame	1.379	1.976	2.015	1.349	2,017
26	Mangunreja	1.595	1.253	1.284	1.894	1,279
27	Cigalontang	536	571	579	580	583
28	Leuwisari	818	692	700	703	707
29	Sariwangi	742	617	626	627	630
30	Padakembang	886	954	968	969	973
31	Sukaratu	988	776	784	788	792
32	Cisayong	1.091	897	905	911	916
33	Sukahening	915	1.044	1.055	1.061	1,066
34	Rajapolah	1.911	2.095	2.136	2.129	2,139
35	Jamanis	1.792	1.531	1.554	1.556	1,563
36	Ciawi	1.273	1.284	1.302	1.305	1,311
37	Kadipaten	691	723	734	734	738
38	Pagerageung	737	776	786	788	792
39	Sukaresik	1.896	1.882	1.916	1.913	1,923
Jumlah		618	625	633	635	638

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya (2015)

Rasio jenis kelamin atau *sex ratio* adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Terjadi penurunan *sex ratio* Kabupaten Tasikmalaya hingga mencapai 98,36 pada tahun 2015 yang artinya tiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 98 orang penduduk laki-laki. Terkait dengan migrasi, kondisi ini diduga terjadi karena semakin banyak laki-laki yang memasuki Kabupaten Tasikmalaya.



Sumber: BPS Pusat (2015)

Gambar 2.5.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

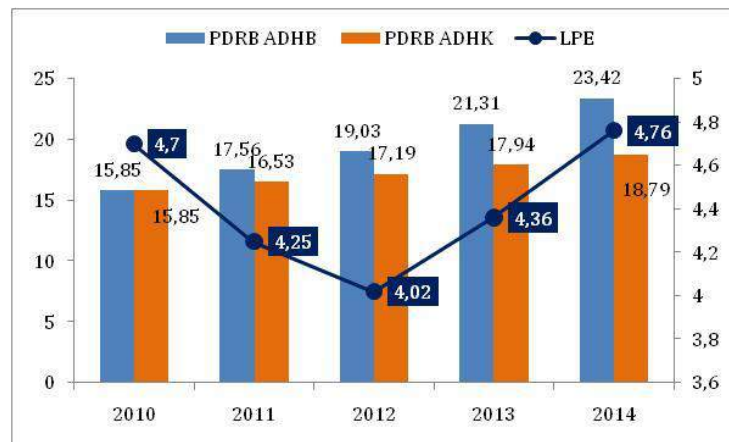
Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan salah satu tujuan pembangunan. Manfaat tersebut harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pada bagian ini diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya.

a. Nilai Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

PDRB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Pertumbuhan ekonomi yang dalam hal ini Laju PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan

perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. PDRB ADHB, PDRB ADHK dan LPE dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya (2015)

Gambar 2.6.
PDRB ADHB dan ADHK (Trilyun) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010-2014

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2014 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 23,42 triliun. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, PDRB atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan sebesar Rp 2,1 triliun atau meningkat sebesar 9,92 persen dari tahun sebelumnya. Tingkat perkembangan perekonomian Kabupaten Tasikmalaya sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 terus mengalami peningkatan. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2010 tercatat sebesar Rp 15,85 triliun dan meningkat hingga Rp 23,42 triliun di tahun 2014.

Tabel 2.3.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010-2014

Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013 *	2014 **
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,827,815.2	7,347,901.7	7,661,147.1	8,455,685.1	9,201,769.7
B	Pertambangan dan Pengalihan	58,100.4	63,115.5	60,878.4	65,863.7	70,592.7
C	Industri Pengolahan	1,073,449.9	1,165,128.7	1,320,993.1	1,518,298.3	1,768,882.1
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,125.8	10,944.5	11,619.6	11,441.8	14,459.1
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,071.6	3,375.7	3,455.8	3,772.3	3,893.5
F	Konstruksi	1,359,627.4	1,467,167.9	1,513,179.3	1,650,203.9	1,808,381.5

Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013 *	2014 **
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,897,178.9	3,420,567.2	3,896,285.7	4,460,339.7	4,823,071.7
H	Transportasi dan Pergudangan	499,067.2	576,154.8	588,787.0	793,040.2	890,982.4
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	222,034.0	248,702.5	264,647.3	287,422.0	300,967.3
J	Informasi dan Komunikasi	434,317.5	490,830.2	580,841.6	571,098.7	679,729.4
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	414,492.3	465,221.5	544,872.3	623,320.7	681,230.7
L	Real Estate	240,885.4	262,615.1	290,711.7	288,449.1	310,154.6
M,N	Jasa Perusahaan	60,201.4	64,059.6	68,940.2	77,799.0	89,197.9
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	824,309.5	934,067.3	1,024,384.9	1,086,153.5	1,141,808.5
P	Jasa Pendidikan	642,549.9	728,650.1	835,549.7	1,016,935.2	1,191,095.2
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	75,110.7	79,330.7	92,152.7	101,264.4	124,884.4
R,S,T,U	Jasa lainnya	211,024.5	231,080.3	271,645.1	294,278.1	317,245.5
PDRB		15,853,361.6	17,558,913.4	19,030,091.4	21,305,365.6	23,418,346.2
PDRB Tanpa Migas		15,853,361.6	17,558,913.4	19,030,091.4	21,305,365.6	23,418,346.2

Catatan : *Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya (2015)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2014 atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp 18,79 triliun. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, PDRB atas dasar harga konstan mengalami kenaikan sebesar Rp 0,85 triliun atau meningkat sebesar 4,76 persen dari tahun sebelumnya. Tingkat perkembangan perekonomian Kabupaten Tasikmalaya sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 terus mengalami peningkatan. Nilai PDRB atas dasar harga konstan mengalami peningkatan hingga sebesar Rp 18,79 triliun di tahun 2014, pertumbuhan ini meskipun tidak terlalu tinggi namun relatif cukup baik.

Tabel 2.4.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010-2014

Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013 *	2014 **
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,827,815.2	6,930,875.0	6,850,813.8	6,990,063.9	7,031,571.4
B	Pertambangan dan Penggalian	58,100.4	61,771.0	58,996.2	59,933.5	58,083.9
C	Industri Pengolahan	1,073,449.9	1,115,480.1	1,198,049.3	1,283,520.3	1,387,222.4
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,125.8	10,819.8	11,487.5	13,205.7	16,226.1
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,071.6	3,221.1	3,296.9	3,421.4	3,511.2

Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013 *	2014 **
F	Konstruksi	1,359,627.4	1,386,247.0	1,423,959.5	1,487,841.6	1,590,598.3
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,897,178.9	3,123,395.0	3,396,893.2	3,645,550.0	3,892,044.1
H	Transportasi dan Pergudangan	499,067.2	549,968.9	586,551.9	582,761.3	586,910.1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	222,034.0	237,906.7	245,451.4	257,857.8	265,367.7
J	Informasi dan Komunikasi	434,317.5	493,682.7	546,375.0	580,394.7	685,996.7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	414,492.3	446,592.3	496,061.8	538,354.2	562,928.2
L	Real Estate	240,885.4	255,589.0	277,925.0	268,704.2	274,629.1
M,N	Jasa Perusahaan	60,201.4	63,156.3	66,269.5	70,312.8	76,376.9
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	824,309.5	835,825.7	873,808.4	885,449.9	909,266.3
P	Jasa Pendidikan	642,549.9	705,396.1	800,434.3	898,448.0	1,050,383.0
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	75,110.7	76,612.4	86,343.7	94,139.3	113,069.9
R,S,T,U	Jasa lainnya	211,024.5	230,027.9	269,035.6	281,334.2	290,422.0
PDRB		15,853,361.6	16,526,567.1	17,191,752.9	17,941,292.8	18,794,607.1
PDRB Tanpa Migas		15,853,361.6	16,526,567.1	17,191,752.9	17,941,292.8	18,794,607.1

Catatan : *Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya (2015)

Total nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dari kelompok primer pada tahun 2014 mencapai Rp 9,27 triliun atau meningkat sebesar 8,81 persen dibanding tahun sebelumnya, walaupun mengalami peningkatan, namun nilai ini masih lebih rendah dibanding kenaikan pada tahun 2013 yang mencapai hingga 10,35 persen. Adapun kelompok sektor sekunder dan kelompok tertier masing-masing menghasilkan nilai tambah bruto sebesar Rp 3,60 triliun dan Rp 10,55 triliun, atau mengalami kenaikan masing-masing sebesar 12,94 persen dan 9,90 persen dibanding tahun sebelumnya. Berbeda halnya dengan kelompok primer, pada kelompok sekunder yang mampu tumbuh pesat pada tahun ini hingga jauh lebih tinggi dibanding kenaikan tahun sebelumnya, sedangkan pada kelompok tersier walaupun mengalami peningkatan, namun nilai ini masih lebih rendah dibanding kenaikan pada tahun 2013.

Untuk nilai tambah bruto atas dasar harga konstan, dimana faktor inflasi harga sudah diadopsikan, NTB kelompok primer mencapai Rp 7,09 triliun atau meningkat 1,39 persen dari tahun 2011, sedangkan kelompok sekunder dan tertier masing-masing menghasilkan nilai tambah bruto sebesar Rp 3 triliun dan Rp 8,71 triliun atau mengalami kenaikan masing-masing sebesar 7,52 persen dan 7,45 persen dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.5.
PDRB ADHB dan ADHK Menurut Lapangan Usaha
(Juta Rupiah) Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2010-2014

Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan	
	2013*	2014**	2013*	2014**
I. Primer	8.52	9.27	7.05	7.09
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	8.46	9.20	6.99	7.03
B. Pertambangan dan Penggalian	0.07	0.07	0.06	0.06
II. Sekunder	3.18	3.60	2.79	3.00
C. Industri Pengolahan	1.52	1.77	1.28	1.39
D. Pengadaan Listrik & Gas	0.01	0.01	0.01	0.02
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Bangunan	1.65	1.81	1.49	1.59
III. Tersier	9.60	10.55	8.10	8.71
G. Perdagangan Besar dan Eceran	4.46	4.82	3.65	3.89
H. Transportasi dan Pergudangan	0.79	0.89	0.58	0.59
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.29	0.30	0.26	0.27
J. Informasi dan Komunikasi	0.57	0.68	0.58	0.69
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0.62	0.68	0.54	0.56
L. Real Estate	0.29	0.31	0.27	0.27
M,N Jasa Perusahaan	0.08	0.09	0.07	0.08
O. Administrasi Pemerintahan	1.09	1.14	0.89	0.91
P. Jasa Pendidikan	1.02	1.19	0.90	1.05
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	0.10	0.12	0.09	0.11
R,S,T,U . Jasa Lainnya	0.29	0.32	0.28	0.29
KABUPATEN TASIKMALAYA	21.31	23.42	17.94	18.79

Catatan : *Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya (2015)

b. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Tasikmalaya adalah berbasis pertanian, terutama pada pertanian tanaman pangan Hal ini terlihat dengan angka kontribusi pertanian terhadap penyusunan PDRB Kabupaten Tasikmalaya sebesar 39,29 persen. Meskipun kontribusinya dari tahun ke tahun mengalami sedikit penurunan namun masih tetap menduduki rangking pertama dibanding kaktegori lainnya. Kategori lain yang tidak kalah pentingnya dalam penyusunan PDRB Kabupaten Tasikmalaya adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor yang menduduki rangking ke-2 setelah pertanian.

Tabel 2.6.
Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010-2014

Kategori	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013*	2014**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	43.07	41.85	40.26	39.69	39.29
B	Pertambangan dan Penggalian	0.37	0.36	0.32	0.31	0.30
C	Industri Pengolahan	6.77	6.64	6.94	7.13	7.55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06

Kategori	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013*	2014**
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
F	Konstruksi	8.58	8.36	7.95	7.75	7.72
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18.27	19.48	20.47	20.94	20.60
H	Transportasi dan Pergudangan	3.15	3.28	3.09	3.72	3.80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.40	1.42	1.39	1.35	1.29
J	Informasi dan Komunikasi	2.74	2.80	3.05	2.68	2.90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.61	2.65	2.86	2.93	2.91
L	Real Estat	1.52	1.50	1.53	1.35	1.32
M,N	Jasa Perusahaan	0.38	0.36	0.36	0.37	0.38
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.20	5.32	5.38	5.10	4.88
P	Jasa Pendidikan	4.05	4.15	4.39	4.77	5.09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.47	0.45	0.48	0.48	0.53
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.33	1.32	1.43	1.38	1.35
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan : *Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya (2015)

c. PDRB per Kapita

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu indikator yang dinamakan PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.



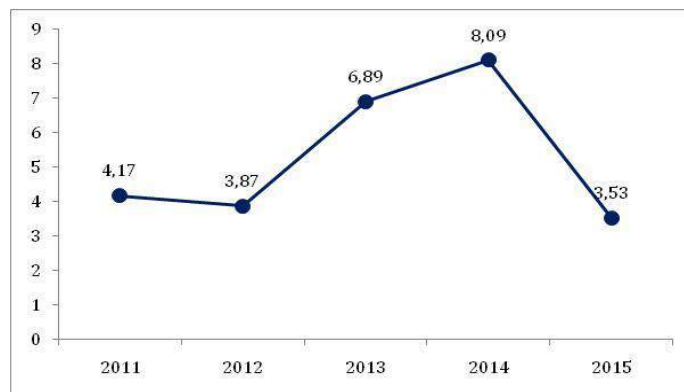
Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya (2015)

Gambar 2.7.
PDRB / Kapita ADHB (Juta), Indeks Perkembangan,
dan Pertumbuhan Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2011-2015

Pada tahun 2014, secara agregat PDRB per kapita Kabupaten Tasikmalaya mencapai 13,55 juta rupiah meningkat 9,4 persen bila dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 12,39 juta. Peningkatan tersebut, lebih tinggi bila dibandingkan dengan peningkatan pada tahun-tahun sebelumnya selama periode 2011-2014 berturut-turut sebesar 10,01 persen, 7,74 persen, 11,32 persen dan 9,36 persen. PDRB per kapita merupakan proxy ukuran pendapatan per kapita atau dengan kata lain, PDRB per kapita diasumsikan sebagai pendapatan per kapita. Kemampuan masyarakat untuk mengonsumsi produk barang/jasa sangat dipengaruhi oleh pendapatan per kapita. (BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2015)

d. Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga secara umum dan terus menerus. Angka inflasi Kabupaten Tasikmalaya mengikuti inflasi Kota Tasikmalaya, karena berada dalam satu radar perhitungan. Secara umum inflasi di Kabupaten Tasikmalaya termasuk kriteria ringan karena kurang dari 10% setahun.



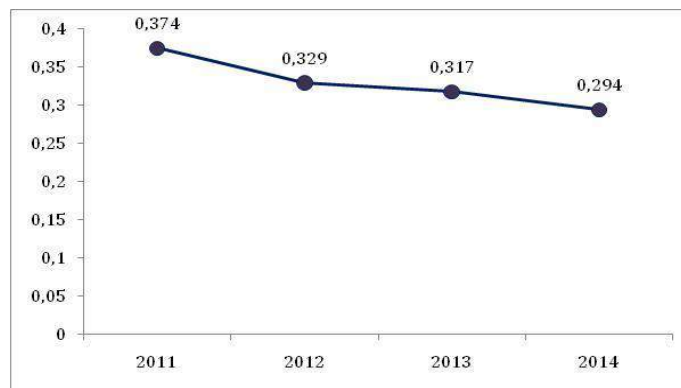
Sumber : Bank Indonesia (berbagai tahun)

Gambar 2.8.
Inflasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

e. Gini Ratio

Gini Ratio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1. Gini Ratio bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Gini Ratio bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Gini Ratio diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Kategori Gini Ratio adalah :

- 1) $G < 0,3$ = ketimpangan rendah
- 2) $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang dan
- 3) $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (2014)

Gambar 2.9.

Gini Ratio Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2014

f. Kemiskinan

Dalam pengukuran kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.



Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2015)

Gambar 2.10.

Jumlah Penduduk Miskin dan Proporsi terhadap Jumlah Penduduk Total Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

Tinjauan Khusus: Kemiskinan Menurut Konsep

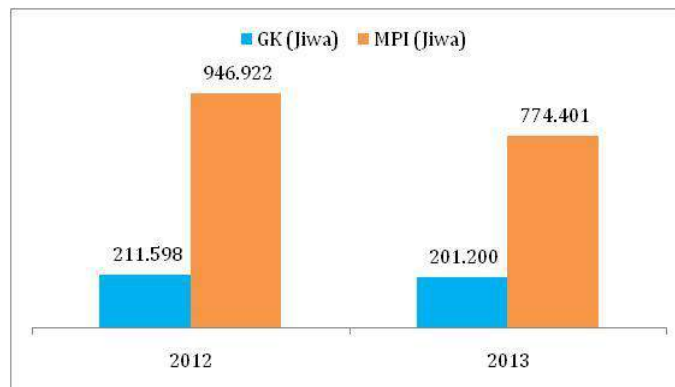
Multidimensional Poverty Index (MPI)

Selain kemiskinan berdasarkan ketidakmampuan dari sisi ekonomi, terdapat kemiskinan berdasarkan konsep kemiskinan multidimensi. Dengan indikator yang disusun berdasarkan dimensi seperti tersaji pada gambar berikut.



Gambar 2.11.
Dimensi Kemiskinan Mutidimensi

Pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tasikmalaya dengan ukuran MPI lebih tinggi yaitu 946.922 jiwa dibandingkan dengan ukuran garis kemiskinan yaitu 211.598 jiwa. Begitu pula halnya pada tahun 2013, dimana jumlah penduduk miskin dengan ukuran MPI lebih tinggi dibanding ukuran garis kemiskinan.



Gambar 2.12.
Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Pendekatan Garis Kemiskinan dan Kemiskinan Multidimensi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012-2013

Angka kemiskinan multidimensi menunjukkan persentase rumah tangga yang mengalami kemiskinan multidimensi dibandingkan dengan jumlah populasi daerah bersangkutan. Seiring dengan menurunnya jumlah rumah tangga miskin, maka angka kemiskinan dimensional di Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan dari 53,40% pada tahun 2012 menjadi 43,40% pada tahun 2013.



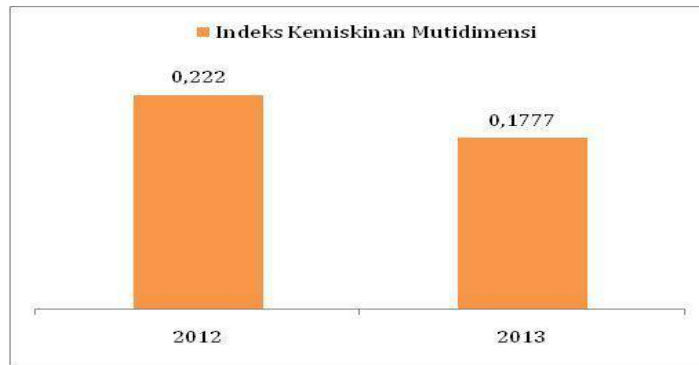
Gambar 2.13.
Jumlah Rumah Tangga Miskin dan
Angka Kemiskinan Multidimensi
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012-2013

Intensitas kemiskinan multidimensi menunjukkan seberapa tinggi tingkat intensitas kemiskinan multidimensi yang terjadi. Menurut versi MPI, garis kemiskinan diukur dari penilaian rumah tangga. Rumah tangga dikategorikan miskin ketika nilainya ≤ 0.333 . Dalam analisis intensitas ini akan terlihat seberapa parah kondisi kemiskinan di suatu daerah. Selain mengalami penurunan jumlah penduduk miskin, intensitas kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan penurunan dari 41,60% pada tahun 2012 menjadi 40,70% pada tahun 2013. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari 11 indikator kemiskinan yang terdeprivasi ada sebanyak 4-5 indikator, atau seseorang yang miskin di 4-5 dari 11 indikator. Semakin tinggi nilai intensitas kemiskinan semakin parah kondisi kemiskinan.



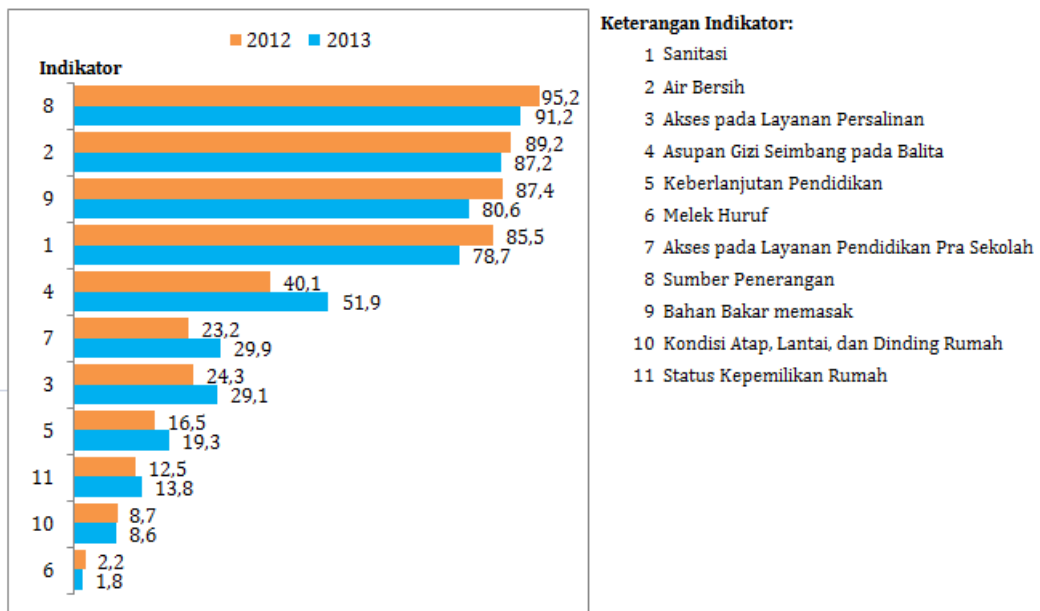
Gambar 2.14.
Intensitas Kemiskinan Multidimensi
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012-2013

Pada prinsipnya MPI akan berhubungan lurus dengan angka kemiskinan multidimensi. Jika angka kemiskinan multidimensinya tinggi maka MPI daerah tersebut juga tinggi dan sebaliknya. MPI Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan dari 0.222 (kategori sedang) pada tahun 2012 menjadi 0.1777 (kategori rendah) pada tahun 2013.



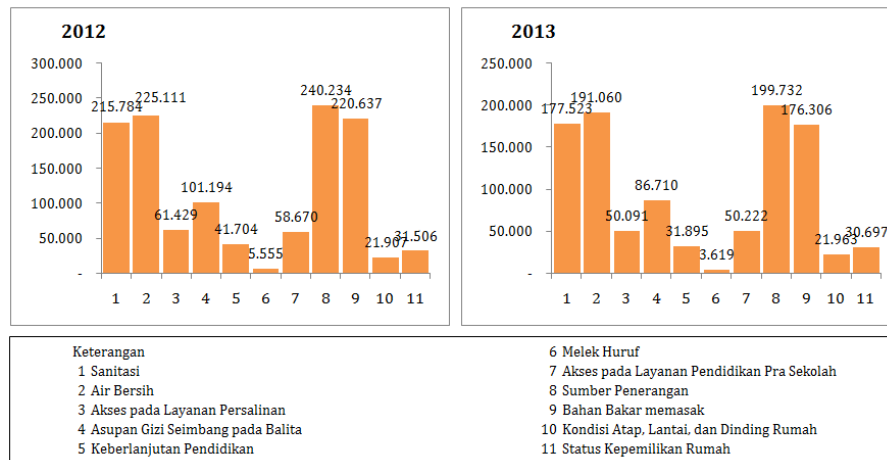
Gambar 2.15.
Indeks Kemiskinan Mutidimensi
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012-2013

Kemiskinan multidimensi dapat ditelaah lebih lanjut berdasarkan karakteristik yang dilihat dari distribusi menurut indikator. Tujuh indikator mengalami penurunan pada tahun 2013 dibanding 2012 yaitu sumber penerangan, air bersih, bahan bakar memasak, sanitasi, dan melek huruf. Terdapat 4 indikator yang mengalami peningkatan yaitu asupan gizi seimbang balita, akses pada layanan pendidikan pra sekolah, akses pada layanan persalinan, keberlanjutan pendidikan, dan status kepemilikan rumah.



Gambar 2.16.
Karakteristik Kemiskinan Mutidimensi
Kabupaten Tasikmalaya tahun 2012-2013

Selain berdasarkan proporsi menurut karakteristik, dapat pula diketahui jumlah rumah tangga menurut karakteristik kemiskinan multidimensi dan perkembangannya seperti tersaji pada gambar berikut.



Gambar 2.17.
Jumlah Rumah Tangga
Menurut Karakteristik Kemiskinan Multidimensi
Kabupaten Tasikmalaya tahun 2012-2013

Berdasarkan uraian di atas, maka persoalan kemiskinan multidimensi di Kabupaten Tasikmalaya dengan detail sesuai dengan karakteristik kemiskinan multidimensi dapat teridentifikasi. Informasi ini menjadi sangat penting sebagai masukan perencanaan pembangunan terutama program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan multidimensi bisa memandu pengambil kebijakan dalam menetapkan akar persoalan utama dari kemiskinan, menyusun strategi, program prioritas dan perencanaan kebijakan anggaran penanggulangan kemiskinan. Penentuan akar masalah sebagai prioritas penanggulangan kemiskinan dapat diketahui dari urutan terbesar kontribusi komponen terhadap jumlah rumah tangga sebagai berikut.

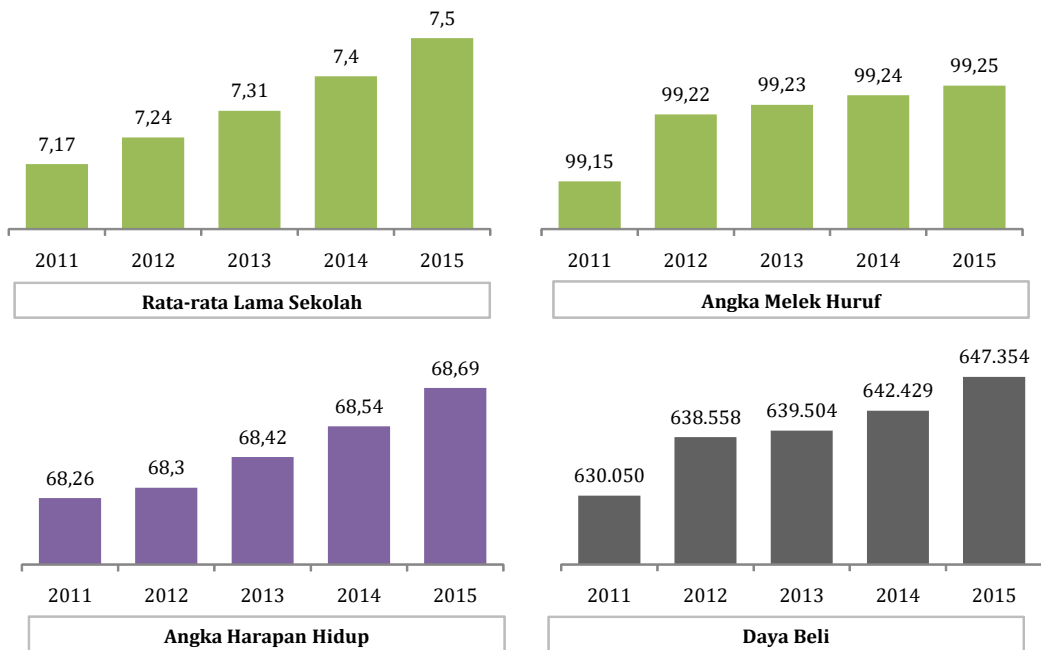
Tabel 2.7.
Kontribusi Karakteristik Kemiskinan Multidimensi
Kabupaten Tasikmalaya tahun 2012-2013

No.	Karakteristik	2012		2013
		Jumlah RT Miskin	%	Jumlah RT Miskin
1	Sanitasi	215,784	17.63	177,52
2	Air Bersih	225,111	18.40	191,06
3	Akses pada Layanan	61,429	5.02%	50,09
4	Asupan Gizi Seimbang	101,194	8.27%	86,71
5	Keberlanjutan Pendidikan	41,704	3.41%	31,89
6	Melek Huruf	5,555	0.45%	3,61
7	Akses pada layanan	58,670	4.79%	50,22
8	Sumber Penerangan	240,234	19.63	199,73
9	Bahan Bakar Memasak	220,637	18.03	176,30
10	Kondisi Atap, Lantai &	21,907	1.79%	21,96
11	Status Kepemilikan Rumah	31,506	2.57%	30,69
		100%		

g. Indeks Pembangunan Manusia

Kesejahteraan pada dasarnya memiliki dimensi yang luas dan beragam. Salah satu indikator yang dapat merepresentasikan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur pencapaian kemajuan pembangunan sosial maupun ekonomi. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Perkembangan capaian pembangunan manusia Kabupaten

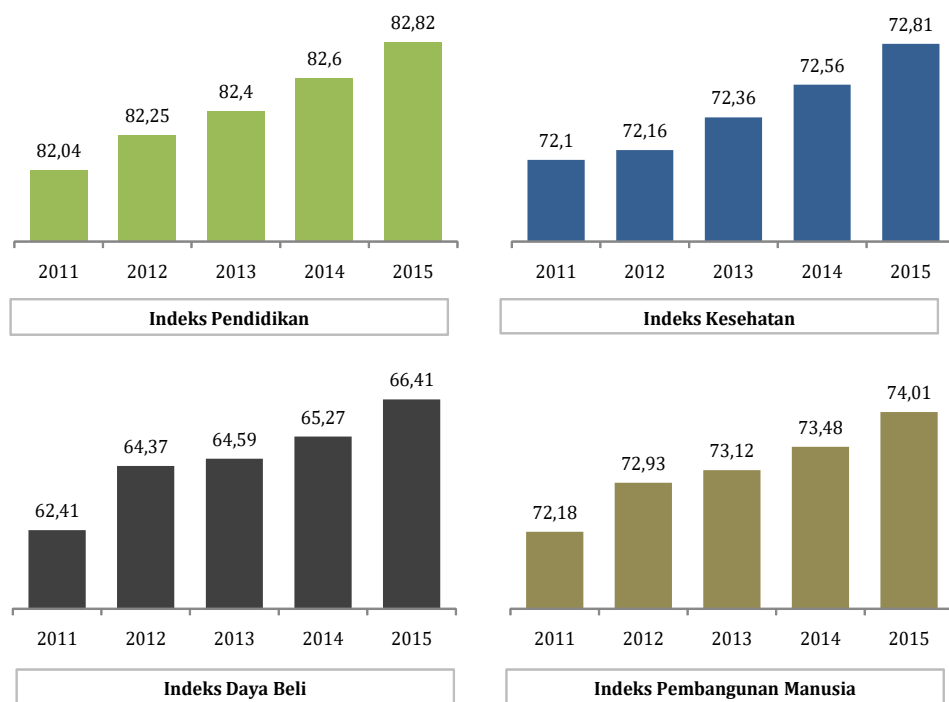
Tasikmalaya dan variabel pembentuknya dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2015 disajikan dalam gambar berikut.



Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)

Gambar 2.18.

Variabel Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015



Gambar 2.19.

Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Variabel Pembentuk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

Badan Pusat Statistik (BPS) meluncurkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dihitung dengan menggunakan metode terbaru dengan mengadopsi teknik perhitungan IPM yang telah digunakan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* dalam penyusunan laporan tahunan pembangunan manusia (*Human Development Report*) sejak tahun 2010. Gambaran IPM di atas masih menggunakan metode lama sesuai dengan target RPJMD tahun 2011-2015. Jika menggunakan metode penghitungan IPM baru, maka IPM Kabupaten Tasikmalaya tergambar sebagai berikut.



Gambar 2.20.
Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru
dan Variabel Pembentuk
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010-2014

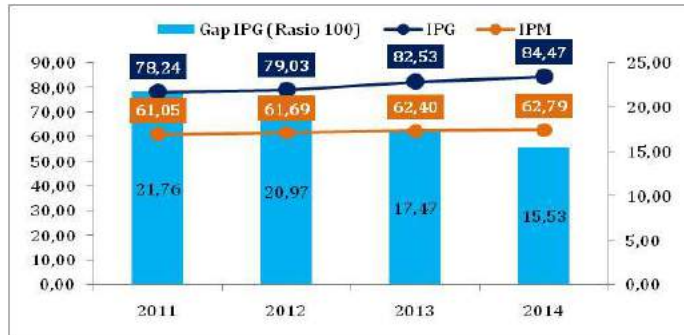
h. Indeks Pembangunan Gender

Tinjauan Khusus : Indeks Pembangunan Gender

Keterlibatan wanita di dalam kegiatan ekonomi merupakan suatu isu besar sejak beberapa tahun belakangan ini karena Indonesia termasuk negara di dunia yang memberikan komitmen penuh terhadap pencapaian delapan bagian *Millenium Development Goal's* yang diprakarsai Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) paling lambat pada tahun 2015, di mana salah satu diantaranya adalah pemberdayaan wanita.

Pada metode baru ini digunakan rasio IPM perempuan dengan IPM laki-laki, sehingga bisa terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dengan laki-laki. IPG pada tahun 2014 mengalami perubahan pada indikator dan juga

metodologi penghitungannya. Dimensi yang digunakan masih sama seperti yang disampaikan sebelumnya, yaitu: 1) umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*) 2) pengetahuan (*knowledge*); dan 3) standar hidup layak (*decent standard of living*) (BPS, 2014).

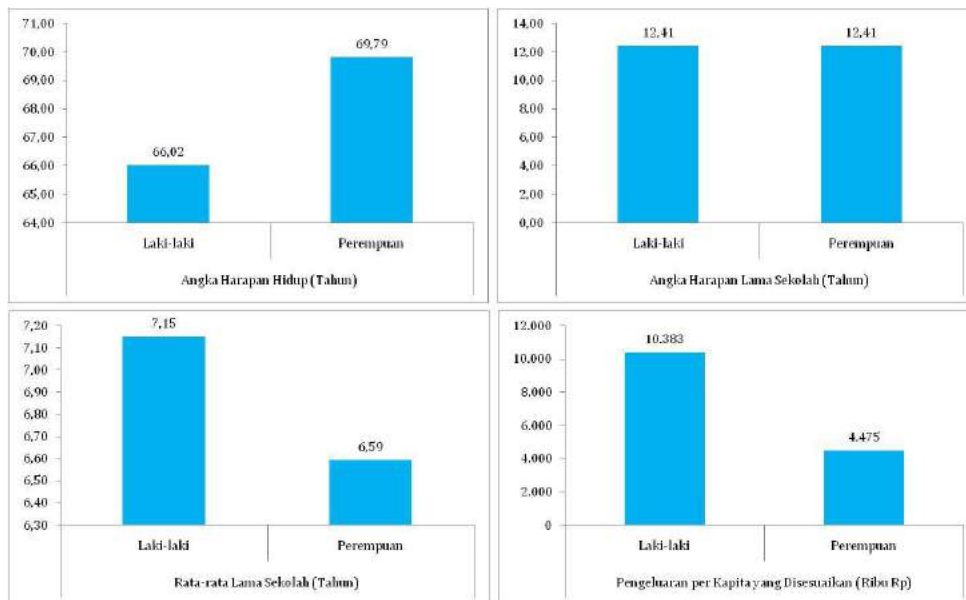


Sumber : BPS Pusat, 2015, diolah

Gambar 2.21.

Perkembangan IPM Metode Baru dan IPG Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2014

Peningkatan IPG selama kurun waktu tahun 2010-2014 terjadi karena meningkatnya komponen pembentuk IPG. Peningkatan IPG menunjukkan bahwa semakin terciptanya kondisi yang mendukung terciptanya kapabilitas perempuan di Kabupaten Tasikmalaya. Kondisi tersebut dapat berupa semakin berpihaknya kebijakan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam pengarusutamaan gender. Berikut merupakan capaian komponen pembentuk IPG yang meliputi variabel kesehatan perempuan (AHH), variabel pengetahuan perempuan (AHLs dan RLS), dan variabel standar hidup layak perempuan (Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan) di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2014.



Gambar 2.22.

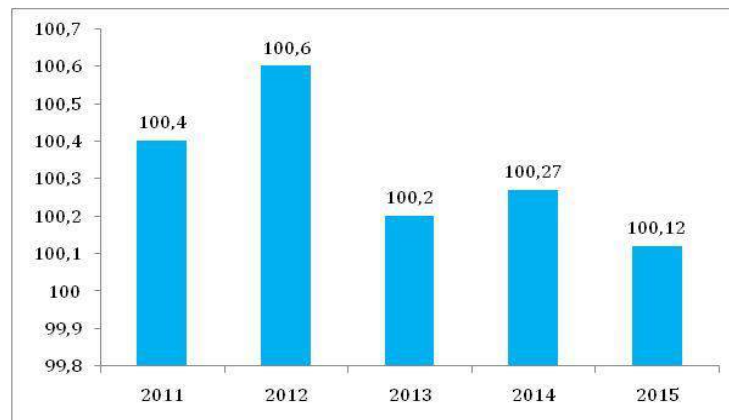
Komponen Pembentuk IPG Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

1) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat

APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK SD/MI /sederajat selama tahun 2011–2015 menunjukkan peningkatan di atas target 100% yaitu 100,4 % pada 2011 dan 100,12 % pada 2015.



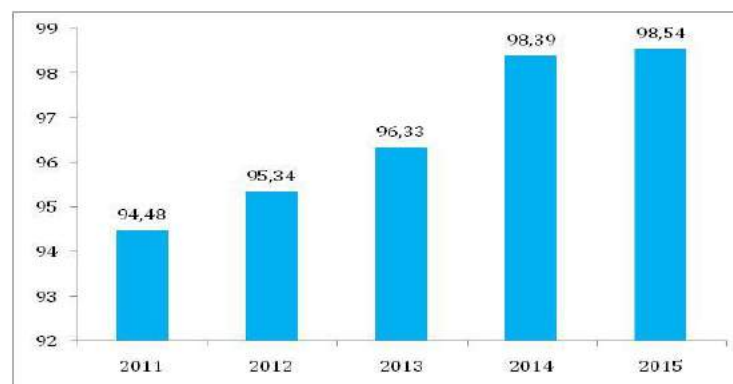
Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)

Gambar 2.23.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

2) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs./Sederajat

APK SMP/MTs./sederajat dari tahun 2011–2015 mengalami peningkatan sebesar 4,06 % yaitu dari sebesar 94,48% pada tahun 2011 menjadi sebesar 98,54% pada tahun 2015.



Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)

Gambar 2.24.

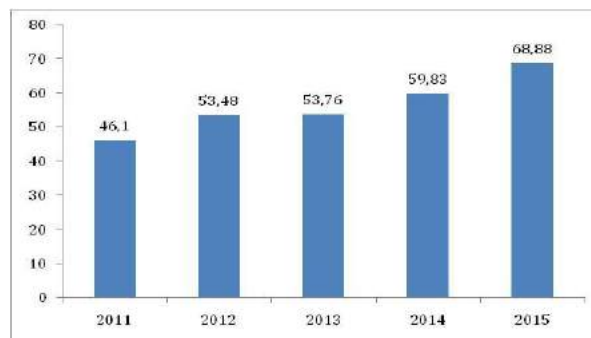
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs./Sederajat Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

Capaian indikator untuk angka partisipasi kasar di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2011-2015 mengalami peningkatan diukur dari jumlah seluruh murid sekolah pada jenjang tertentu tanpa memandang usia, maka tercapainya target peningkatan tersebut diduga disebabkan oleh semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada usia

yang tepat, dan semakin meningkatnya kualitas pendidikan yang menyebabkan menurunnya angka mengulang sehingga siswa dapat menyelesaikan sekolah tepat waktu. Meskipun target APK SMP/MTs belum tercapai, namun APK seluruh tingkatan pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya selama 5 tahun menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan.

3) Angka Partisipasi Kasar (APK)SLTA/MA/Sederajat

Indikator APK SLTA/MA/Sederajat di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2011-2015 mengalami peningkatan dari capaian 2011 sebesar 46,1 % menjadi 68,88 % pada tahun 2015.



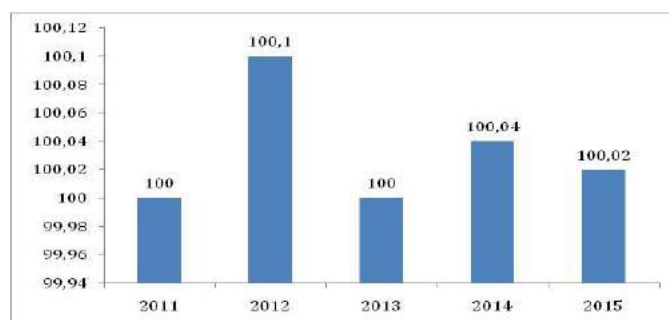
Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)

Gambar 2.25.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA/MA/Sederajat Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

4) Angka Partisipasi Murni (APM)SD/MI/Sederajat

APM adalah perbandingan antara jumlah anak usia 7-12; 13-15 dan 16-18 tahun yang bersekolah di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK dibagi seluruh jumlah anak usia 7-12; 13-15 dan 16-18 tahun untuk jenjang pendidikan tersebut. Perkembangan APM SD/MI stabil pada angka 100%, walaupun lebih artinya bahwa ada siswa usia sekolah yang berasal dari luar Kabupaten Tasikmalaya yang sekolah di Kabupaten Tasikmalaya.



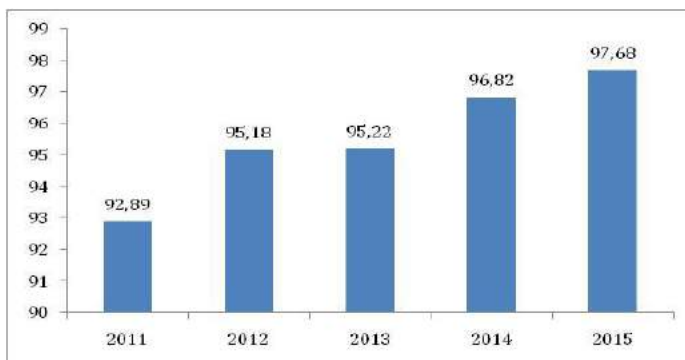
Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)

Gambar 2.26.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

5) Angka Partisipasi Murni (APM)SMP/MTs./Sederajat

Pencapaian APM SMP/MTs./sederajat mengalami peningkatan sebesar 4,79 % yaitu dari sebesar 92,89 % pada tahun 2011 menjadi sebesar 97,68 % pada tahun 2015 atau meningkat rata-rata sebesar 0,96 % per tahun.



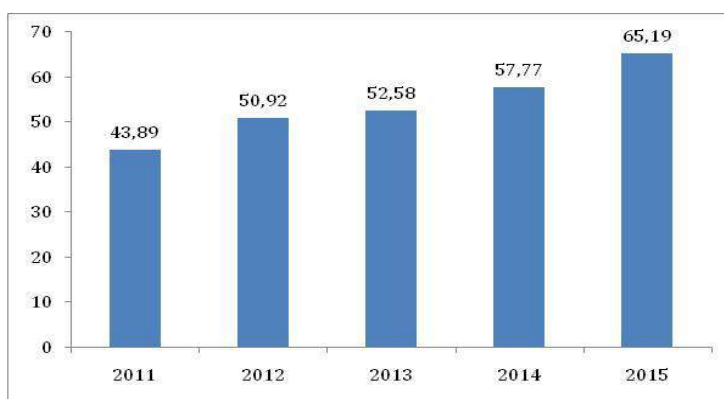
Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)

Gambar 2.27.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs./Sederajat Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

6) Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA/MA/Sederajat

APM SMA/MA/SMK sepanjang tahun 2011–2015 mengalami peningkatan dari 43,89% pada tahun 2011 menjadi sebesar 57,64% pada tahun 2015. APM seluruh tingkatan pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya selama 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan.



Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)

Gambar 2.28.

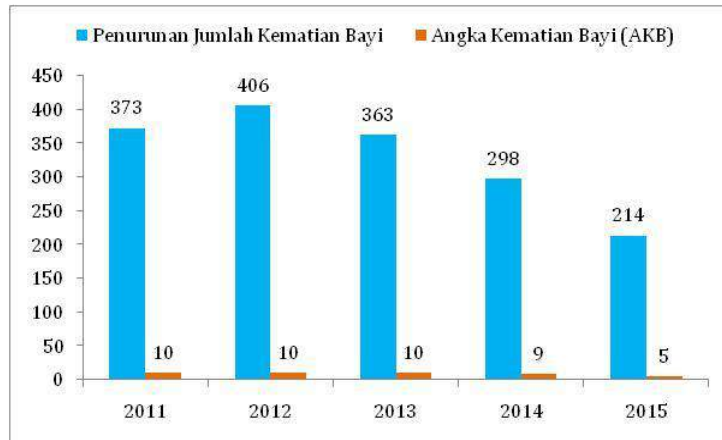
Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA/MA/Sederajat Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

b. Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan

1) Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (14 angka kematian bayi). AKB dihitung dengan

jumlah kematian bayi usia di bawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.



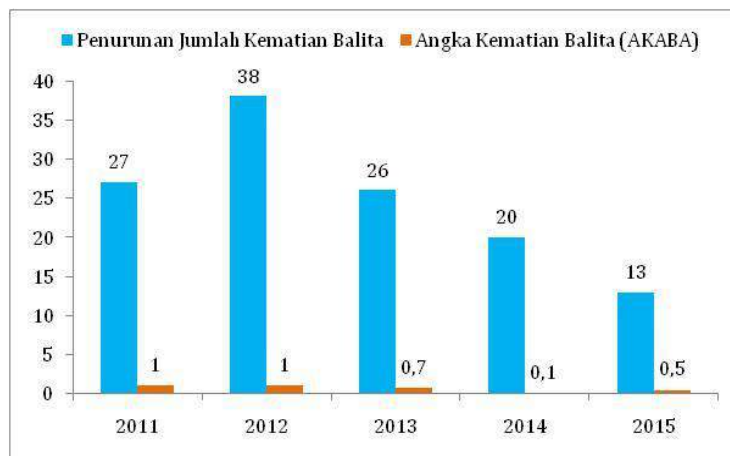
Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)

Gambar 2.29.

Penurunan Jumlah Kematian Bayi (Orang) dan Angka Kematian Bayi (per 1000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

2) Angka Kematian Balita

Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk.



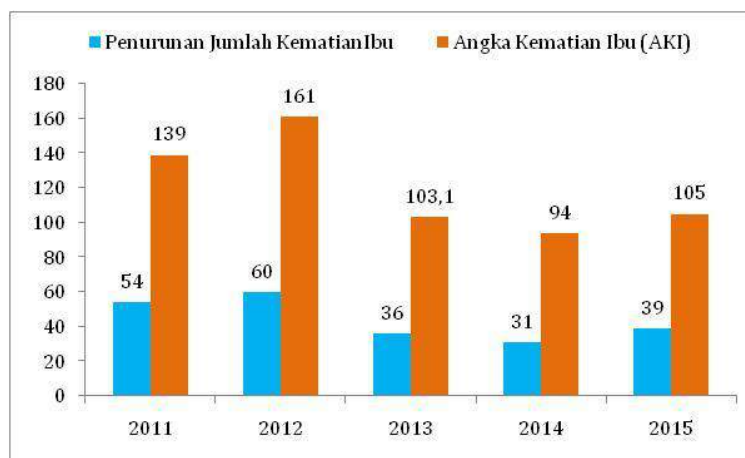
Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)

Gambar 2.30.

Penurunan Jumlah Kematian Balita (Orang) dan Angka Kematian Balita (per 1000 Balita) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

3) Angka Kematian Ibu

Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll. (Budi, Utomo. 1985).

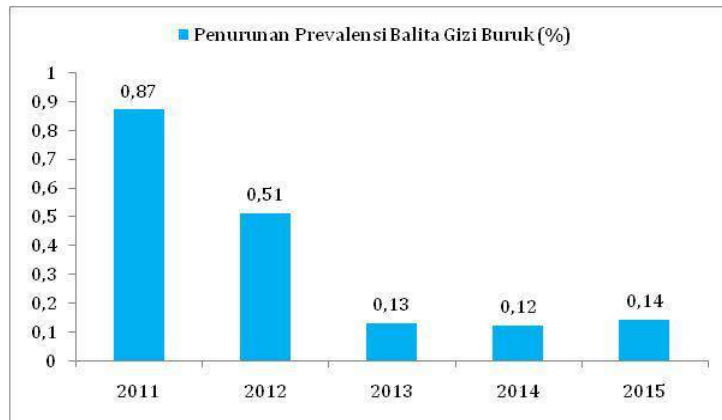


Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)

Gambar 2.31.
Penurunan Jumlah Kematian Ibu (Orang) dan
Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

4) Prevalensi Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk.



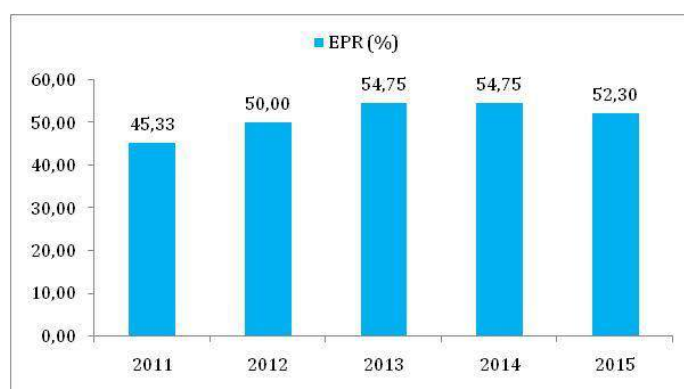
Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)

Gambar 2.32.

**Penurunan Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015**

c. Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja

Kesempatan Kerja (*demand for labour*) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Sementara itu, angkatan kerja (*labour force*) menurut Soemitro Djojohadikusumo didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Bisa juga disebut sumber daya manusia.



Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)

Gambar 2.33.

**Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap
Jumlah Penduduk Total (*Employment to Population Ratio-EPR*)
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015**

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga dapat dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut:

Tabel 2.8.
Hasil Kinerja Bidang Kebudayaan dan Olahraga
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
A	Bidang Kebudayaan						
1	Jumlah even seni dan budaya						
	Penyelenggaraan even seni dan budaya	Kegiatan	4	6	13	14	8
	Pengiriman misi seni dan budaya	Kegiatan	2	5	10	8	1
2	Jumlah sarana penyelenggaraan seni budaya						
	Sarana penyelenggaraan seni (panggung seni)	Buah	-	3	4	3	-
	Sarana pengembangan seni (alat seni)	Set	-	2	5	11	-
B	Bidang Olahraga						
1	Jumlah induk organisasi olahraga di kabupaten	Buah	31	31	35	37	29
2	Jumlah atlit yang dibina	Orang	241	241	251	255	227

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

a. Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan

1) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah

Pentingnya sarana dan prasarana untuk menunjang proses pendidikan, diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya pendidikan yang perlu dan sangat penting dikelola dengan baik serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manajemen pendidikan. Seperti gedung, tanah, perlengkapan administrasi sampai pada sarana yang digunakan langsung dalam proses belajar mengajar di kelas.

Kondisi sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.9.
Kondisi Sarana dan Prasarana Sekolah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
A.	Ketercapaian Wajar Dikdas 9 Tahun						
1	Meningkatnya sarana dan prasana pendidikan dasar						
	Jumlah SD/MI	Unit	1.297	1.297	1.295	1.289	1.292
	Jumlah SLTP/MTs	Unit	383	391	441	436	416
	Kondisi Kerusakan Ruang Kelas SD/MI						
	Ruang Kelas SD	%	29,96	12,87	13,86	15,2	31,98
	Ruang Kelas MI	%	32	57,38	62,46	62,46	62,46
	Kondisi Kerusakan Ruang Kelas SLTP/MTs						
	Ruang Kelas SMP	%	16	19	12,88	18,15	16,64
	Ruang Kelas MTs	%	23	14	66,67	66,67	35,9
	Pembangunan Ruang Kelas Baru						
	Pembangunan ruang kelas baru SD/MI per tahun	ruang	60	0	6	15	10
	Pembangunan ruang kelas baru SLTP/MTs	ruang	56	48	136	121	81
	Persentase Ruang Perpustakaan SD/MI	%	26,6	30,99	21,54	21,64	28,48
	Persentase Ruang Perpustakaan SMP/MTs	%	56,7	58,06	47,62	50,79	57,93
	Persentase Lab IPA SLTP/MTs	%	43,6	47,57	35,15	44,5	47,36
	Persentase Lab Komputer SLTP/MTs	%	33,9	33,76	39,44	39,44	39,44
2	Idealnya rasio siswa terhadap ruang kelas						
	<i>Jumlah Siswa</i>						
	<i>SD/MI</i>	<i>orang</i>	215.903	215.476	211.131	200.47	196.043
	<i>SLTP/MTs</i>	<i>orang</i>	87.18	92.986	96.431	100.236	100.321
	<i>Jumlah Ruang Kelas</i>						
	<i>SD/MI</i>	<i>Buah</i>	8.026	8.615	9.377	8.738	8.944
	<i>SLTP/MTs</i>	<i>Buah</i>	2.645	2.757	2.394	2.469	2.826
	<i>Ratio Siswa : Ruang</i>						
	<i>SD/MI</i>	%	26,9	25,01	22,52	22,94	21,92
	<i>SLTP/MTs</i>	%	32,96	33,73	40,28	40,6	35,5
3	Idealnya rasio rombongan belajar terhadap ruang kelas						
	<i>Jumlah Rombongan</i>						
	<i>SD/MI</i>	<i>Buah</i>	10.357	10.357	8.921	8.566	8.242
	<i>SLTP/MTs</i>	<i>Buah</i>	3.496	3.309	2.506	2.764	2.855
	<i>Ratio Rombel :</i>						
	<i>SD/MI</i>	%	1,29	1,2	1,65	0,98	0,92
	<i>SLTP/MTs</i>	%	1,32	1,2	2,07	1,12	1,01
B.	Rintisan Wajar 12						
1	Meningkatnya daya tampung SMA, SMK dan MA						
	Jumlah SMA	Buah	41	41	45	48	52
	Jumlah SMK	Buah	77	94	95	97	108
	Jumlah MA	Buah	64	64	73	73	73
2	Kondisi Kerusakan Ruang Kelas SMK	%	9,06	5,43	14,26	9,45	6,48
3	Kondisi Kerusakan Ruang Kelas SMA	%	7,93	6,1	29,56	25	10,1
4	Pembangunan ruang kelas baru SMA per-tahun	ruang	52	4	30	25	25
5	Pembangunan ruang kelas baru SMK per-tahun	ruang	108	43	30	55	55
6	Pembangunan ruang kelas baru MA per-tahun	ruang	0	0	14	-	14

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
7	Jumlah perguruan	Buah	7	7	7	7	8
8	Meningkatnya sekolah yang berbasis TIK dalam proses pembelajaran pendidikan						
	SMA/MA/SMK	Sekolah	30	40	89	102	102
	SMA/MA/SMK	%	16,5	20	42	58	43,78
C. Meningkatnya Lembaga Pendidikan Bagi Anak Usia Dini dan Pendidikan Luar Sekolah							
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia						
	Jumlah TK	Buah	271	302	271	311	311
	Jumlah PAUD	Buah	562	671	1.039	1.419	1.419
	Jumlah TPA	Buah	92	2	5	4	4
2	Meningkatnya kualitas	Buah	92	105	104	104	109
3	Meningkatnya Jumlah	Buah	113	95	114	114	91

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)

2) Ketersediaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah

Sebagai bentuk penjaminan mutu, guru dituntut memiliki kualifikasi minimum, kompetensi, dan tersertifikasi yang menjamin proses pembelajaran berkualitas. Berdasarkan Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 8 berbunyi "Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional." Pencapaian standar tenaga pendidik dan kependidikan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.10.
Kondisi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
A. Ketercapaian Wajar Dikdas 9 Tahun							
Ideallyarasio guru terhadap rombongan belajar							
1	Jumlah Guru						
	SD/MI	Orang	10.93	11.864	12.498	9.459	12.163
	SLTP/MTs	Orang	7.902	7.902	7.911	7.066	8.066
	Ratio Guru : Rombel						
	SD/MI	%	1,06	1,15	1,4	1,1	1,48
	SLTP/MTs	%	2,3	2,39	3,16	2,56	2,82
B. Terlaksananya Rintisan Wajar 12 Tahun							
Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia SSN dan SBI SMA/SMK							
2	Guru S1	Orang	2.196	2.233	1.705	2.81	3.676
	Guru S2	Orang	68	105	208	385	317
	- SMA/MA/SMK	%	16,5	20	42	58	43,78
C. Meningkatnya Mutu Pendidikan pada semua Jenis dan Jenjang Pendidikan baik Pendidikan							
Terpenuhinya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan							
1	Jumlah guru SD	Orang	9.63	11.864	10.533	7.43	10.134
	Jumlah guru SMP	Orang	4.445	6.673	4.194	2.406	5.008
	Jumlah tenaga	Orang	222	230	169	169	552
	Jumlah tenaga	Orang	783	845	1.005	1.005	1.005
Meningkatnya tingkat pendidikan guru							
2	Jumlah guru berkualifikasi S1	Orang	15.827	15.926	13.439	21.04	20.647
	Jumlah guru berkualifikasi S2	Orang	386	386	784	1.467	1.311
Meningkatnya jumlah guru yang tersertifikasi							
3	Guru TK	%	13,3	15,2	23,69	42,26	42,26
	Guru SD	%	48,6	48	56,7	94,29	94,29
	Guru SMP	%	32,4	46,3	44,13	75,02	75,02
	Guru SMA	%	44,2	76,4	51,74	71,64	71,64
	Guru SMK	%	5,6	16,9	12,4	23,11	23,11

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)

b. Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan

1) Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Sampai tahun 2015 pemerintah Kabupaten Tasikmalaya baru memiliki satu rumah sakit yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medical Centre (SMC) berupa rumah sakit tipe B.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.11.
Jumlah dan Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1	Puskesmas Non	25	25	25	25
2	Puskesmas Perawatan	15	15	15	15
3	Puskesmas Pembantu	16	19	27	27
4	Puskesmas Keliling	151	151	154	153
5	Jumlah Penduduk	1,692,432	1,716,178	1,720,124	1,728,618
6	Rasio per Satuan Penduduk				
	<i>Puskesmas Non</i>	1: 67,697	1: 68,647	1: 68,805	1: 69,145
	<i>Puskesmas Perawatan</i>	1: 112,829	1: 114,412	1: 114,675	1: 115,241
	<i>Puskesmas Pembantu</i>	1: 105,777	1: 90,325	1: 63,708	1: 64,023
	<i>Puskesmas Keliling</i>	1: 11,208	1: 11,365	1: 11,170	1: 11,298

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)

2) Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.12.
Tenaga Kesehatan di RSUD Singaparna Medical Center
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Tenaga Dokter Spesialis	Orang	2	2	5	15	14
2	Tenaga Dokter Umum	Orang	9	10	10	12	11
3	Tenaga Dokter Gigi	Orang	1	1	1	1	1
4	Tenaga Perawat RSUD	Orang	31	31	31	127	135
5	Tenaga Bidan RSUD	Orang	17	20	20	53	54
6	Tenaga Kefarmasian	Orang	5	5	6	21	11
7	Tenaga Kesehatan	Orang	3	8	4	3	5
8	Tenaga Sanitarian RSUD	Orang	1	1	2	2	2
9	Tenaga Gizi RSUD	Orang	2	2	2	15	3
10	Tenaga Non Kesehatan	Orang	8	17	5	15	188

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)

c. Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Gambaran umum pembangunan bidang pekerjaan umum diantaranya dapat diketahui dari kondisi ajrangan jalan, jembatan, dan irigasi. Kinerja jaringan jalan berdasarkan aspek kemantapan merupakan kinerja gabungan dari aspek kondisi dan aspek pemanfaatan/kapasitas.

Pengertian jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap.

Tabel 2.13.
Hasil Kinerja Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kondisi jalan kabupaten	Km	1.303,323	1.303,323	1.303,323	1.303,323	1.303,323
	<i>Kondisi Baik</i>	Km	383,127	435,499	519,45	658.071	669,110
	<i>Kondisi sedang</i>	Km	260,756	283,513	288,5	293.145	356,906
	<i>Kondisi rusak ringan</i>	Km	266,477	264,701	259,71	195.498	152,486
	<i>Kondisi rusak berat</i>	Km	392,963	319,66	235,66	156.609	124,821
2	Panjang peningkatan jalan	Km	30	104	134	150.533	93.461
3	Kondisi jembatan	Buah	425	426	426	426	435

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
	kabupaten						
	<i>Kondisi Baik</i>	Buah	339	342	345	357	367
	<i>Kondisi sedang</i>	Buah	10	10	10	21	21
	<i>Kondisi rusak ringan</i>	Buah	20	20	19	12	12
	<i>Kondisi rusak berat</i>	Buah	56	54	52	36	35
4	Jumlah Daerah Irigasi	Buah	276	276	1479	1.494	1.494
5	<i>Jumlah DI yang dikelola oleh Kabupaten (layanan luas areal s/d 1.000 ha)</i>	Buah	264	264	1467	1486	1486
6	Jumlah Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi	Buah	30	30	99	216	195

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)

Gambaran umum pembangunan bidang pentaan ruang diantaranya dapat diketahui dari ketersediaan ruang terbuka hijau dan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pengertian ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Sementara itu izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Tabel 2.14.
Hasil Kinerja Urusan Penataan Ruang
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (Taman dan Pemakaman Umum)	Lokasi	4	3	3	1	8
2	Jumlah penerbitan permohonan perijinan (IMB)	Pemohon	690	853	581	530	2999

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)

d. Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Gambaran umum pembangunan bidang perumahan diantaranya dapat diketahui dari kondisi rumah layak huni, kawasan kumuh, dan akses terhadap air bersih.

Tabel 2.15.
Hasil Kinerja Urusan Perumahan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014
1	Prosentase jumlah rumah layak huni terhadap total jumlah rumah	%	62	23	71,2	82
2	Prosentase jumlah rumah tidak layak huni terhadap total jumlah rumah	%	28	25	38,8	35
3	Berkurangnya jumlah titik kawasan kumuh	Titik Kawasan	3	-	1	3
4	Prosentase Jumlah rumah yang menggunakan air bersih	%	40	37	44,8	50,5

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)

e. Urusan Pemerintah Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri menjelaskan bahwa urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri meliputi sub bidang sebagai berikut:

- 1) *Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;*
- 2) *Kewaspadaan Nasional;*
- 3) *Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan;*
- 4) *Politik Dalam Negeri; dan*
- 5) *Ketahanan Ekonomi.*

Tabel 2.16.
Hasil Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan	Orang	1.5	1.6	300	100	1209
2	Jumlah masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi kerukunan umat beragama	Orang	750	800		50	50
3	Jumlah peserta Bintek Ormas/LSM	Orang	250	250		0	300

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)

f. Urusan Pemerintah Bidang Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Tabel 2.17.
Hasil Kinerja Urusan Sosial
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Anak Terlantar	Orang	6.21	3.022	2.702	1.58	1.58
2	Jumlah Anak Terlantar yang ditangani Dalam Panti	Orang	2.347	3.022	2.102	2.102	2.102
3	Jumlah Panti Sosial Asuhan Anak yang mendapat bantuan	Buah	87	90	90	86	91
4	Jumlah Panti Sosial Penyandang Cacat yang mendapat bantuan	Buah	2	2	2	2	2
5	Jumlah Panti Sosial Jompo / Lansia Terlantar yang mendapat bantuan	Buah	1	1	1	1	1
6	Jumlah Keluarga Fakir Miskin	KK	97.008	97.008	17.495	17.089	17.089
7	Jumlah Keluarga Fakir Miskin yang ditangani	KK	11.564	17.495	17.089	680	21.235
8	Jumlah Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	Buah	91	101	93	93	93
9	Jumlah Lanjut Usia Terlantar	Orang	14.143	14.143	148	-	-

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
10	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang ditangani Luar Panti	Orang	98	88	88	88	88
11	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang ditangani Dalam Panti	Orang	-	60	60	55	-
12	Jumlah Penyandang Cacat	Orang	9.917	5.562	5.562	-	-
13	Jumlah Penyandang Cacat yang ditangani	Orang	116	180	195	266	203
14	Jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA	Orang	2.3	2300	158	-	-
15	Jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA yang ditangani	Orang	100	10	-	66	-
16	Jumlah Keluarga berumah Tidak Layak Huni	Orang	18.372	601	601	-	-
17	Jumlah Keluarga berumah Tidak Layak Huni yang ditangani	Orang	-	601	700	-	75
18	Orang dengan HIV/AIDS	Orang	54	20	30	50	20

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)

g. Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Capaian pembangunan bidang ketenagakerjaan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.18.
Hasil Kinerja Urusan Ketenagakerjaan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Tenaga Kerja yang terlatih di Balai Latihan Kerja per tahun	Orang	240	780	576	576	160
2	Jumlah Tenaga Kerja bersertifikasi di Kabupaten Tasikmalaya	Orang	240	780	400	780	160
3	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	74	76,06	75,72	75,73	72,54
4	Meningkatnya jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	Orang	1.23	1.014	1.36	1.806	2,58

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
5	Jumlah kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang tertangani	Buah	-	10	13	10	10
6	Meningkatnya Jumlah Kepesertaan Jamsostek	Orang	2.34	2,21	2.254	2.254	2.254
7	Meningkatnya Upah Kerja Sesuai dengan Ketentuan	%	87	96,55	95,4	95,4	89,6

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)

h. Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Tabel 2.19.
Hasil Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	50,9	50,42	50,43	50,45	49,9
2	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan	%	4,1	4,2	4,3	4,3	
3	Jumlah kasus yang dapat ditangani oleh P2TP2	%	67,5	73	78	83	88
4	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (Rumah Tangga dan Publik)*	Kasus	28	11	12	18	

Sumber : BAPPEDA Kab. Tasikmalaya (2016) *BPS Kab. Tasikmalaya (2016)

i. Urusan Pemerintah Bidang Pangan

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Tabel 2.20.
Hasil Kinerja Urusan Ketahanan Pangan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita						
	Ketersediaan Energi		-	-	-	364,73	368,32
	Energi Perkapita	%	-	-	-	2957	3457
	Protein Perkapita	%	-	-	-	133	138
2	Penguatan cadangan pangan	Ton	-	-	-	22	48,3

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)

j. Urusan Perencanaan Pembangunan

Gambaran umum pembangunan bidang perencanaan pembangunan diantaranya dapat diketahui dari ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, dan penjabaran RPJMD ke dalam RKPD.

Tabel 2.21.
Hasil Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Tersedianya dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yg telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yg telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yg telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	%	100	100	100	100	100

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)

k. Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup

Gambaran umum pembangunan bidang lingkungan hidup diantaranya dapat diketahui dari cakupan pelayanan persampahan dan pelayanan air minum.

Tabel 2.22.
Hasil Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Prosentase produk sampah yang tertangani (wilayah perdesaan)	%	29	30	34	36	41
2	Prosentase luas cakupan pelayanan persampahan terhadap luas wilayah perkotaan	%	40	42	52,4	53,5	52,83
3	Prosentase cakupan pelayanan air minum terhadap jumlah penduduk perkotaan	%	42	43	46,1	50,5	55,6

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016).

l. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Gambaran umum pembangunan bidang kependudukan dan catatan sipil diantaranya dapat diketahui dari kepemilikan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akte Kelahiran.

Tabel 2.23.
Hasil Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Meningkatnya Kepemilikan KK	%	-	77,52	87,99	90	92
2	Meningkatnya Kepemilikan KTP	%	66,11	91,66	95,35	97	98,24
3	Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk	%	32,82	36	40,39	42,2	43,06
4	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	%	25	88,34	90,08	93	98,24
5	Jumlah Kecamatan SIAK ON LINE dalam wilayah administrasi Kabupaten	Buah	-	39	39	39	39

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
6	Data penduduk yang terkendali oleh sistem administrasi kependudukan dalam wilayah administrasi antar wilayah di Kab.Tasikmalaya	Orang	1.716.000	1.852.499	1.637.513	1.641.787	1.674.462

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)

m. Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seiring terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Gambaran umum pembangunan bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat diketahui diantaranya dari indikator PKK dan Posyandu.

Tabel 2.24.
Hasil Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah perempuan yang mengikuti pembinaan dan pelatihan PKK	Orang	20	20	20	20	20
2	Terbinanya posyandu pratama	Posyandu	256	756	260	260	118
3	Terbinanya posyandu Madya	Posyandu	13	1106	1365	1365	971
4	Terbinanya posyandu purnama	Posyandu	847	331	549	549	928

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)

n. Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Gambaran umum pembangunan bidang urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dapat diketahui dari indikator peserta KB dan pembinaan keluarga. Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu caranya adalah melalui program Keluarga Berencana (KB). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Tabel 2.25.
Hasil Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Meningkatnya Jumlah Peserta KB baru	Akseptor	100.011	77,339	71.185	74,428	46.967
2	Terbinanya Jumlah Peserta KB Aktif	Akseptor	275.259	275.578	253.954	241.192	232.764
3	Meningkatnya Prosentase Peserta KB Mandiri	%	30,41	28,26	29,3	36,72	38,2
4	Terbinanya Keluarga Prasejahtera dan KS1	KK	295,5	317.093	286.061	294.782	287.683

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)

o. Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan

Gambaran umum pembangunan bidang perhubungan diantaranya dapat diketahui dari ketersediaan sarana dan prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) sebagai berikut.

Tabel 2.26.
Hasil Kinerja Urusan Perhubungan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014
1	Tersedianya sarana dan prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)					
	<i>Penerangan Jalan Umum</i>	buah	2063	2195	2330	2539
	<i>Rambu Rambu Lalu Lintas</i>	buah	300	656	889	982
	<i>Warning Light dan Traffic Light</i>	buah	4	14	19	25
	<i>Marka Jalan</i>	meter	-	532	632	632
	<i>Traffic Cones</i>	buah	100	200	-	52
	<i>Guard Rail</i>	meter	100	120	220	428
	<i>Patok Pengaman</i>	buah	-	-	-	-
	<i>Reapeter</i>	buah	-	1	2	-

p. Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika

Gambaran umum pembangunan daerah dapat diketahui diantaranya dari jumlah pemakai jasa telekomunikasi menurut jenis dan sumber.

Tabel 2.27.
Jumlah Pemakai Jasa Telekomunikasi Menurut Jenis Sumber
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Pemakai Jasa Telekomunikasi Menurut Jenis Sumber					
	Langganan	Sst	14,700	16,292	7,450	46,982
	Lokal/SLJJ	Pulsa	629,778,704	470,567,885	370,097,184	296,566,288

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya (2016)

q. Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Gambaran umum pembangunan bidang urusan Koperasi dan UKM dapat diketahui dari jumlah koperasi aktif dan jumlah UKM. Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.

Tabel 2.28.
Hasil Kinerja Urusan Koperasi dan UKM
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Meningkatnya jumlah Koperasi Aktif	Buah	335	402	369	377	393
2	Meningkatnya Jumlah UKM	Unit	29.138	31.207	32.125	33.731	33.731

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)

r. Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal

Penanaman modal (investasi) adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Beberapa indikator yang dapat memberikan gambaran umum pembangunan bidang urusan penanaman modal dapat diketahui dari tabel berikut:

Tabel 2.29.
Hasil Kinerja Urusan Penanaman Modal
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Nilai Investasi Industri	Rp. 000	96.121.760	100.927.848	120.926.847	137.613.833	152.909.560
2	Jumlah promosi investasi (pameran investasi) per tahun	Keg	0	6	5	4	3
3	LajuPertumbuhan Investasi	%	11,47	15,63	14,27	7,62	11,45

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)

s. Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Gambaran umum pembangunan bidang urusan kepemudaan dan olahraga dapat diketahui dari indikator sebagai berikut.

Tabel 2.30.
Hasil Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Karang Taruna	Buah	351	351	351	351	351
2	Jumlah organisasi kepemudaan	Buah	45	45	45	45	45
3	Jumlah induk organisasi olahraga di kabupaten	Buah	31	31	35	37	29
4	Jumlah atlit yang dibina	Orang	241	241	251	255	227
5	Jumlah kompetisi yang digelar	Buah	12	12	13	14	-

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)

t. Urusan Pemerintah Bidang Statistik

Gambaran umum pembangunan bidang statistik dapat diketahui diantaranya dari terbitnya buku kabupaten dalam angka dan buku PDRB. Buku Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka merupakan informasi data yang mendeskripsikan tentang perkembangan profil pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya dari tahun ke tahun dengan memotret karakteristik geografis, pemerintahan, kependudukan, sosial, pertanian, industri, listrik dan air minum, perhubungan, keuangan, harga-harga dan PDRB. Data yang tersusun merefleksikan informasi dalam tatanan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya yang melibatkan unsur terkait dalam proses menumbuhkan kembangkan potensi sebagai daerah otonom. Sementara itu Informasi yang disajikan dalam publikasi PDRB adalah tentang kinerja dan struktur ekonomi berdasarkan PDRB Menurut Lapangan Usaha.

Tabel 2.31.
Hasil Kinerja Urusan Statistik
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Buku Kabupaten Tasikmalaya dalam Angka	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku PDRB Kabupaten Tasikmalaya	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016).

u. Urusan Pemerintah Bidang Otonomi Daerah

Gambaran umum pembangunan bidang urusan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dapat diketahui dari indikator sebagai berikut.

Tabel 2.32.
Hasil Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	%	0,0075	0,0075	0,0072	0,0078	0,0082
2	Jumlah satuan Linmas yang aktif dan terlatih	Orang	140	10.219	429	0	78
3	Jumlah pos induk/pos kamling di desa	Buah	2.832	2.91	2.91	2.91	2.91
4	Menurunnya Pelanggaran Perda / angka kriminalitas						
	<i>Pencurian Berat</i>	<i>Kasus</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>61</i>	<i>11</i>	<i>32</i>
	<i>Pencurian Biasa</i>	<i>Kasus</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>3</i>	<i>11</i>	<i>22</i>
	<i>Pencurian Kekerasan</i>	<i>Kasus</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>9</i>	<i>3</i>	<i>1</i>
	<i>Pencurian kendaraan bermotor</i>	<i>Kasus</i>	<i>41</i>	<i>41</i>	<i>53</i>	<i>30</i>	<i>35</i>
	<i>Penggelapan</i>	<i>Kasus</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>7</i>	<i>14</i>
	<i>Pembunuhan</i>	<i>Kasus</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>1</i>
	<i>Penipuan</i>	<i>Kasus</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>34</i>	<i>18</i>	<i>40</i>
	<i>Uang Palsu</i>	<i>Kasus</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
	<i>Narkotika</i>	<i>Kasus</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>0</i>	<i>27</i>	<i>13</i>
	<i>WTS</i>	<i>Kasus</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Perkosaan</i>	<i>Kasus</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
5	Meningkatnya Operasi Penegakan Perda (Perda Pajak dan Retribusi, Perda Miras, Perda Perijinan, Perda PSK/WTS)	Keg	14	14	24	24	22
6	Koordinasi Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Daerah	Kali	4	4	6	0	6
7	Menurunnya tindakan anarkis dan konflik	Kali	35	35	0	0	0
8	Patroli Wilayah Pengamanan dan Pengawasan	Keg	35	35	120	120	120
9	Tingkat pelayanan terhadap bahaya kebakaran	%	10	11	11	11,6	52,78
10	Tersedianya gedung/Kantor desa yang memadai	Baik/kurang/baik/rusak	126	136 baik	224	351 baik	351 baik
11	Terwujudnya sistem informasi manajemen pemerintahan yang modern dan meningkatnya transparansi pelaksanaan pemerintahan						
	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional						
	a. Media massasepertimajalah, radio dantelevisi	Buah	13000	12	11.25	15.1	13.141
	b. media luar ruang						
	<i>Media bulletin</i>	<i>Exp.</i>	<i>-</i>	<i>1.25</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4.992</i>
	<i>Sticker</i>	<i>Buah</i>	<i>-</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>58.394</i>	<i>3</i>
	<i>Baligho</i>	<i>Buah</i>	<i>-</i>	<i>50</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
	<i>Spanduk</i>	<i>Buah</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>48</i>
	<i>Pamplet Arkrilik</i>	<i>Buah</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>175</i>	<i>-</i>

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
	<i>Buku Saku</i>	<i>Buah</i>	-	5	-	-	-
	<i>Banner</i>	<i>Buah</i>	-	125	-	-	-
	<i>Leaflet</i>	<i>Buah</i>	-	-	1	-	-

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016).

v. Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan

Gambaran umum pembangunan bidang urusan kebudayaan dapat diketahui dari indikator seni dan cagar budaya.

Tabel 2.33.
Hasil Kinerja Urusan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah even seni dan budaya							
1	Penyelenggaraan even seni dan budaya	Kegiatan	4	6	13	14	8
	Pengiriman misi seni dan budaya	Kegiatan	2	5	10	8	1
Jumlah sarana penyelenggaraan seni budaya							
2	Sarana penyelenggaraan seni (panggung seni)	Buah	-	3	4	3	-
	Sarana pengembangan seni (alat seni)	Set	-	2	5	11	-
Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan							
3	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ada	Buah	41	41	41	41	41
	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dipelihara	Buah	-	10	13	16	16

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)

w. Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan menjelaskan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi. Gambaran umum pembangunan bidang perpustakaan dapat diketahui diantaranya dari indikator sebagai berikut.

Tabel 2.34.
Hasil Kinerja Urusan Perpustakaan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Meningkatnya kelembagaan teknis perpustakaan desa/kelurahan	Perpust.	20	7	7	18	189
2	Meningkatnya SDM Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan	Orang	20	7	7	18	189
3	Meningkatnya koleksi bahan perpustakaan Desa/Kelurahan	Eksemplar	20	7	7	-	1.283
4	Meningkatnya koleksi bahan perpustakaan umum	Eksemplar	-	1.25	1.25	936	3.043

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)

x. Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan menjelaskan bahwa penyelenggaraan kearsipan merupakan keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Diantara berbagai kategori, arsip dapat dikategorikan menjadi arsip aktif dan arsip inaktif. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus sedangkan arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

Tabel 2.35.
Hasil Kinerja Urusan Kearsipan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Tingkat penerapan teknik informasi dalam administrasi kearsipan	SKPD	1	3	2	1	6
2	Tingkat pelayanan informasi kearsipan daerah bagi masyarakat	Orang	21	30	25	10	111
3	Penyelamatan arsip in aktif	SKPD	1	3	2	1	54

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

a. Urusan Kelautan dan Perikanan

Gambaran umum pembangunan bidang kelautan dan perikanan diketahui diantaranya dari produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya, dan pemanfaatan potensi laut.

Tabel 2.36.
Hasil Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
Produksi Perikanan Budidaya							
1	Ikan Hasil Budidaya	Ton	37.155,57	41.986,37	45.698,85	51.717,74	44.536,00
2	Benih	Juta Ekor	2.035,75	3.105	4.445	4.729,53	3.866,57
Produksi Perikanan Tangkap							
1	Perairan Umum	Ton	680,3	668,55	703,39	705,44	460,00
2	Laut	Ton	892,53	847,84	851,36	861,17	1.183,90
3	Perikanan tangkap	Ton	1.572,83	1.516,37	1.554,75	1.566,61	1.643,9
Pemanfaatan Potensi Laut							
1	Produksi	Ton	892,53	847,84	851,36	861,17	1.183,47
2	Pemanfaatan	%	13,44	12,77	12,82	12,97	17,82

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)

b. Urusan Pariwisata

Gambaran umum pembangunan bidang pariwisata dapat diketahui diantaranya dari jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara.

Tabel 2.37.
Hasil Kinerja Urusan Pariwisata
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah kunjungan wisatawan per tahun	Orang	675.587	716.709	698.515	881.21	927.974
2	Wisatawan Nusantara	Orang	667.481	709.867	693.354	877.1	924.575
3	Wisatawan Mancanegara	Orang	8.106	6.842	5.161	4.11	3.399

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016).

c. Urusan Pertanian

Gambaran umum pembangunan bidang pertanian dapat diketahui diantaranya dari produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Tabel 2.38.
Hasil Kinerja Urusan Pertanian
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Meningkatnya produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura						
	Padi						
	- Padi sawah	Kw/Ha	64,53	66,62	66,78	66,94	67,95
	- Padi gogo	Kw/Ha	38,22	36,99	40,72	48,41	42,07
	Palawija						
	- Jagung	Kw/Ha	60,77	62,59	63,66	64,5	67,43
	- Kedelai	Kw/Ha	12,85	14,69	13,69	14,92	18,09
	- Kacang tanah	Kw/Ha	16,1	16,16	16,87	17,86	17,9
	- Ubi kayu	Kw/Ha	199,69	201,73	202,72	239,99	255,5
	Sayuran						
	- Cabe merah	Kw/Ha	139,87	184,86	172,54	130,49	136,85
	- Ketimun	Kw/Ha	122,3	121,08	98,64	84,78	99,72
	- Tomat	Kw/Ha	107,64	116,25	94,21	97,75	125,84
	Buah-buahan						
	- Manggis	Kw/Ha	65,56	108,29	127,51	113,71	110,88
	- Salak	Kw/Ha	108,46	121,88	128,43	127,41	122,52
	- Durian	Kw/Ha	87,24	88,08	98,33	98,55	96,3
	- Pisang	Kw/Ha	358,37	271,41	289,38	284,34	295,88

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)

d. Urusan Kehutanan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Tabel 2.39.
Hasil Kinerja Urusan Kehutanan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Tersusunnya Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTn-RHL)	Dokumen	1	1	1	1	2
2	Berkurangnya lahan kritis	Ha	8.772	6.135,50	4.775,00	4.676,00	1.359
	Penanganan Lahan Kritis	Ha	2.202	2.262,50	1.360,50	1.570,00	2.24
	Rehabilitasi Sumber Mata Air	Ha	0	88	100	0	30
	Bertambahnya Potensi Komoditi Kehutanan :						
	- Hutan Rakyat	Ha	40.931	42.019	43.027,46	41.594,18	45.079,79
	- Jamur Kayu	Log	265,72	414,2	464,75	500,55	599,6

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
	- <i>LebahMadu</i>	<i>Stup</i>	751	1.113	1.751,00	1.799	1.654
	- <i>Bambu</i>	<i>Ha</i>	5.302,00	3.878,67	3.834,45	3.631,20	3.652,02
3	Terlaksananya kegiatan penyuluhan mengenai dampak kerusakan hutan	Orang	44	60	85	85	85

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)

e. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Gambaran umum pembangunan bidang energi dan sumberdaya mineral dapat dideskripsikan sebagai berikut.

Tabel 2.40.
Hasil Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Usaha Penambangan yang dibina	Buah	94	95	44	34	44
2	Prosentase Jumlah Usaha Penambangan yang di bina	%	-	95	73,33	36,84	129,41
3	Tersedianya database potensi mineral dan batu bara	Kec.	10	5	-	-	
4	Jumlah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang terbit	Buah	24	84	61	22	-

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)

f. Urusan Perdagangan

Peranan Perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, tetapi dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Tabel 2.41.
Hasil Kinerja Urusan Perdagangan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Volume dan Nilai ekspor Kab. Tasikmalaya	US \$	5.736.147,75	6.351.510	4.729.987.28	6,037.911.88	9.672.501,69
2	Laju Pertumbuhan ekspor Kab. Tasikmalaya	%	58,55	10,7	10,47	5.7	5.7

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)

g. Urusan Perindustrian

Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri, sedangkan industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Tabel 2.42.
Hasil Kinerja Urusan Perindustrian
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	7,35	7,65	7,76*	7,76*	7,76*
2	Pertumbuhan Industri	%	5	5,6	8,54	6.4	7.5

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)

h. Urusan Ketransmigrasian

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Transmigrasi umum adalah jenis transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha, sedangkan transmigrasi swakarsa mandiri adalah TSM adalah transmigrasi yang dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan secara perorangan atau kelompok, baik bekerjasama maupun tidak bekerjasama dengan Badan Usaha atas arahan, layanan dan bantuan Pemerintah.

Tabel 2.43.
Hasil Kinerja Urusan Ketransmigrasian
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Transmigrasi Umum	KK	-	35	10	1	-
2	Transmigrasi Swakarsa Mandiri	KK	-	3	3	3	-
3	Jumlah Transmigran yang Mengikuti Program Transmigran	KK	-	89	55	10	9
4	Jumlah Naskah MoU Pelaksanaan Transmigran	Buah	-	3	1	-	2
5	Jumlah Warga di 2 UPT yang Terlatih	Orang	-	-	40	30	60

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan efek ganda bagi peningkatan daya saing daerah. Pada bagian ini akan difokuskan pada analisa sektor ekonomi basis Kabupaten Tasikmalaya. Dalam kurun 2011-2013 sektor pertanian masih menjadi sektor basis dengan nilai rata-rata 3.63, diikuti sektor jasa-jasa dan perdagangan. Kriteria ini menunjukkan bahwa selama tahun 2011-2013 tidak terjadi pergeseran basis ekonomi sektoral. Sifat dari sumber daya ekonomi pertanian yang dapat diperbaharui dan akses pasar yang bisa diperluas, menunjukkan bahwan sektor pertanian dapat dijadikan sektor unggulan prioritas pertama. Nilai LQ untuk masing-masing subsektor terbagi kedalam dua kategori yaitu subsektor basis dan non basis, dan diurutkan dari nilai rata-rata terbesar sampai terkecil. Nilai LQ menunjukkan secara subsektoral semua subsektor pertanian termasuk kedalam subsektor basis dengan nilai LQ termasuk 6 besar.

Tabel 2.44.
Location Quotient Sub Sektoral PDRB
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2013

No	Lapangan Usaha	Location Quotient		Rata-rata
		2011	2013	
Subsektor Basis				
1	Kehutanan	31.72	31.77	31.74
2	Tanaman Perkebunan	9.24	8.89	9.06
3	Pemerintahan Umum	4.32	4.70	4.51
4	Perikanan	3.77	3.63	3.70
5	Tanaman Bahan Makanan	3.12	3.21	3.17
6	Peternakan dan Hasilnya	2.06	2.03	2.04
7	Lembaga Keuangan NonBank	1.46	1.59	1.52
8	Penggalian	1.58	1.45	1.52
9	Pengangkutan	1.29	1.08	1.19
10	Sewa Bangunan	1.29	1.25	1.27
11	Perdagangan Besar dan Eceran	1.05	1.06	1.06
Subsektor Non Basis				
12	Bank	0.92	0.91	0.91
13	Jasa Perusahaan	0.86	0.87	0.87
14	Restoran	0.85	0.82	0.83
15	Komunikasi	0.51	0.60	0.55
16	Listrik	0.55	0.54	0.55
17	Swasta	0.51	0.54	0.52
18	Air Bersih	0.26	0.26	0.26
19	Pertambangan tanpa Migas	0.12	0.12	0.12
20	Industri Tanpa Migas	0.18	0.19	0.18
21	Hotel	0.00	0.01	0.01

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, berbagai tahun (diolah)

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Kondisi infrastruktur (jalan) digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.45.
Panjang Jalan Menurut Kelas Jalan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2013

Kelas Jalan	2010	2011	2012	2013	2014
I. Jalan Negara	28.15	28.15	28.15	28.15	28.15
Kelas I	-	-	-	-	-
Kelas II	28.15	28.15	28.15	28.15	28.15
Kelas III	-	-	-	-	-
Kelas IIIA	-	-	-	-	-
Kelas IIIB	-	-	-	-	-
Kelas IIIC	-	-	-	-	-
Kelas tidak	-	-	-	-	-
II. Jalan Propinsi	160.15	161.647	161.647	161.647	161.647
Kelas I	-	-	-	-	-
Kelas II	-	-	-	-	-
Kelas III	-	-	-	-	-
Kelas IIIA	160.15	161.647	161.647	161.647	161.647

Kelas Jalan	2010	2011	2012	2013	2014
Kelas IIIB	-	-	-	-	-
Kelas IIIC	-	-	-	-	-
Kelas tidak	-	-	-	-	-
III. Jalan	1.304.730	1.303.323	1.303.323	1.303.323	1.303.323
Kelas I	-	-	-	-	-
Kelas II	-	-	-	-	-
Kelas III	-	-	-	-	-
Kelas IIIA	-	-	-	-	-
Kelas IIIB	-	-	-	-	-
Kelas IIIC	1.304.730	1.303.323	1.303.323	1.303.323	1.303.323
Kelas tidak	-	-	-	-	-
Jumlah					
Kelas I	-	-	-	-	-
Kelas II	28.15	28.15	28.15	28.15	28.15
Kelas III	-	-	-	-	-
Kelas IIIA	160.15	160.15	160.15	160.15	160.15
Kelas IIIB	-	-	-	-	-
Kelas IIIC	1.304.730	1.303.323	1.303.323	1.303.323	1.303.323
Kelas tidak	-	-	-	-	-

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya (2015)

Selanjutnya terkait dengan penataan ruang, ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW.

Tabel 2.46.
Luas Lahan Tanah Perkotaan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014

No.	Kecamatan	Lahan Pertanian	Lahan Bukan	Jumlah
1	Cipatujah	20.874	3.793	24.667
2	Karangnunggal	12.685	948	13.633
	Bantarkalong	5.630	353	5.983
3	Cikatomas	11.924	1.344	13.268
4	Taraju	3.711	1.874	5.585
5	Manonjaya	7.503	860	3.941
6	Singaparna	1.778	704	2.482
7	Rajapolah	1.725	420	2.145
8	Ciawi	3.467	1.065	4.532

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya (2015)

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel.

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan

perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya.

Fasilitas bank dan non bank diukur salah satunya dengan jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Tabel 2.47.
Beberapa Fasilitas Wilayah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Hotel*	Unit	11	13	17	22	-
		Kamar	223	271	318	368	-
		Tempat Tidur	425	509	509	553	-
2	Restoran**	Unit		18	21	25	25
Lembaga Keuangan			Bank Pemerintah		Bank Swasta		BPD
3	Bank** (Tahun 2015)	Jaringan Bank Umum	4		13		1
		Jumlah Kantor Bank	90		34		18

Sumber : *BPS Kabupaten Tasikmalaya (2016), **BPS Provinsi Barat (2016)

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim investasi daerah yang baik mencerminkan sejumlah kondisi yang berkaitan dengan wilayah tertentu yang membentuk kesempatan dan insentif bagi investor untuk membuka usaha yang layak dari segi bisnis. Daya saing investasi daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan. Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama.

Tabel 2.48.
Hasil Kinerja Pelayanan Perizinan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan	%	100	100	100	100	100
2	Prosentase kepastian dan ketepatan biaya pelayanan perizinan	%	100	100	100	100	100

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia (SDM)

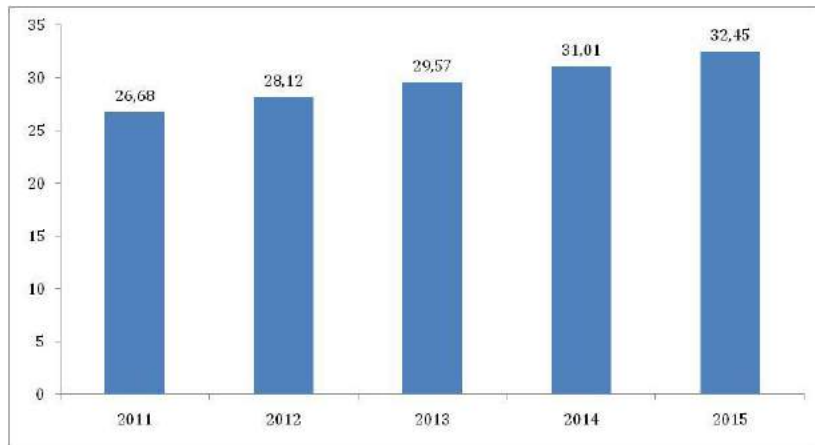
Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas SDM yang berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Kualitas tenaga kerja sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk maka semakin baik kualitas tenaganya.

Tabel 2.49.
Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013-2015

No.	Uraian	Satuan	2013	2014	2015
1	Maksimum SD	Jiwa	856,956	844,841	825,658
2	SMTP	Jiwa	225,831	239,366	253,068
3	SMTA Umum	Jiwa	84,581	95,076	109,711
4	SMTA Kejuruan	Jiwa	26,059	23,684	34,789
5	Diploma	Jiwa	12,666	11,474	14,288
6	Universitas	Jiwa	32,679	36,895	26,379

Sumber : BPS Pusat (2015)

Transisi struktur usia berdampak pada *dependency ratio* atau beban ketergantungan. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Perhitungan BPS Pusat (2015) menunjukkan *dependency ratio* Kabupaten Tasikmalaya tahun 2015 sebesar 32,45% yang artinya setiap 100 orang yang berusia kerja dan dianggap produktif mempunyai tanggungan masing-masing sebanyak 32,45 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif.



Sumber : BPS Pusat (2015)

Gambar 2.34.
Dependency Ratio
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kapasitas keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah yang mencerminkan kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

3.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan laporan keuangan pemerintah daerah terutama neraca. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja baik kelompok belanja langsung maupun kelompok belanja tidak langsung, pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah yang disajikan

dalam laporan realisasi anggaran (LRA). Sementara itu laporan keuangan daerah lainnya yang berbasis akrual yaitu neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi asset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dikemukakan sebagai berikut :

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Kabupaten Tasikmalaya

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Tasikmalaya digunakan dengan melihat indikator pengalokasian anggaran dan realisasi anggaran baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan, melihat realisasi pertumbuhan anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan yang dalam analisa ini dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2011-2015).

Dalam aspek akuntabilitas pelaksanaan anggaran dapat dikemukakan bahwa hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan daerah Kabupaten Tasikmalaya pada pelaksanaan anggaran tahun 2011, 2012, 2013 mendapat opini Wajar Dengan pengecualian (WDP) sedangkan tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan tahun anggaran 2015 telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2015 yang telah berbasis akrual.

Realisasi anggaran mencerminkan salah satu indikator kinerja pengelolaan keuangan yang baik, realisasi sektor pendapatan mutlak sangat strategis mengingat realisasi pendapatan inilah yang akan membiayai belanja daerah selama satu tahun, tidak terealisasinya pendapatan daerah akan mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat membiayai belanja daerah yang telah direncanakan. Pada sektor belanja, serapan anggaran mencerminkan bagaimana terserapnya manfaat oleh masyarakat pada kurun waktu satu tahun anggaran yang juga akan mendorong *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan realisasi pembiayaan menunjukkan bagaimana defisit anggaran dapat ditutupi atau tidak dalam satu tahun anggaran.

Berikut adalah gambaran kinerja pelaksanaan keuangan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir :

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Dan Belanja Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2011 dan 2015

NOMOR URUT	Uraian	2011		2012		2013		2014		2015		Rata Kinerja
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
1	PENDAPATAN	1.498.965.116.547,52	1.505.485.957.229,00	1.815.931.038.787,68	1.813.389.750.992,00	2.228.882.007.810,00	2.213.623.318.967,00	2.554.080.535.809,00	2.566.519.525.451,00	2.750.630.839.061,00	2.749.892.273.083,00	100,01
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	52.511.188.055,12	51.160.921.192,00	58.135.672.163,93	60.970.810.517,00	70.232.926.830,00	70.474.192.115,00	152.337.814.551,00	154.255.170.573,00	180.552.908.795,00	186.487.256.315,00	101,44
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	15.019.233.875,00	17.861.130.368,00	17.382.839.000,00	20.545.416.360,00	21.913.071.772,00	23.839.779.378,00	41.595.013.937,00	44.253.007.592,00	43.452.631.000,00	47.066.450.845,00	112,12
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	19.214.330.224,00	15.312.578.095,00	21.065.969.835,93	19.820.207.958,00	20.898.354.400,00	20.321.676.447,00	20.434.553.250,00	33.530.262.672,00	22.275.548.500,00	17.103.891.605,00	102,38
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.377.679.607,12	8.042.461.466,00	12.728.612.729,00	7.997.627.498,00	15.303.457.658,00	8.965.582.987,00	18.118.326.734,00	10.227.491.780,00	18.793.098.000,00	18.717.391.511,00	69,63
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.899.944.349,00	9.944.751.263,00	6.958.250.599,00	12.607.558.701,00	12.118.043.000,00	17.347.153.303,00	72.189.920.630,00	66.244.408.529,00	96.031.631.295,00	103.599.522.354,00	133,62
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.032.163.622.295,15	1.043.973.470.058,00	1.280.253.484.802,00	1.281.237.193.766,00	1.405.681.690.942,00	1.415.316.877.662,00	1.521.840.482.635,00	1.541.035.901.962,00	1.643.823.400.000,00	1.633.950.690.991,00	100,51
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	73.792.484.295,15	85.602.332.058,00	90.482.752.802,00	91.466.461.766,00	80.749.441.942,00	90.384.628.662,00	68.593.994.635,00	87.789.413.962,00	73.903.918.000,00	64.031.208.991,00	108,73
1.2.2	Dana Alokasi Umum	881.513.538.000,00	881.513.538.000,00	1.083.660.482.000,00	1.083.660.482.000,00	1.225.934.879.000,00	1.225.934.879.000,00	1.342.934.278.000,00	1.342.934.278.000,00	1.380.490.312.000,00	1.380.490.312.000,00	100,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	76.857.600.000,00	76.857.600.000,00	106.110.250.000,00	106.110.250.000,00	98.997.370.000,00	98.997.370.000,00	110.312.210.000,00	110.312.210.000,00	189.429.170.000,00	189.429.170.000,00	100,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	414.290.306.197,25	410.351.565.979,00	477.541.881.821,75	471.181.746.709,00	752.967.390.038,00	727.832.249.190,00	879.902.238.623,00	871.228.452.916,00	926.254.530.266,00	929.454.325.777,00	98,75
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	34.368.688.037,25	32.630.263.344,00	39.641.639.461,75	36.681.426.959,00	49.818.388.638,00	48.623.930.526,00	82.513.372.623,00	90.983.601.513,00	88.568.143.466,00	120.290.259.291,00	106,23
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	157.890.367.160,00	157.890.367.160,00	232.477.213.000,00	232.477.213.000,00	340.098.291.000,00	340.098.291.000,00	411.137.653.000,00	411.137.653.000,00	441.888.744.000,00	441.888.744.000,00	100,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	112.943.105.000,00	110.742.789.475,00	205.423.029.360,00	202.023.106.750,00	363.050.710.400,00	339.110.027.664,00	386.251.213.000,00	369.107.198.403,00	294.456.930.800,00	265.934.609.486,00	95,14
1.3.6	Dana Alokasi Bantuan Operasional Sekolah	109.088.146.000,00	109.088.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.7	Pendapatan Kepada Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.340.712.000,00	101.340.713.000,00	
2	BELANJA	1.608.911.733.302,52	1.508.879.721.149,00	1.925.294.175.147,68	1.829.410.194.201,00	2.318.155.621.192,00	2.165.004.333.289,00	2.690.310.110.913,00	2.416.942.284.557,00	3.055.974.143.960,00	2.736.269.299.639,00	92,31
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.130.022.437.442,52	1.099.326.548.615,00	1.270.190.867.119,68	1.218.212.658.480,00	1.509.152.806.773,50	1.415.967.383.050,00	1.775.566.702.261,80	1.573.709.384.898,00	2.097.400.701.277,00	1.892.577.747.429,00	93,18
2.1.1	Belanja Pegawai	978.617.868.705,32	952.170.060.491,00	1.138.266.558.967,58	1.090.185.266.816,00	1.300.114.330.981,18	1.213.201.315.838,00	1.514.346.764.619,20	1.322.037.197.036,00	1.566.955.879.092,60	1.371.237.597.553,00	92,24

NOMOR URUT	Uraian	2011		2012		2013		2014		2015		Rata Kinerja
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
2.1.4	Belanja Hibah	39.350.281.000,00	37.823.326.750,00	63.718.374.750,00	60.915.012.500,00	108.277.400.000,00	105.121.150.000,00	143.561.790.000,00	141.725.000.000,00	273.373.885.000,00	270.152.692.000,00	97,27
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	57.385.816.037,20	56.638.491.000,00	7.063.090.500,00	6.986.590.500,00	9.265.413.000,00	6.878.040.113,00	13.260.500.000,00	8.963.200.000,00	9.146.603.167,00	5.388.000.000,00	79,67
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	7.741.661.700,00	7.512.387.678,00	8.695.580.662,10	8.607.056.924,00	9.323.552.052,32	9.137.697.359,00	7.346.245.680,60	7.070.872.640,00	6.332.274.346,46	6.191.359.000,00	97,61
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	40.426.810.000,00	40.234.619.696,00	50.578.429.740,00	50.250.669.740,00	77.168.069.740,00	77.161.349.740,00	90.001.401.962,00	87.295.702.222,00	234.055.799.670,94	233.492.559.278,00	99,12
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	6.500.000.000,00	4.947.663.000,00	1.868.832.500,00	1.268.062.000,00	5.004.041.000,00	4.467.830.000,00	7.050.000.000,00	6.617.413.000,00	7.536.260.000,00	6.115.539.598,00	81,65
2.2	BELANJA LANGSUNG	478.889.295.860,00	409.553.172.534,00	655.103.308.028,00	611.197.535.721,00	809.002.814.418,50	749.036.950.239,00	914.743.408.651,20	843.232.899.659,00	958.573.442.683,00	843.691.552.210,00	90,32
2.2.1	Belanja Pegawai	44.977.491.334,00	42.769.153.902,00	48.705.000.510,00	43.376.190.125,00	52.072.055.504,00	47.770.244.356,00	76.107.736.649,00	67.675.425.491,00	98.282.344.826,00	87.538.201.692,00	90,78
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	209.250.944.620,00	199.640.393.464,00	232.378.758.919,00	213.335.997.732,00	233.203.540.971,00	212.903.508.725,00	240.238.125.327,00	217.060.968.240,00	352.157.753.687,00	293.447.129.175,00	90,44
2.2.3	Belanja Modal	224.660.859.906,00	167.143.625.168,00	374.019.548.599,00	354.485.347.864,00	523.727.217.943,50	488.363.197.158,00	598.397.546.675,20	558.496.505.928,00	508.133.344.170,00	462.706.221.343,00	89,36
	SURPLUS / (DEFISIT)	(109.946.616.755,00)	(3.393.763.920,00)	(109.363.136.360,00)	(16.020.443.209,00)	(89.273.613.382,00)	48.618.985.678,00	(136.229.575.104,00)	149.577.240.894,00	(305.343.304.899,00)	13.622.973.444,00	(30,20)
3	PEMBIAYAAN DAERAH											
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	110.696.616.755,00	115.306.900.280,00	111.163.136.360,00	115.666.121.591,00	97.773.613.382,00	104.460.678.373,00	149.229.575.104,00	158.188.024.782,00	310.843.304.899,00	310.843.304.899,00	104,21
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	110.696.616.755,00	110.696.616.756,00	106.552.852.836,00	111.163.136.360,00	97.773.613.382,00	97.845.678.382,00	149.229.575.104,00	149.579.664.051,00	295.843.304.899,00	295.843.304.899,00	100,93
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	
3.1.10	Penerimaan Investasi	0,00	4.610.283.524,00	4.610.283.524,00	4.502.985.231,00	0,00	6.614.999.991,00	0,00	8.608.360.731,00	0,00	0,00	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	750.000.000,00	750.000.000,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	8.500.000.000,00	3.500.000.000,00	13.000.000.000,00	11.849.895.777,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	86,47
2.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	750.000.000,00	750.000.000,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.000.000.000,00	1.849.895.777,00	500.000.000,00	500.000.000,00	92,33
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	(97.845.678.382,00)	0,00	(149.579.664.051,00)	0,00	(295.915.369.899,00)	0,00	0,00	

NOMOR URUT	Uraian	2011		2012		2013		2014		2015		Rata Kinerja
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
3.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	(97.845.678.382,00)	0,00	(149.579.664.051,00)	0,00	(295.915.369.899,00)	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	109.946.616.755,00	114.556.900.280,00	109.363.136.360,00	113.866.121.591,00	89.273.613.382,00	100.960.678.373,00	136.229.575.104,00	146.338.129.005,00	305.343.304.899,00	305.343.304.899,00	105,76
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	111.163.136.360,00	0,00	97.845.678.382,00	0,00	149.579.664.051,00	0,00	295.915.369.899,00	0,00	318.966.278.343,00	

Sumber : Perda APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 s/d 2015,diolah

Selanjutnya untuk melihat kinerja pelaksanaan keuangan daerah, di awal dapat dilihat dari pertumbuhan rata-rata anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam 5 tahun terakhir dimana pendapatan, belanja dan pembiayaan netto tumbuh sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Pertumbuhan Rata-Rata Anggaran Pendapatan Daerah Dan Belanja Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011- 2015

NOMOR URUT	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata - Rata Pertumbuhan
		Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	
1	PENDAPATAN	1.498.965.116.547,52	1.815.931.038.787,68	2.228.882.007.810,00	2.554.080.535.809,00	2.750.630.839.061,00	16,54
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	52.511.188.055,12	58.135.672.163,93	70.232.926.830,00	152.337.814.551,00	180.552.908.795,00	41,74
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	15.019.233.875,00	17.382.839.000,00	21.913.071.772,00	41.595.013.937,00	43.452.631.000,00	34,02
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	19.214.330.224,00	21.065.969.835,93	20.898.354.400,00	20.434.553.250,00	22.275.548.500,00	3,91
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.377.679.607,12	12.728.612.729,00	15.303.457.658,00	18.118.326.734,00	18.793.098.000,00	13,56
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.899.944.349,00	6.958.250.599,00	12.118.043.000,00	72.189.920.630,00	96.031.631.295,00	150,94
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.032.163.622.295,15	1.280.253.484.802,00	1.405.681.690.942,00	1.521.840.482.635,00	1.643.823.400.000,00	12,53
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	73.792.484.295,15	90.482.752.802,00	80.749.441.942,00	68.593.994.635,00	73.903.918.000,00	1,14
1.2.2	Dana Alokasi Umum	881.513.538.000,00	1.083.660.482.000,00	1.225.934.879.000,00	1.342.934.278.000,00	1.380.490.312.000,00	12,10
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	76.857.600.000,00	106.110.250.000,00	98.997.370.000,00	110.312.210.000,00	189.429.170.000,00	28,63
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	414.290.306.197,25	477.541.881.821,75	752.967.390.038,00	879.902.238.623,00	926.254.530.266,00	23,77
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	34.368.688.037,25	39.641.639.461,75	49.818.388.638,00	82.513.372.623,00	88.568.143.466,00	28,50
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	157.890.367.160,00	232.477.213.000,00	340.098.291.000,00	411.137.653.000,00	441.888.744.000,00	30,48
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	112.943.105.000,00	205.423.029.360,00	363.050.710.400,00	386.251.213.000,00	294.456.930.800,00	35,31
1.3.6	Dana Alokasi Bantuan Operasional Sekolah	109.088.146.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.7	Pendapatan Kepada Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	101.340.712.000,00	
2	BELANJA	1.608.911.733.302,52	1.925.294.175.147,68	2.318.155.621.192,00	2.690.310.110.913,00	3.055.974.143.960,00	17,43
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.130.022.437.442,52	1.270.190.867.119,68	1.509.152.806.773,50	1.775.566.702.261,80	2.097.400.701.277,00	16,75
2.1.1	Belanja Pegawai	978.617.868.705,32	1.138.266.558.967,58	1.300.114.330.981,18	1.514.346.764.619,20	1.566.955.879.092,60	12,62
2.1.4	Belanja Hibah	39.350.281.000,00	63.718.374.750,00	108.277.400.000,00	143.561.790.000,00	273.373.885.000,00	63,72
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	57.385.816.037,20	7.063.090.500,00	9.265.413.000,00	13.260.500.000,00	9.146.603.167,00	-11,10
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	7.741.661.700,00	8.695.580.662,10	9.323.552.052,32	7.346.245.680,60	6.332.274.346,46	-3,87
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	40.426.810.000,00	50.578.429.740,00	77.168.069.740,00	90.001.401.962,00	234.055.799.670,94	63,59
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	6.500.000.000,00	1.868.832.500,00	5.004.041.000,00	7.050.000.000,00	7.536.260.000,00	36,07
2.2	BELANJA LANGSUNG	478.889.295.860,00	655.103.308.028,00	809.002.814.418,50	914.743.408.651,20	958.573.442.683,00	19,54
2.2.1	Belanja Pegawai	44.977.491.334,00	48.705.000.510,00	52.072.055.504,00	76.107.736.649,00	98.282.344.826,00	22,62
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	209.250.944.620,00	232.378.758.919,00	233.203.540.971,00	240.238.125.327,00	352.157.753.687,00	15,25
2.2.3	Belanja Modal	224.660.859.906,00	374.019.548.599,00	523.727.217.943,50	598.397.546.675,20	508.133.344.170,00	26,42

NOMOR URUT	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata - Rata Pertumbuhan
		Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(109.946.616.755,00)	(109.363.136.360,00)	(89.273.613.382,00)	(136.229.575.104,00)	(305.343.304.899,00)	39,46
3	PEMBIAYAAN DAERAH						
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	110.696.616.755,00	111.163.136.360,00	97.773.613.382,00	149.229.575.104,00	310.843.304.899,00	37,33
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	110.696.616.755,00	106.552.852.836,00	97.773.613.382,00	149.229.575.104,00	295.843.304.899,00	34,72
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	
3.1.10	Penerimaan Investasi	0,00	4.610.283.524,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	750.000.000,00	1.800.000.000,00	8.500.000.000,00	13.000.000.000,00	5.500.000.000,00	126,87
2.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	750.000.000,00	1.800.000.000,00	3.500.000.000,00	3.000.000.000,00	500.000.000,00	34,21
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	109.946.616.755,00	109.363.136.360,00	89.273.613.382,00	136.229.575.104,00	305.343.304.899,00	39,46
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sumber : Perda APBD tahun 2011-2016, diolah

Selanjutnya untuk melihat kinerja pelaksanaan keuangan daerah, dapat dilihat dari realisasi pertumbuhan rata-rata Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam 5 tahun terakhir dimana pendapatan, belanja dan pembiayaan netto tumbuh positif sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Pertumbuhan Rata-Rata Realisasi Pendapatan Daerah Dan Belanja Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

NOMOR URUT	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata - Rata Pertumbuhan
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
1	PENDAPATAN	1.505.485.957.229,00	1.813.389.750.992,00	2.213.623.318.967,00	2.566.519.525.451,00	2.749.892.273.083,00	16,40
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	51.160.921.192,00	60.970.810.517,00	70.474.192.115,00	154.255.170.573,00	186.487.256.315,00	43,63
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	17.861.130.368,00	20.545.416.360,00	23.839.779.378,00	44.253.007.592,00	47.066.450.845,00	30,76
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	15.312.578.095,00	19.820.207.958,00	20.321.676.447,00	33.530.262.672,00	17.103.891.605,00	11,99
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.042.461.466,00	7.997.627.498,00	8.965.582.987,00	10.227.491.780,00	18.717.391.511,00	27,16
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.944.751.263,00	12.607.558.701,00	17.347.153.303,00	66.244.408.529,00	103.599.522.354,00	100,66
1 . 2	DANA PERIMBANGAN	1.043.973.470.058,00	1.281.237.193.766,00	1.415.316.877.662,00	1.541.035.901.962,00	1.633.950.690.991,00	12,03
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	85.602.332.058,00	91.466.461.766,00	90.384.628.662,00	87.789.413.962,00	64.031.208.991,00	-6,07
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	881.513.538.000,00	1.083.660.482.000,00	1.225.934.879.000,00	1.342.934.278.000,00	1.380.490.312.000,00	12,10
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	76.857.600.000,00	106.110.250.000,00	98.997.370.000,00	110.312.210.000,00	189.429.170.000,00	28,63
1 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	410.351.565.979,00	471.181.746.709,00	727.832.249.190,00	871.228.452.916,00	929.454.325.777,00	23,92
1 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	32.630.263.344,00	36.681.426.959,00	48.623.930.526,00	90.983.601.513,00	120.290.259.291,00	41,08
1 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	157.890.367.160,00	232.477.213.000,00	340.098.291.000,00	411.137.653.000,00	441.888.744.000,00	30,48
1 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	110.742.789.475,00	202.023.106.750,00	339.110.027.664,00	369.107.198.403,00	265.934.609.486,00	32,79
1 . 3 . 6	Dana Alokasi Bantuan Operasional Sekolah	109.088.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 . 3 . 7	Pendapatan Kepada Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	101.340.713.000,00	
2	BELANJA	1.508.879.721.149,00	1.829.410.194.201,00	2.165.004.333.289,00	2.416.942.284.557,00	2.736.269.299.639,00	16,11
2 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.099.326.548.615,00	1.218.212.658.480,00	1.415.967.383.050,00	1.573.709.384.898,00	1.892.577.747.429,00	14,61
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	952.170.060.491,00	1.090.185.266.816,00	1.213.201.315.838,00	1.322.037.197.036,00	1.371.237.597.553,00	9,62
2 . 1 . 4	Belanja Hibah	37.823.326.750,00	60.915.012.500,00	105.121.150.000,00	141.725.000.000,00	270.152.692.000,00	64,76
2 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	56.638.491.000,00	6.986.590.500,00	6.878.040.113,00	8.963.200.000,00	5.388.000.000,00	-24,70
2 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	7.512.387.678,00	8.607.056.924,00	9.137.697.359,00	7.070.872.640,00	6.191.359.000,00	-3,58
2 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	40.234.619.696,00	50.250.669.740,00	77.161.349.740,00	87.295.702.222,00	233.492.559.278,00	64,76
2 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	4.947.663.000,00	1.268.062.000,00	4.467.830.000,00	6.617.413.000,00	6.115.539.598,00	54,62
2 . 2	BELANJA LANGSUNG	409.553.172.534,00	611.197.535.721,00	749.036.950.239,00	843.232.899.659,00	843.691.552.210,00	21,10
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.769.153.902,00	43.376.190.125,00	47.770.244.356,00	67.675.425.491,00	87.538.201.692,00	20,64
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	199.640.393.464,00	213.335.997.732,00	212.903.508.725,00	217.060.968.240,00	293.447.129.175,00	10,95
2 . 2 . 3	Belanja Modal	167.143.625.168,00	354.485.347.864,00	488.363.197.158,00	558.496.505.928,00	462.706.221.343,00	36,77
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.393.763.920,00)	(16.020.443.209,00)	48.618.985.678,00	149.577.240.894,00	13.622.973.444,00	21,33
3	PEMBIAYAAN DAERAH						
3 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	115.306.900.280,00	115.666.121.591,00	104.460.678.373,00	158.188.024.782,00	310.843.304.899,00	34,64

NOMOR URUT	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata - Rata Pertumbuhan
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	110.696.616.756,00	111.163.136.360,00	97.845.678.382,00	149.579.664.051,00	295.843.304.899,00	34,77
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	
3.1.10	Penerimaan Investasi	4.610.283.524,00	4.502.985.231,00	6.614.999.991,00	8.608.360.731,00	0,00	-6,32
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	750.000.000,00	1.800.000.000,00	3.500.000.000,00	11.849.895.777,00	5.500.000.000,00	104,86
2.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	750.000.000,00	1.800.000.000,00	3.500.000.000,00	1.849.895.777,00	500.000.000,00	28,58
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	(97.845.678.382,00)	(149.579.664.051,00)	(295.915.369.899,00)	0,00	
3.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	(97.845.678.382,00)	(149.579.664.051,00)	(295.915.369.899,00)	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	114.556.900.280,00	113.866.121.591,00	100.960.678.373,00	146.338.129.005,00	305.343.304.899,00	35,42
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	111.163.136.360,00	97.845.678.382,00	149.579.664.051,00	295.915.369.899,00	318.966.278.343,00	36,63

Kenaikan Realisasi Anggaran dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan telah optimalnya strategi peningkatan dan kebijakan yang dijalankan melalui berbagai upaya baik dalam bentuk kegiatan maupun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah disamping adanya penerimaan yang merupakan kebijakan baru dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi. Kedepan perlu adanya perencanaan anggaran yang tepat dan akurat serta mencari terobosan untuk mendapatkan sumber pendapatan lain yang lebih prospektif dengan tetap berpijak kepada landasan hukum yang berlaku.

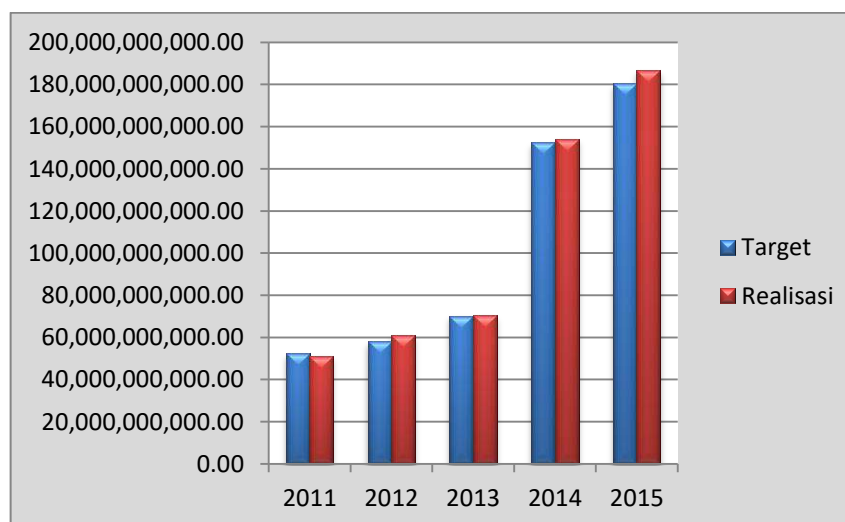
Ketergantungan pendapatan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kepada pemerintah pusat dan provinsi masih sangat besar, sehingga dalam prakteknya pendapatan daerah akan sangat tergantung pada kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Tingkat kemandirian APBD dapat dilihat dari besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhannya, berikut adalah gambaran target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir:

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pada APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

Tahun	Target		Realisasi		Rasio Efektivitas
	PAD	Pertumbuhan	PAD	Pertumbuhan	
2011	52,511,188,055.12		51,160,921,192.00		97.43
2012	58,135,672,163.93	10.71	60,970,810,517.00	19.17	104.88
2013	70,232,926,830.00	20.81	70,474,192,115.00	15.59	100.34
2014	152,337,814,551.00	116.90	154,255,170,573.00	118.88	101.26
2015	180,552,908,795.00	18.52	186,487,256,315.00	20.90	103.29
Rata-rata Per Tahun		41.74	104,669,670,142.40	43.63	101.44

Sumber : Laporan Keuangan Daerah, diolah

Gambar 3.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pada APBD Kab. Tasikmalaya 2011 - 2015



Perbandingan antara target dengan realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu 2011-2015, menunjukkan kenaikan dengan rata-rata sebesar 41,74 %, rata-rata realisasi pendapatan yang dicapai di atas target yang telah ditetapkan dengan rasio efektivitas PAD rata rata sebesar 101,44 %, akan tetapi hal itu kontribusi lonjakan pertumbuhan terbesarnya terjadi pada tahun 2013 dengan kondisi yang telah digambarkan di atas akibat dari adanya kebijakan baru dalam sektor pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat, sehingga hal ini dianggap bukan menjadi *trend* tetapi lebih cenderung kasuistik yang mungkin tidak akan berulang pada tahun-tahun berikutnya dan cenderung bisa diabaikan dari rata-rata. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sudah berusaha maksimal dalam melakukan penggalan sumber-sumber pendapatan daerah hal ini ditunjukkan dengan telah tercapainya realisasi setiap tahun anggaran. Selain

itu, sumber-sumber potensi pendapatan daerah masih cukup banyak yang dapat digali dan dikembangkan sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan daerah.

3.1.2 Neraca Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing – masing unsur didefinisikan sebagai berikut : Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan / atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber – sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang uang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Neraca daerah tahun terakhir (TA 2015) adalah sbb:

Tabel 3.5
Neraca Daerah Pemerintah Kab. Tasikmalaya Tahun 2015

URAIAN	2015
ASET	
ASET LANCAR	
Kas di Kas Daerah	309,214,411,639.00
Kas di Bendahara Penerimaan	0.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	59,542,996.00
Kas di BLUD	1,092,678,657.00
Kas Lainnya	11,219,577,466.00
Setara Kas	0.00
Kas di FKTP	8,599,651,345.00
Investasi Jangka Pendek	0.00
Piutang Pendapatan	7,078,627,820.00
Piutang Lainnya	166,322,990.00
Penyisihan Piutang	(330,518,378.00)
Beban Dibayar Dimuka	136,897,274.00
Persediaan	14,443,175,135.00
JUMLAH ASET LANCAR	351,680,366,944.00
INVESTASI JANGKA PANJANG	
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0.00
Investasi dalam Obligasi	0.00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0.00
Dana Bergulir	0.00
Deposito Jangka Panjang	0.00
Investasi Non Permanen Lainnya	1,545,718,993.25
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	1,545,718,993.25
Investasi Jangka Panjang Permanen	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	122,860,163,017.46
Investasi Permanen Lainnya	0.00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	122,860,163,017.46
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	124,405,882,010.71
ASET TETAP	
Tanah	484,542,733,717.90
Peralatan dan Mesin	577,739,297,118.39
Gedung dan Bangunan	973,408,620,318.94
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1,308,251,301,242.00
Aset Tetap Lainnya	97,706,094,272.51
Konstruksi Dalam Pengerjaan	182,038,823,702.00
Akumulasi Penyusutan	(781,126,263,180.72)
JUMLAH ASET TETAP	2,842,560,607,191.02
DANA CADANGAN	
Dana Cadangan	0.00
JUMLAH DANA CADANGAN	0.00
ASET LAINNYA	
Tagihan Jangka Panjang	160,297,250.00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0.00
Aset Tidak Berwujud	270,682,952.00

URAIAN	2015
Aset Lain-lain	651,146,645,247.28
JUMLAH ASET LAINNYA	651,577,625,449.28
JUMLAH ASET	3,970,224,481,595.01
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0.00
Utang Bunga	0.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	179,927,806.98
Utang Beban	13,871,842,018.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	4,462,858,159.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	18,514,627,983.98
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Utang Dalam Negeri	0.00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN	18,514,627,983.98
EKUITAS	
EKUITAS	3,951,709,853,611.03
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3,970,224,481,595.01

Selanjutnya Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam dua tahun terakhir (2014-2015) seperti dapat terlihat pada Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Kab. Tasikmalaya
Tahun 2014-2015

URAIAN	2014	2015	Rata - Rata Pertumbuhan
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Kas Daerah	289.171.673.818,00	309.214.411.639,00	6,93
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	
Kas di Bendahara Pengeluaran	101.556.603,00	59.542.996,00	-41,37
Kas di BLUD	3.576.607.053,00	1.092.678.657,00	-69,45
Kas Lainnya	0,00	11.219.577.466,00	
Setara Kas	0,00	0,00	
Kas di FKTP	3.104.542.828,00	8.599.651.345,00	177,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	
Piutang Pendapatan	40.454.542,00	7.078.627.820,00	17.397,73

URAIAN	2014	2015	Rata - Rata Pertumbuhan
Piutang Lainnya	1.317.598.300,00	166.322.990,00	-87,38
Penyisihan Piutang	0,00	(330.518.378,00)	
Beban Dibayar Dimuka	155.006.337,96	136.897.274,00	-11,68
Persediaan	12.878.534.788,00	14.443.175.135,00	12,15
JUMLAH ASET LANCAR	310.345.974.269,96	351.680.366.944,00	13,32
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00	
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00	
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	
Dana Bergulir	0,00	0,00	
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00	
Investasi Non Permanen Lainnya	1.198.071.521,51	1.545.718.993,25	29,02
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	1.198.071.521,51	1.545.718.993,25	29,02
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	117.626.821.644,97	122.860.163.017,46	4,45
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	117.626.821.644,97	122.860.163.017,46	4,45
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	118.824.893.166,48	124.405.882.010,71	4,70
ASET TETAP			
Tanah	465.242.643.209,40	484.542.733.717,90	4,15
Peralatan dan Mesin	493.705.467.581,61	577.739.297.118,39	17,02
Gedung dan Bangunan	909.857.618.092,92	973.408.620.318,94	6,98
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.456.707.303.743,00	1.308.251.301.242,00	-10,19
Aset Tetap Lainnya	74.199.147.151,39	97.706.094.272,51	31,68
Konstruksi Dalam Pengerjaan	138.599.756.029,00	182.038.823.702,00	31,34
Akumulasi Penyusutan	0,00	(781.126.263.180,72)	
JUMLAH ASET TETAP	3.538.311.935.807,32	2.842.560.607.191,02	-19,66
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan	10.000.000.000,00	0,00	-100,00
JUMLAH DANA CADANGAN	10.000.000.000,00	0,00	-100,00
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang	57.852.250,00	160.297.250,00	177,08
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	
Aset Tidak Berwujud	87.038.000,00	270.682.952,00	210,99
Aset Lain-lain	309.513.086.090,00	651.146.645.247,28	110,38

URAIAN	2014	2015	Rata - Rata Pertumbuhan
JUMLAH ASET LAINNYA	309.657.976.340,00	651.577.625.449,28	110,42
JUMLAH ASET	4.287.140.779.583,76	3.970.224.481.595,01	-7,39
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	39.010.403,00	0,00	-100,00
Utang Bunga	0,00	0,00	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	179.927.806,98	
Utang Beban	0,00	13.871.842.018,00	
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.664.202.517,00	4.462.858.159,00	-4,32
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4.703.212.920,00	18.514.627.983,98	293,66
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	
JUMLAH KEWAJIBAN	4.703.212.920,00	18.514.627.983,98	293,66
EKUITAS			
EKUITAS	4.282.437.566.663,76	3.951.709.853.611,03	-7,72
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4.287.140.779.583,76	3.970.224.481.595,01	-7,39

Sumber: Laporan Keuangan daerah

3.1.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mencantumkan bahwa sumber penerimaan daerah terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; dan (3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak

dari Propinsi dan pemerintah daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan dari Propinsi/pemerintah daerah lainnya. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah; (3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan (4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, yaitu:

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan OPD Penghasil.
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
6. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.
7. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem dan prosedur pemungutan serta administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
8. Meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya

pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah hingga tahun 2016 mendatang, prioritas kebijakan pendapatan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru diberlakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan pelaksanaannya.
2. Melaksanakan kajian penerapan pajak progresif, terutama yang terkait dengan imbasnya terhadap sosial-ekonomi masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya.
3. Menerapkan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain, terutama dari potensi investasi daerah serta pelibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui kegiatan skema kerjasama pemerintah (*Public Private Partnership*) dan swasta maupun *corporate social responsibility (CSR)*.

Untuk itu sejumlah langkah yang akan dilakukan meliputi:

- a. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Kabupaten Tasikmalaya.
- b. Kerjasama investasi antara Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan pihak swasta melalui perjanjian yang disepakati.
- c. Mendorong peningkatan investasi langsung oleh masyarakat lokal.
- d. Optimalisasi Pelaksanaan Perijinan Pelayanan Terpadu (PPT) yang merupakan wujud pelayanan publik dalam tata pemerintahan.
- e. Meningkatkan koordinasi program melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*
- f. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian dan kelautan, industri pengolahan, dan industri manufaktur.

Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Kebijakan belanja daerah tahun 2011-2015 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran IPM. Untuk itu, diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencapaian IPM guna memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2011-2015 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu :

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.
3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
4. Belanja dalam rangka peyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.
5. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari Volume Anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan perintisan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.

6. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak,serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.
7. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi berbasis perdesaan melalui gerakan membangun desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan.
8. Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
9. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah akan mengarahkan pada pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam, optimalisasi kegiatan dalam upaya pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung sebesar 64,12%, mitigasi bencana dan pengendalian alih fungsi lahan.
10. Kegiatan - kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*).
11. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengalokasikan Alokasi Dana Desa;
 - c. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - d. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang

- dan/atau jasa kepada pemerintah pusat, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang menunjang program kegiatan urusan wajib dan pilihan;
- e. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak terduga seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Untuk kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

3.1.4 Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja daerah dikelompokkan dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung, belanja langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan yang terdiri dari jenis belanja pegawai yang terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung yaitu belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari jenis belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Proporsi belanja langsung terhadap jumlah belanja dan pengeluaran pembiayaan dalam kurun waktu 2011 sd 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Proporsi Belanja Langsung
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan Belanja Langsung (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
1	Tahun Anggaran 2011	478.889.295.860,00	1.609.661.733.302,52	29,75
2	Tahun Anggaran 2012	655.103.308.028,00	1.927.094.175.147,68	33,99
3	Tahun Anggaran 2013	809.002.814.418,50	2.326.655.621.192,00	34,77
4	Tahun Anggaran 2014	914.743.408.651,20	2.703.310.110.913,00	33,84
5	Tahun Anggaran 2015	958.573.442.683,00	3.061.474.143.960,00	31,31
	Rata-rata			

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2011 s.d 2015,diolah

3.1.5. Analisis Pembiayaan

Kondisi pembiayaan daerah dalam kurun Tahun 2011-2015 dapat digambarkan seperti terlihat pada Tabel 3.8 di bawah ini.

Tabel 3.8
Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kab. Tasikmalaya Tahun 2011-2015

NO	Uraian	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1.505.485.957.229,00	1.813.389.750.992,00	2.213.623.318.967,00	2.566.519.525.451,00	2.749.892.273.083,00
2.	Belanja Daerah	1.508.879.721.149,00	1.829.410.194.201,00	2.165.004.333.289,00	2.416.942.284.557,00	2.736.269.299.639,00
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	750.000.000,00	1.800.000.000,00	3.500.000.000,00	111.849.895.777,00	5.500.000.000,00
4.	Defisit riil	(3.393.763.920,00)	(16.020.443.209,00)	48.618.985.678,00	149.577.240.894,00	13.622.973.444,00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah daerah (diolah)

Komposisi penutup defisit riil anggaran pada kurun tahun yang sama digambarkan komposisinya pada Tabel 3.9 berikut ini.

Tabel 3.9
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	100,68	97,43	109,52	109,54	96,89
2.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	4,91
3.	Penerimaan dari Investasi Pemerintah Daerah	0	0	0	0	4,21

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah daerah (diolah)

Untuk realisasi sisa lebih perhitungan anggaran pemerintah daerah, dengan kurun waktu dua tahun terakhir (tahun 2014-2015) dapat terlihat pada Tabel 3.10:

Tabel 3.10
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Pemerintah Kab. Tasikmalaya Tahun 2014-2015

No.	Uraian	2014		2015	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	149.579.664.051,00	100,00	295.843.304.899,00	100,00
2.	Pelampauan penerimaan PAD	-	-	-	-
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	-	-	-
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya				
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-
7.	Pembiayaan Netto	146.338.129.005,00	97,83	305.343.304.899,00	103,21
8.	Kegiatan lanjutan	45.961.194.612,00	30,73	1.732.712.500,00	0,59

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah daerah (diolah)

Dari Tabel di atas terlihat bahwa selama 2 tahun terakhir (2014-2015), sebagai tahun rujukan yang dijadikan bahan laporan keuangan pemerintah daerah, adanya kecenderungan kenaikan SiLPA (Sisa Lebih Hasil Perhitungan Anggaran) pada setiap tahunnya. Merujuk pada ketentuan pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kondisi ini, sumber terjadinya SiLPA berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Pengelolaan keuangan yang berbasis kinerja menunjukkan bahwa serapan anggaran berbanding lurus dengan *output* kegiatan, dengan kata lain pengelolaan keuangan yang baik relatif menyerap anggaran dengan optimal dan juga meminimalisir kegiatan dan juga anggaran yang tidak diserap. *Output* pelaksanaan anggaran dapat memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat dengan demikian semakin cepat menyerap anggaran semakin pula memberikan dampak yang baik, kegiatan dan penyerapan anggaran yang ditunda akan menunda pula pemanfaatan anggaran bagi keberlangsungan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan, sehingga dengan demikian kedepan SiLPA diproyeksikan menurun sebagai indikasi dari lebih berkualitasnya pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 3.11.
Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran

No	Uraian	Data tahun dasar	Tingkat pertumbuhan	Proyeksi					
		(Rp)	(%)	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Saldo kas neraca daerah	295.843.304.899,00	-10	266.258.974.409,10	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	9.000.000.000,00	8.000.000.000,00	7.000.000.000,00
	Dikurangi:								
1.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan		0						
2.	Kegiatan lanjutan								
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	295.843.304.899,00	R	266.258.974.409,10	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	9.000.000.000,00	8.000.000.000,00	7.000.000.000,00

3.2. Kerangka Pendanaan

Pada bagian ini akan dijelaskan berkaitan dengan pengeluaran keuangan yang harus dilakukan pemerintah daerah, baik terkait dengan pembelanjaan pada katagori kewajiban maupun pengeluaran pembiayaan lainnya. Pengeluaran keuangan pemerintah daerah sepenuhnya mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana ketentuan normatifnya telah disampaikan dalam uraian sebelumnya.

3.2.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat

Pengeluaran periodik yang bersifat wajib dan mengikat pemerintah daerah yang dibebankan pada keuangan daerah tiga tahun terakhir pada tahun 2013-2015 dan pertumbuhannya, memperlihatkan kondisi seperti berikut :

Tabel 3.12
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Tahun 2013-2015

No	Uraian	2013	2014	2015	Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
A	Belanja Tidak Langsung	1.313.931.483.033,50	1.526.191.360.299,80	1.577.449.253.439,06	16,15
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.300.114.330.981,18	1.514.346.764.619,20	1.566.955.879.092,60	16,48
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4.493.600.000	4.498.350.000	4.161.100.000	0,00
3	Belanja Bunga				
4	Belanja bagi hasil	9.323.552.052,32	7.346.245.680,60	6.332.274.346,46	34,02
	Dst..				
B	Belanja Langsung	17.928.656.825	37.642.929.006	64.347.972.854	31,23
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.	8.213.874.683	28.134.542.636	40.910.046.868	31,23

No	Uraian	2013	2014	2015	Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	577.500.000	102.500.000	135.500.000	24,35
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	9.137.282.142	9.405.886.370	23.302.425.986	59,64
4	Belanja sewa gedung kantor(yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	0	0	0	0,00
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	0	0	0	0,00
	Dst ...				
C	Pembiayaan Pengeluaran	3.500.000.000,00	11.849.895.777,00	5.500.000.000,00	238,57
1	Pembentukan Dana Cadangan	0	10.000.000.000	0	0,00
2	Penyertaan Modal Daerah	3.500.000.000,00	1.849.895.777	5.500.000.000	66,37
	Dst...				
	TOTAL (A+B+C)	1.335.360.139.858,50	1.575.684.185.082,80	1.647.297.226.293,06	285,95

Sumber : Perda APBD Tahun 2013, Tahun 2014 dan Tahun 2015,diolah

3.2.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Setelah mengetengahkan kondisi pengelolaan keuangan daerah yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2015, sebagai kerangka keuangan yang telah dimasukkan dalam laporan keuangan daerah, selanjutnya akan digambarkan kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah hingga tahun 2021 mendatang (Tabel 3.13).

Trend tingkat pertumbuhan tidak dapat dipergunakan seutuhnya untuk memproyeksikan kebutuhan pendanaan, banyak faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan besaran pertumbuhan kedepan, diantaranya kondisi belanja wajib mengikat saat ini, kebijakan belanja wajib mengikat yang diperkirakan kedepan, proyeksi kebijakan struktur organisasi pemerintah daerah yang baru dan faktor-faktor lainnya. Asumsi belanja pegawai diproyeksikan tumbuh 6 % untuk memproyeksikan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kebijakan pemerintah pusat pada kurun waktu 3 tahun terakhir, apabila kebijakan ini berubah maka perubahan signifikan akan terjadi pada pos belanja pegawai. Pada sisi pengeluaran pembiayaan pos penyertaan modal tidak menggunakan proyeksi pertumbuhan tetapi berdasarkan rancangan Peraturan Daerah yang sedang dalam proses penyusunan dan memperhatikan kemungkinan kebijakan penyertaan modal kedepan. Sehingga proyeksi belanja wajib mengikat diproyeksikan sebagai berikut :

Tabel 3.13
 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat
 serta Prioritas Utama
 Pada Kurun Tahun 2016-2021

No	Uraian	Data Tahun Dasar Anggaran	Tingkat pertumbuhan	Proyeksi					
		(Rp)	(%)	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	Belanja TidakLangsung	1.577.449.253.439,06	8%	1.671.973.188.132,34	1.771.672.108.598,44	1.877.860.356.771,34	1.990.430.906.847,18	2.109.767.577.501,14	2.236.277.286.973,78
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.566.955.879.092,60	6%	1.660.973.231.838,16	1.760.631.625.748,45	1.866.269.523.293,35	1.978.245.694.690,95	2.096.940.436.372,41	2.222.756.862.554,75
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4.161.100.000,00	0%	4.161.100.000,00	4.161.100.000,00	4.161.100.000,00	4.161.100.000,00	4.161.100.000,00	4.161.100.000,00
3	Belanja Bunga								
4	Belanja bagi hasil	6.332.274.346,46	8%	6.838.856.294,18	6.879.382.849,99	7.429.733.477,99	8.024.112.156,23	8.666.041.128,73	9.359.324.419,03
B	Belanja Langsung	64.347.972.854,00	11%	74.167.927.046,62	77.556.794.377,69	89.577.481.764,25	103.758.407.790,15	120.514.569.672,89	140.342.771.658,21
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.	40.910.046.868,00	20%	49.092.056.241,60	50.728.458.116,32	60.874.149.739,58	73.048.979.687,50	87.658.775.625,00	105.190.530.750,00

No	Uraian	Data Tahun Dasar Anggaran	Tingkat pertumbuhan	Proyeksi					
		(Rp)	(%)	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	135.500.000,00	5%	142.275.000,00	149.388.750,00	156.858.187,50	164.701.096,88	172.936.151,72	181.582.959,30
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	23.302.425.986,00	7%	24.933.595.805,02	26.678.947.511,37	28.546.473.837,17	30.544.727.005,77	32.682.857.896,17	34.970.657.948,91
C	Pengeluaran Pembiayaan	5.500.000.000,00	0%	6.500.000.000,00	8.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	0%	-	-	-	-	-	-
2	Penyertaan Modal	5.500.000.000,00	R	6.500.000.000,00	8.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA		1.647.297.226.293,06	-	1.752.641.115.178,96	1.857.228.902.976,13	1.972.437.838.535,60	2.099.189.314.637,33	2.235.282.147.174,03	2.381.620.058.631,99

Sumber : DPPKAD

Untuk memproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, proyeksi pendapatan juga tidak dapat mempergunakan sepenuhnya trend pendapatan sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu, banyak faktor yang mempengaruhi kondisi pendapatan terlebih bahwa komponen pendapatan Kabupaten Tasikmalaya didominasi pendapatan dari pemerintah pusat dan provinsi, fluktuasi pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi dan lain sebagainya, selanjutnya tabel 3.13 di atas dijadikan bahan untuk dapat memproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk pendanaan pembangunan daerah 5 Tahun ke depan hingga berakhirnya masa berlaku RPJMD 2016-2021, sebagai berikut :

Tabel 3.14
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Tahun 2016 s.d 2021

No.	Uraian	Proyeksi					
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Pendapatan	3.200.874.605.869,00	3.328.909.590.103,76	3.462.065.973.707,91	3.600.548.612.656,23	3.744.570.557.162,48	3.894.353.379.448,97
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	266.258.974.409,10	20.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
	Total penerimaan	3.467.133.580.278,10	3.348.909.590.103,76	3.487.065.973.707,91	3.625.548.612.656,23	3.769.570.557.162,48	3.919.353.379.448,97
	Dikurangi:						
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	1.752.641.115.178,96	1.857.228.902.976,13	1.972.437.838.535,60	2.099.189.314.637,33	2.235.282.147.174,03	2.381.620.058.631,99
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.714.492.465.099,14	1.491.680.687.127,63	1.514.628.135.172,31	1.526.359.298.018,89	1.534.288.409.988,44	1.537.733.320.816,98

Kapasitas kemampuan keuangan riil tumbuh positif dengan besaran bervariasi setiap tahun, perhitungan ini berdasarkan agregat dari proyeksi pendapatan yang tumbuh positif yang dikurangi dengan komponen belanja wajib mengikat yang diproyeksikan tidak bisa menurun, besaran belanja wajib mengikat dimaksud didominasi oleh belanja pegawai dengan asumsi terdapat kebijakan pemerintah pusat untuk menaikkan gaji pegawai dan asumsi jumlah pegawai tetap (*zero growth*), di sisi lain proyeksi penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran diproyeksikan semakin menurun sebagai indikator meningkatnya kualitas penyerapan anggaran dan matangnya perencanaan.

Beberapa catatan dari proyeksi kapasitas kemampuan keuangan riil di atas adalah bahwa pendapatan yang tumbuh positif masih sangat bergantung kepada pemerintah pusat dan provinsi sehingga tercapai atau tidaknya di masa yang akan datang sangat bergantung pada kebijakan para pihak dimaksud, di sisi lain besaran tersebut belum

memperhitungkan SiLPA untuk kegiatan lanjutan yang berkontribusi besar terhadap belanja daerah dengan menambah jumlah pengeluaran pembiayaan daerah untuk menunjang pembangunan. Kapasitas kemampuan keuangan riil Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dapat semakin besar dengan cara meningkatkan pendapatan yang berdasarkan analisis di atas masih sangat tergantung pada pemerintah pusat serta kebijakan pengelolaan kelembagaan dan sumber daya manusia yang efektif dan efisien seperti dengan cara mengendalikan “populasi” pegawai.

Jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan yang ada tersebut merupakan modal pemerintah daerah dalam membiayai :

- a. Rencana alokasi prioritas utama, yakni yang berkaitan dengan kewajiban yang harus dialokasikan sebagai konsekuensi penganggaran dari pemerintah pusat dan/atau dana daerah urusan bersama. Contohnya pendamping DAK, pendamping bantuan keuangan yang dipersyaratkan dan lainnya
- b. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (*dedicated*) Kepala daerah seperti penguatan struktur ekonomi berbasis perdesaan, pembangunan infrastruktur perdesaan dan penanganan kemiskinan serta implementasi amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, seperti prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen) dari belanja daerah dan kesehatan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji serta Alokasi Dana Desa sebesar 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK. Selain itu program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, kegiatan yang memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Selain itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan program prioritas di tingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.
- d. Rencana alokasi pengeluaran prioritas III, yakni berkaitan dengan alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial, bantuan keuangan kepada desa. Pengalokasian dana pada prioritas

III baru akan dipenuhi setelah pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu.

Melihat proyeksi kapasitas riil keuangan daerah diatas maka terdapat sejumlah pertimbangan alokasi belanja ke depan, yaitu sebagai berikut :

1. Perlu adanya optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang didasarkan terhadap urutan prioritas.
2. Meningkatkan kemandirian dan kualitas desentralisasi fiskal khususnya desentralisasi pendapatan
3. Perlunya peningkatan keperansertaan sektor swasta dalam pendanaan pembangunan, baik melalui kemitraan pemerintah dan sector swasta (*public private partnership*) maupun potensi *corporate social responsibility* (CSR).

BAB IV

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini disajikan berbagai permasalahan pembangunan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang relevan dengan isu-isu strategis baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi kehidupan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar pemerintah daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan. Oleh karena itu perhatian kepada kondisi masyarakat dan lingkungan, baik terkait peluang dan permasalahan yang terjadi secara internal dan eksternal merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada 5 (lima) tahun mendatang. Isu-isu strategis adalah isu-isu yang jika diprioritaskan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Jika isu strategis ini tidak ditangani maka tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.

Analisis isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya. Analisa terhadap isu strategis merupakan proses pengayaan analisis lingkungan eksternal yang sangat menentukan dalam penyusunan sebuah rencana pembangunan jangka panjang suatu daerah. Dengan Identifikasi atas dinamika eksternal yang tepat, maka Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

diharapkan dapat menyelaraskan diri dalam menghadapi permasalahan, potensi kegagalan, dan peluang dalam menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atas pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pembangunan di daerah.

Dalam penerapan rencana pembangunan daerah, seringkali timbul “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan pembangunan yang direncanakan (RTRW, RPJMD atau RPJPD). Adanya gap tersebut juga dikarenakan oleh adanya perbedaan antara target pembangunan yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil daerah saat dokumen rencana sedang disusun. Permasalahan pembangunan daerah ini harus diidentifikasi sehingga dapat dicari solusinya, dalam rangka menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, perlu diidentifikasi permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan berbagai perkembangan dari tahun ke tahun. Dalam pencapaian keberhasilan pembangunan ini, tidak terlepas dari berbagai permasalahan di berbagai bidang. Permasalahan ini merupakan tantangan yang harus dikendalikan, diminimalkan dan diselesaikan, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.1.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Permasalahan pendidikan mencakup:

- 1) Masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah, sekitar 7,3 Tahun
- 2) Terbatasnya ketersediaan SMA/SMK/MA Negeri
- 3) Belum dipenuhinya kewajiban anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBD

- 4) Belum tersedianya BOS, BSM, Beasiswa berprestasi, Beasiswa transisi yang didanai dari APBD Kab Tasikmalaya
- 5) Tidak meratanya pendistribusian Guru
- 6) Rendahnya mutu dan tata kelola pendidikan dasar
- 7) Keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan menengah dan tinggi.

4.1.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Permasalahan bidang kesehatan, antara lain:

- 1) Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan sesuai dengan standard akreditasi nasional
- 2) Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) serta Balita Kurang Gizi di masyarakat.
- 3) Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidakmenular di masyarakat
- 4) Keterbatasan akses terhadap pelayanan rujukan (RS) bagi masyarakat di wilayah Tasikmalaya selatan
- 5) Keterbatasan fasilitas kesehatan yang melayani rawat inap dikarenakan jumlah tempat tidur yang kurang mencukupi kebutuhan pelayanan masyarakat sekitar 1.400 TT
- 6) Keterbatasan tenaga kesehatan terutama Dokter Spesialis di RSUD dan tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya
- 7) Rendahnya cakupan PHBS di tataran Rumah Tangga dan Tempat-tempat Umum
- 8) Belum optimalnya pengelolaan limbah medis dan non medis di puskesmas dan jaringannya
- 9) Belum optimalnya promosi kesehatan terutama masih rendahnya cakupan desa siaga aktif
- 10) Belum tersedianya RSUD yang representatif setingkat tipe B

4.1.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Bidang Pekerjaan Umum

- 1) Kondisi rusak berat sepanjang 156,609 km (12 persen), kondisi rusak sedang sepanjang 293,145 km (22,5% dan kondisi rusak ringan sepanjang 195,498 km (15%)
- 2) Belum tuntasnya infrastruktur jalan Ciawi-Singaparna
- 3) Sempitnya jalan menuju kawasan pusat pemerintahan
- 4) Terbatasnya aksesibilitas/keterhubungan dengan kabupaten/kota lain
- 5) Terbatasnya cakupan pelayanan jaringan jalan dan belum bisa mengimbangi pergerakan barang dan orang
- 6) Tidak memadainya kapasitas jalan menuju ibu kota Kabupaten Tasikmalaya (Singaparna)
- 7) Rendahnya kualitas jalan perdesaan
- 8) Masih banyak jembatan yang rusak dan belum terbangun

b. Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah

- 1) Belum adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan peraturan zonasi sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang
- 2) Belum meningkatnya status status hierarki struktur ruang Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) Ciawi dan (PKLp) Manonjaya menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) serta status PPK Rajapolah dan PPK Cikatomas menjadi PKLp
- 3) Belum terselesaikannya perwujudan ruang kawasan Ibu Kota dan kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya
- 4) Belum terpenuhinya kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 30% (persen) dari luas wilayah kota di Kabupaten Tasikmalaya
- 5) Belum terbangunnya pasar dan terminal di jalan Ciawi Singaparna
- 6) Belum optimalnya pengawasan pemanfaatan ruang
- 7) Belum adanya PPNS penataan ruang

c. Sub Bidang Air Bersih dan Air Minum

- 1) Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum oleh PDAM
- 2) Belum sesuai kapasitas terpasang dengan kapasitas produksi infrastruktur yang ada
- 3) Belum termanfaatkannya sumber-sumber air baku baru
- 4) Rendahnya persentase jumlah rumah yang menggunakan air bersih yang layak
- 5) Masih adanya wilayah rawan air bersih
- 6) Lemahnya perlindungan sumber mata air

d. Sub bidang Air Bawah Tanah

- 1) Masih besarnya potensi air bawah tanah yang belum diidentifikasi dan dimanfaatkan;
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana di bidang air bawah tanah;
- 3) Lemahnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air bawah tanah

e. Infrastruktur sumber daya air dan irigasi

- 1) Rusaknya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang disebabkan oleh terjadinya bencana alam dan penambangan pasir Galunggung
- 2) Rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam memelihara infrastruktur yang ada
- 3) Belum memadainya infrastruktur sumber daya air dan irigasi dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat
- 4) Belum optimalnya cakupan layanan pengairan bendung Padawaras

4.1.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- 1) Banyaknya permukiman di daerah rawan bencana
- 2) Masih banyaknya rumah tidak layak huni di perdesaan

- 3) Terbatasnya Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan permukiman
- 4) Lemahnya pengawasan dan pengendalian ketersediaan dan penyerahan PSU perumahan dan permukiman

4.1.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

- 1) Meningkatnya potensi konflik kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan
- 2) menurunnya wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara
- 3) Berkembangnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional, transnasional, dan kejahatan terhadap kekayaan Negara
- 4) Makin tinggi dan beragam tingkat kriminalitas di masyarakat
- 5) Partisipasi masyarakat dalam mendukung ketenteraman dan ketertiban makin menurun
- 6) Sosialisasi regulasi tentang ketenteraman dan ketertiban belum dapat dilaksanakan sampai tingkat bawah
- 7) Pelanggaran peraturan daerah makin meningkat
- 8) Keterbatasan jumlah anggota satpol PP dan PPNS
- 9) Belum optimalnya pembinaan Satuan LINMAS

4.1.6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

- 1) Kecenderungan peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- 2) Penanganan PMKS masih rendah karena terbatasnya sarana dan prasarana, sumberdaya manusia dan keberpihakan anggaran pemerintah untuk penanganan masalah-masalah sosial
- 3) Belum optimalnya pemberdayaan PSKS
- 4) Data PMKS dan penduduk miskin belum akurat dan aktual
- 5) Belum ada kebijakan pagu indikatif anggaran kemiskinan dan pronangkis sesuai karakteristik kemiskinan daerah
- 6) Belum adaya regulasi pemanfaatan CSR bagi PMKS dan penanggulangan kemiskinan
- 7) Lemahnya kelembagaan penanggulangan kemiskinan
- 8) Makin tingginya angka penderita HIV/AIDS

4.1.7. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan

- 1) Tingginya angka pengangguran terbuka, 6,5%
- 2) Terbatasnya kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana pelatihan serta terbatasnya paket kegiatan bimbingan usaha.
- 3) Rendahnya pembukaan lapangan kerja baru
- 4) Masih rendahnya keberpihakan APBD Kab untuk peningkatan keterampilan tenaga kerja agar lebih kompetitif di pasar kerja

4.1.8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Masih rendahnya pemberdayaan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- 2) Masih rendahnya peran serta perempuan dalam pembnagunan
- 3) Belum ada data terpilah dan terpadu berbasis gender
- 4) Terbatasnya akses terhadap kesempatan usaha, pendidikan, dan kesehatan bagi perempuan terutama perempuan kepala keluarga (PEKKA)
- 5) Makin meningkatnya jumlah dan jenis kasus KDRT, serta belum optimalnya peran lembaga sosial masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak
- 6) Belum tersedianya sekretariat P2TP2A dan rumah singgah untuk penanganan kasus
- 7) Belum terintegrasinya pengarusutamaan gender dalam pembangunan

4.1.9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

- 1) Harga pangan pokok strategis yang belum stabil terutama dalam masa paceklik dan panen raya
- 2) Rendahnya tingkat kemandirian pangan di desa kategori miskin dan Masih banyaknya penduduk yang rawan pangan Berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) Provinsi Jawa Barat, terdapat 31 Desa Rawan Pangan di Kabupaten Tasikmalaya
- 3) Masih terbatasnya fasilitasi lumbung pangan perdesaan
- 4) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal
- 5) Kurangnya keragaman pangan terlihat dari indikator Pola Pangan Harapan 61,5% dari nilai ideal 100%
- 6) Kurang maksimalnya kelembagaan ketahanan pangan karena keterbatasan kewenangan, tugas pokok dan fungsi
- 7) Rendahnya cadangan pangan pemerintah daerah

4.1.10. Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan

- 1) Makin sulit dan mahalnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum
- 2) Banyak tanah/lahan kosong terlantar tak termanfaatkan
- 3) Banyak tanah pemerintah daerah dan Desa yang belum tersertifikasi
- 4) Masih ada potensi sengketa dan konflik pertanahan

4.1.11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

1. Luas eksisting kawasan lindung masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam RTRW Propinsi Jawa Barat, yaitu 64,32 dari total luas wilayah
2. Degradasi sumber daya alam khususnya air dan lahan, yang ditandai dengan deplesi sumber air (air permukaan dan air bawah tanah, baik

kuantitas maupun kualitasnya), semakin meluasnya lahan kritis, penurunan produktifitas lahan, semakin meluasnya kerusakan hutan (terutama karena perambahan) baik hutan pegunungan maupun hutan pantai (mangrove).

3. Permasalahan Pencemaran yang meliputi pencemaran air, udara maupun tanah
4. Permasalahan Kawasan Pesisir dan Laut, degradasi lingkungan di kawasan pesisir disebabkan oleh fenomena alam seperti abrasi selain itu akibat ulah manusia seperti eksploitasi sumberdaya laut yang berlebihan dan penambangan pasir besi yang dilakukan di pesisir pantai telah menyebabkan perubahan tataguna lahan di kawasan pesisir dan kerusakan lahan di kawasan pesisir
5. Lemahnya fungsi pengendalian
6. Masih rendahnya tingkat kesadaran para pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup
7. Kurangnya sarana dan prasarana pengawasan lingkungan
8. Belum optimalnya implementasi dokumen lingkungan hidup dalam usaha dan/atau kegiatan
9. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan
10. Rendahnya kepemilikan jamban keluarga
11. Belum seimbangny penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik /rumah tangga dengan pertumbuhan penduduk;
12. Rendahnya kepedulian masyarakat dan swasta/dunia usaha terhadap bidang kesantiasian
13. Belum dimilikinya IPAL Komunal (system off site sanitation) dan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) di Kabupaten Tasikmalaya, untuk dapat melayani wilayah pusat kota dan kawasan perkotaan;
14. TPA Cinangsi sudah over kapasitas, dan masih menggunakan sistem open dumping
15. Cakupan pelayanan persampahan sampai saat ini baru melayani daerah-daerah yang termasuk wilayah perkotaan
16. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
17. Kurangnya pegawai yang mengelola persampahan
18. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan
19. Belum terbangunnya TPA Nangkaleah
20. Belum adanya TPST di wilayah pusat kegiatan lokal (PKL Karangnunggal, Ciawi, Manonjaya)
21. Belum adanya TPS di tiap kecamatan

4.1.12. Urusan Pemerintahan Bidang Adminisrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

- 1) Keterbatasan akses layanan dan tertib administrasi pengelolaan kependudukan dokumen kependudukan dan catatan sipil
- 2) Lemahnya data kependudukan
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan untuk pembangunan daerah

- 4) Tidak terintegrasinya pengelolaan pengendalian kependudukan dengan administrasi kependudukan
- 5) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data kependudukan dan catatan sipil
- 6) Belum tersedianya sarana dan prasarana mobilitas layanan kependudukan dan catatan sipil

4.1.13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Masih rendahnya sumber daya aparatur pemerintahan desa dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan desa
- 2) Terbatasnya tingkat kesejahteraan aparatur pemerintahan desa
- 3) Belum optimalnya peran lembaga desa dan lembaga masyarakat desa
- 4) Lemahnya lembaga ekonomi Desa
- 5) Masih terbatasnya prasarana dan sarana pendukung penyelenggaraan pemerintah desa
- 6) Masih terbatasnya infrastruktur dasar perdesaaan
- 7) Menurunnya nilai-nilai gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa
- 8) Belum dikembangkannya sistem informasi desa
- 9) Belum baiknya tata kelola pemerintahan desa
- 10) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan desa

4.1.14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Laju pertumbuhan penduduk masih harus dikendalikan
- 2) Keterbatasan ketersediaan alat kontrasepsi gratis bagi masyarakat miskin
- 3) Lemahnya data kependudukan
- 4) Keterbatasan tenaga penyuluh program KB
- 5) Rendahnya usia perkawinan pertama
- 6) Tidak terintegrasinya pengelolaan pengendalian kependudukan dengan administrasi kependudukan
- 7) Lemahnya institusi KB
- 8) Terbatasnya pembinaan ketahanan keluarga

4.1.15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

- 1) Masih banyak daerah yang belum terlayani trayek angkutan umum
- 2) Masih banyaknya pelanggaran terhadap aturan pembatasan tonase muat barang
- 3) Belum terlaksananya pembangunan terminal baru tipe B
- 4) Belum optimalnya pengelolaan sub terminal;
- 5) Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana lalu-lintas dan angkutan jalan;

- 6) Belum adanya trayek menuju lokasi-lokasi strategis seperti ke pusat pemerintahan;
- 7) Belum adanya perencanaan pengembangan perhubungan laut
- 8) Belum optimalnya rekayasa lalu lintas terutama di ibu kota Kabupaten.

4.1.16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

- 1) Terbatasnya cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi kabel
- 2) Terbatasnya akses dan kemampuan masyarakat menikmati layanan telekomunikasi nirkabel
- 3) Belum terintegrasinya layanan pemerintah berbasis teknologi informasi
- 4) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan E Government

4.1.17. Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Bidang Koperasi

- 1) Masih rendahnya kualitas/pengelolaan manajemen Koperasi
- 2) Masih rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian
- 3) Masih rendahnya Kualifikasi/kualitas SDM koperasi
- 4) Terbatasnya akses terhadap potensi pasar dan sumber produktif lainnya
- 5) Masih terbatasnya kemampuan akses permodalan
- 6) Rendahnya pemahaman tentang pentingnya penilaian kesehatan Koperasi simpan pinjam dan USP-Koperasi.

Bidang UKM

- 1) Masih kurangnya pemahaman tentang manajemen usaha
- 2) Masih rendahnya tingkat keterampilan pelaku UKM
- 3) Masih kurangnya inovasi dan penerapan TTG yang berdampak pada kemampuan daya saing produk
- 4) Kurangnya Diversifikasi dan tingkat kreatifitas desain produk
- 5) Terbatasnya anggaran untuk pembangunan bidang UKM
- 6) Belum terbangunnya rumah kemasan

4.1.18. Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal

- 1) Rendahnya investasi karena iklim investasi kurang kondusif
- 2) Belum semua kewenangan perizinan diselenggarakan secara terpadu
- 3) Kajian potensi dan peluang investasi yang dapat ditawarkan kepada investor masih terbatas.
- 4) Belum optimalnya kemitraan dengan KADIN
- 5) Kurangnya daya dukung regulasi dan kebijakan investasi
- 6) Lemahnya data dan informasi penanaman modal
- 7) Rendahnya promosi investasi penanaman modal

4.1.19. Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Pembinaan olah raga yang belum terpadu antara olahraga pendidikan di lingkungan persekolahan, olahraga rekreasi di lingkungan masyarakat, dan olah raga prestasi untuk kelompok atlet
- 2) Keterbatasan peran pemerintah daerah dalam proses penjarangan, panyaluran dan kompetisi atlet potensial secara berjenjang
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga
- 4) Rendahnya prestasi olah raga daerah pada kompetisi regional dan nasional
- 5) Tingginya tingkat pengangguran pemuda dengan keterampilan rendah
- 6) Tidak berjalannya pelayanan kepemudaan
- 7) Ketidakjelasan pengelolaan urusan pelayanan kepemudaan dan olah raga

4.1.20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

- 1) Belum tingginya kesadaran pentingnya data statistik
- 2) Rendahnya ketersediaan statistik sektoral yang dimiliki pemerintah daerah

4.1.21. Urusan Persandian

- 1) Belum dilaksanakannya penyeleggaraan urusan persandian
- 2) Belum dimilikinya pola persandian antar perangkat daerah

4.1.22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

- 1) Rendahnya ketahanan budaya masyarakat akibat imbas perubahan global
- 2) Belum optimalnya proses regenerasi dalam rangka pewarisan budaya daerah
- 3) Belum termanfaatkannya produk budaya sebagai potensi industri kreatif
- 4) Masih rendahnya sumber Daya Manusia yang kompeten dalam Bidang Kebudayaan

4.1.23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

- 1) Kurangnya minat dan budaya baca masyarakat
- 2) Keterbatasan sarana dan prasarana perpustakaan
- 3) Terbatasnya tenaga pengelola perpustakaan (Pustakawan)

4.1.24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

- 1) Keterbatasan sarana dan prasarana kearsipan
- 2) Terbatasnya tenaga pengelola kearsipan (Arsiparis)

4.1.25. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

- 1) Kurangnya armada penangkapan, alat tangkap serta alat bantu penangkapan
- 2) Rendahnya produksi hasil tangkap

- 3) Belum selesainya penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (Pangkalan Pendaratan Ikan/PPI)
- 4) Degradasi kualitas lingkungan pesisir yang mengakibatkan jumlah ikan di sekitar pesisir menurun drastis
- 5) Terbatasnya Kewenangan pengelolaan pesisir yang bukan lagi kewenangan Pemerintah Kabupaten akibat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 6) Rendahnya kesadaran Nelayan akan keselamatan pada saat melaut
- 7) Kurangnya diversifikasi usaha nelayan selain penangkapan ikan.
- 8) Berkurangnya kualitas, kuantitas, dan debit air di sentra perikanan air tawar
- 9) Masih rendahnya produktivitas perikanan budidaya air tawar, payau dan laut
- 10) Rendahnya kualitas induk ikan yang digunakan masyarakat pembenih ikan
- 11) Masih kurangnya sarana dan prasarana pembenihan ikan

4.1.26. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

- 1) Aksesibilitas, Fasilitas, Sarana dan Prasarana serta atraksi wisata yang belum optimal
- 2) Masih rendahnya minat pihak ke tiga untuk mengelola potensi pariwisata
- 3) Belum optimalnya strategi pemasaran pariwisata
- 4) Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata

4.1.27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

Bidang Pertanian

- 1) Keterbatasan Kepemilikan Lahan dengan rata-rata <0,25 Ha
- 2) Tingginya laju alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian terutama untuk sawah produktif yang beririgasi teknis.
- 3) Sektor pertanian bukan lagi pilihan utama sebagai sumber mata pencaharian
- 4) Penurunan kesuburan tanah akibat praktek pertanian intensif bertahun-tahun
- 5) Menurunnya kualitas infrastruktur pertanian terutama jaringan irigasi tersier
- 6) Input produksi pertanian relatif terbatas pada umumnya disebabkan masih lemahnya kemampuan finansial untuk pengembangan usaha
- 7) Penerapan teknologi tepat guna masih terbatas
- 8) Masih terbatasnya sarana dan prasarana panen dan pasca panen
- 9) Rendahnya kualitas dan nilai tambah produk yang dihasilkan
- 10) Kelembagaan kelompok tani belum mandiri
- 11) Berkurangnya sumber daya manusia pertanian (penyuluh yang berkurang karena masa pensiun sedangkan penggantinya tidak sebanding dengan jumlah penyuluh yang berkurang)

- 12) Belum diterapkannya pembangunan pertanian yang menerapkan sistem pertanian terpadu (*Integrated farming System*)/belum terintegrasinya tanaman dan ternak dalam penyediaan bahan pupuk organik
- 13) Masih kurangnya/lemahnya penelitian-penelitian yang berorientasi pada produk-produk unggulan pertanian/inovasi produk pertanian
- 14) Distribusi subsidi pupuk masih kurang lancar
- 15) Belum tersertifikasinya produk buah-buahan lokal
- 16) Sistem agribisnis dari sub sistem pemasaran masih lemah dan infrastruktur penunjang belum ada (terminal agribisnis)
- 17) Kawasan hortikultura baik sayuran maupun buah-buahan belum terkelola dengan baik
- 18) Nilai Tukar Petani (NTP) yang masih rendah (perhitungan NTP di BPS)
- 19) Masih lemahnya aspek permodalan (aspek sub sistem penyediaan jasa agribisnis masih lemah)
- 20) Belum konsistennya dan terbatasnya pelaksanaan sistem pertanian organik

Bidang Perkebunan

- 1) Masih rendahnya tingkat produktivitas perkebunan Harga jual komoditas perkebunan yang fluktuatif karena merupakan komoditas ekspor
- 2) Rendahnya nilai tambah komoditas perkebunan karena petani perkebunan rakyat sebagian besar menjual hasilnya dalam bentuk bahan mentah
- 3) Banyaknya lahan HGU yang habis izinnya tidak dimanfaatkan
- 4) Terbatasnya penggunaan bibit unggul/yang bersertifikat oleh masyarakat
- 5) Lemahnya pengendalian hama dan penyakit terpadu
- 6) Lemahnya pengawasan peredaran bibit tanaman dan mutu obat

Bidang Peternakan

- 1) Belum optimalnya manajemen pemeliharaan ternak yang dilakukan peternak sehingga mengakibatkan rendahnya produktivitas dan populasi ternak.
- 2) Kondisi rumah potong hewan, Pasar Hewan, Unit Perbibitan Ternak masih jauh dari memadai
- 3) Kurangnya sarana prasarana Pelayanan Kesehatan Hewan;
- 4) Terbatasnya jumlah tenaga teknis lapangan (Penyuluh, Medis Veteriner, dan Paramedis Veteriner);
- 5) Terbatasnya akses peternak terhadap permodalan;
- 6) Tingkat penyediaan ternak besar (sapi dan kerbau) belum bisa memenuhi kebutuhan yang disebabkan permintaan pasar semakin meningkat dan belum diimbangi dengan penambahan populasi.

- 7) Usaha ternak bersifat sambilan masih jauh dari skala ekonomi yang terlihat dari perbandingan kepemilikan ternak per peternak masih rendah;
- 8) Terbatasnya hijauan makanan ternak yang diakibatkan oleh terbatasnya lahan dan belum berjalanya teknologi pengawetan pakan ternak;
- 9) Masih rendahnya produk asal ternak yang memenuhi kriteria Aman, Sehat, Utuh, Halal

4.1.28. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

- 1) Laju deforestasi tidak seimbang jika dibandingkan dengan upaya rehabilitasi hutan dan lahan
- 2) Menurunnya sifat hidrologis tanah pada lahan kritis
- 3) Rendahnya pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan negara
- 4) Rusaknya sumber mata air karena penebangan pohon di sekitarnya
- 5) Nilai tambah komoditas kehutanan yang rendah karena dijual dalam bentuk barang mentah

4.1.29. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

- 1) Belum adanya penyesuaian Tugas Pokok dan Fungsi pengelola Sub-Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang disesuaikan dengan kewenangan Kabupaten
- 2) Tidak adanya kepastian hukum dan kepastian investasi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten sehingga pemrosesan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak dapat memberikan kejelasan dalam aspek persyaratan, prosedur, mekanisme dan waktu
- 3) Kerusakan lingkungan dan infrastruktur jalan akibat penambangan tanpa izin yang tidak terkendali
- 4) Belum adanya *masterplan* ataupun *grand design* arah pengelolaan kegiatan usaha pertambangan
- 5) Pengelolaan kegiatan pertambangan masih berorientasi terhadap penjualan *raw material*, sehingga tidak dapat memberikan nilai tambah
- 6) Pengangkutan hasil tambang masih menggunakan fasilitas jalan Kabupaten/Provinsi/Nasional yang berdampak terhadap kerusakan jalan
- 7) Belum adanya pelabuhan/terminal khusus pertambangan
- 8) Orientasi pelaku usaha pertambangan hanya pada penambangan bahan galian saja, tanpa memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan dan reklamasi lahan bekas tambang
- 9) Masih lemahnya penegakkan hukum (*law enforcement*)
- 10) Pengelolaan data pertambangan belum terintegrasi secara optimal, baik data potensi pertambangan, pelaku usaha pertambangan dan data lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan

- 11) Banyaknya lahan bekas penambangan yang belum dilakukan reklamasi
- 12) Cakupan elektrifikasi baru mencapai 71,38 %
- 13) Masih terbatasnya penyediaan sumber-sumber energi alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) mikro hidro dan biogas
- 14) Masih ada kampung yang belum terjangkau aliran listrik
- 15) Belum adanya data kebutuhan energi

4.1.30. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

- 1) Belum terbentuknya lembaga kemetrolgian
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan sistem resi gudang (SRG)
- 3) Belum terbentuknya badan penyelesaian sengketa konsumen
- 4) Belum terbentuknya pasar terbib ukur
- 5) Masih kurangnya kualitas produk unggulan yang berdaya saing
- 6) Belum adanya pasar induk kabupaten
- 7) Kurangnya fasilitas HAKI
- 8) Masih kurangnya fasilitas pemerintah daerah dalam perdagangan ekspor
- 9) Kurangnya promosi dan misi dagang ke LN dalam rangka persaingan MEA
- 10) Belum ada penataan dan pemberdayaan PKL

4.1.31. Urusan Pemerintahan Bidang Industri

- 1) Masih Rendahnya struktur industri dan pemberdayaan IKM untuk dapat mendorong sektor ekonomi daerah
- 2) Belum optimalnya kemampuan desain dan packaging produk
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana bagi sentra-sentra industri
- 4) Belum memadainya peralatan produksi dan keterbatasan bahan baku
- 5) Akses teknologi terbatas

4.1.32. Urusan Penunjang

Bidang Penelitian dan Pengembangan

- 1) Penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah dengan berbasis penelitian belum optimal.
- 2) Pemanfaatan Iptek dan TI di masyarakat masih kurang.
- 3) Fasilitas, sarana, dan prasarana fisik dan non fisik bagi pengembangan penelitian baik ilmu dasar maupun ilmu terapan sesuai dengan perkembangan teknologi global guna mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi dan daya saing daerah masih belum optimal.
- 4) Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah belum berjalan

Bidang Kebencanaan

- 1) Belum adanya pemetaan resiko bencana
- 2) Masih sedikit desa menjadi desa tangguh bencana
- 3) Belum terwujudnya keterpaduan antar instansi pemerintah maupun dengan lembaga lainnya, dalam menindaklanjuti penanggulangan bencana, baik pada tahapan pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- 4) Belum optimalnya keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya dalam penanggulangan bencana;
- 5) Belum dimilikinya secara keseluruhan dokumen rencana kontingensi untuk semua jenis bencana yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya
- 6) Keterbatasan sarana prasarana penanggulangan bencana
- 7) Keterbatasan sarana dan prasarana serta personil kebakaran

Bidang Keagamaan

- 1) Belum optimalnya peran lembaga-lembaga keagamaan dalam kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat
- 2) Belum optimalnya pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran zakat profesi
- 3) Kecenderungan menurunnya pendidikan keagamaan terutama di lingkungan keluarga
- 4) Belum optimalnya upaya peningkatan kesejahteraan bagi guru madrasah diniyah

Bidang Politik

- 1) Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik
- 2) Kecenderungan penurunan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum
- 3) Partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan publik masih rendah
- 4) Belum optimalnya proses pendidikan politik kepada masyarakat
- 5) Keberpihakan anggaran pendidikan politik masih rendah
- 6) Proses politik makin mahal
- 7) Maraknya politik uang
- 8) Kurang berjalannya fungsi representasi lembaga perwakilan rakyat

Bidang Hukum

- 1) Belum adanya *grand design* tentang pembuatan program legislasi daerah
- 2) Belum ada integrasi antara kebijakan dan regulasi/regulasi kurang mendukung kebijakan
- 3) Kurang dan rendahnya kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia di bidang hukum
- 4) Masih rendahnya budaya hukum masyarakat
- 5) Rendahnya produk hukum daerah

Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik

- 1) Kelembagaan OPD masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efektif dan efisien, sehingga struktur organisasi belum tepat fungsi dan tepat ukuran
- 2) Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja.
- 3) Masih rendahnya sarana dan prasarana pemerintahan
- 4) Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi pegawai dan proporsional
- 5) Reformasi birokrasi belum optimal
- 6) Masih rendahnya disiplin aparatur
- 7) Belum optimalnya tata laksana/sistem kerja
- 8) Belum optimal dan proporsionalnya pemberian tunjangan kinerja
- 9) Belum memiliki sarana dan prasarana pengembangan aparatur
- 10) Cakupan peserta Diklat masih kecil, 5% dari total pegawai per tahun
- 11) Kekurangan pegawai untuk formasi tertentu

Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1) Inkonsistensi perencanaan dan penganggaran
- 2) Lemahnya data dan informasi pembangunan
- 3) Perencanaan pembangunan belum terintegrasi berbasis teknologi informasi
- 4) Masih rendahnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Bidang Keuangan Daerah

- 1) PAD rendah sehingga ketergantungan terhadap dana transfer masih tinggi
- 2) Masih adanya aset yang belum tersertifikasi
- 3) Sebagian aset belum dimanfaatkan dengan optimal sebagai sumber pendapatan
- 4) Belum proporsionalnya belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 5) Terbatasnya personalia pengelola keuangan daerah dengan latar belakang pendidikan akuntansi
- 6) Terbatasnya pemutakhiran penilaian objek pajak secara massal.

4.2. Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, isu strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya signifikan bagi daerah. Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal

tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi/hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Mengingat permasalahan pembangunan sangat banyak seperti disebutkan di atas, untuk menentukan permasalahan yang akan dijadikan bahan isu strategis perlu terlebih dahulu diidentifikasi isu global, nasional, regional, dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini.

Selanjutnya, sesuai perintah Permendagri No. 54 Tahun 2010, maka dilakukan metode FGD dan pembobotan sekaligus skoring untuk beberapa isu strategis yang dipilih, sehingga diperoleh urutan isu strategis berdasarkan penghitungan tersebut. Adapun isu strategis yang terpilih secara berturut-turut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Kerangka Keterkaitan Isu Strategis

Isu Strategis			
Dinamika Global	Dinamika Nasional Nawa Cita	Dinamika Regional (Jawa Barat)	Isu Strategis Kabupaten Tasikmalaya
<p>I. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs):</p> <ol style="list-style-type: none"> Menghapus kemiskinan. Menghapus kelaparan dan mewujudkan pertanian yang berkelanjutan. Kesehatan untuk semua umur. Pendidikan yang berkualitas dan merata. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan remaja perempuan. Ketersediaan air minum dan sanitasi untuk 	<ol style="list-style-type: none"> Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 	<p>Tujuan Inti Pembangunan Jawa Barat (<i>Common Goals</i>) dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas Pendidikan Peningkatan Kualitas Kesehatan Peningkatan Daya Beli Masyarakat Kemandirian Pangan Peningkatan Kinerja Aparatur Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kemandirian Energi dan Kecukupan Air Baku Penanganan Bencana dan Pengendalian 	<ol style="list-style-type: none"> Penanggulangan kemiskinan Mutu dan tata kelola pendidikan dasar Kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis Perluasan tenaga kerja dan pengangguran Ketahanan Pangan Pertumbuhan dan persebaran penduduk Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Pembangunan

Isu Strategis			
Dinamika Global	Dinamika Nasional Nawa Cita	Dinamika Regional (Jawa Barat)	Isu Strategis Kabupaten Tasikmalaya
<p>semua.</p> <p>7. Energi untuk semua.</p> <p>8. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan lapangan kerja yang layak.</p> <p>9. Infrastruktur yang kuat dan industrialisasi yang berkelanjutan.</p> <p>10. Menurunkan ketimpangan.</p> <p>11. Kota dan hunian yang inklusif, aman dan berkelanjutan.</p> <p>12. Pola konsumsi dan produksi yang Berkelanjutan.</p> <p>13. Melawan perubahan iklim dan dampaknya</p> <p>14. Konservasi pemanfaatan laut, pesisir dan laut dalam.</p> <p>15. Melindungi dan merestorasi ekosistem, dan perlindungan hutan.</p> <p>16. Masyarakat yang damai, tanpa kekerasan, pemerintahan yang akuntabel, antikorupsi dan non-diskriminasi.</p> <p>17. Kerja sama internasional yang semakin kuat.</p>	<p>4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.</p> <p>5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.</p> <p>6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.</p> <p>7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.</p> <p>8. Melakukan revolusi karakter/mental bangsa.</p> <p>9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.</p>	<p>Lingkungan Hidup</p> <p>9. Pembangunan Perdesaan</p> <p>10. Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata</p>	<p>Infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan</p> <p>10. Penataan Ruang dan Pemanfaatan SDA yang Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan</p> <p>11. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat</p> <p>12. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</p> <p>13. Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan yang Baik dan Efektif</p> <p>14. Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM</p> <p>15. Pengembangan destinasi dan arus kunjungan wisatawan</p> <p>16. Alih fungsi lahan pertanian</p> <p>17. Nilai tambah dan daya saing produk pertanian</p> <p>18. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan, perlindungan perempuan dan anak</p>

Isu Strategis			
Dinamika Global	Dinamika Nasional Nawa Cita	Dinamika Regional (Jawa Barat)	Isu Strategis Kabupaten Tasikmalaya
II. Pemberlakuan ASEAN <i>Economic Community</i> , ditandai: 1. arus bebas barang bagi negara-negara ASEAN; 2. arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi; 3. arus tenaga kerja terampil; dan 4. arus bebas modal.			

BAB V

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016–2021, merupakan penjabaran dari Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Berdasarkan RPJPD, RPJMD tahun 2016-2021 merupakan tahap ke-3 yang diprioritaskan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan manusia (IPM), meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, menurunnya proporsi penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dan terkendalinya laju Pertumbuhan Penduduk.

5.1. Visi

Berdasarkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016–2021 adalah:

“KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, DINAMIS, DAN BERDAYA SAING DI BIDANG AGRIBISNIS BERBASIS PERDESAAN”

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya tersebut adalah sebagai berikut:

Religius/Islami

Religius Islami berasal dari dua kata “Religius” dan “Islami”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religius *adalah* bersifat religi; bersifat keagamaan; yang bersangkutan-paut dengan religi. Religi merupakan kata serapan dari kata *religion* (bahasa Inggris) yang berasal dari bahasa latin *religio* yang berarti *obligation/bond* (kewajiban), *reverence* (menghormati, memuja, mentakzamkan), dan berakar dari kata *religare* yang artinya *to bind* (mengikat).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religi dipadankan dengan agama yang berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, **religius** bisa diartikan sebagai sikap hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai manifestasi dari keterikatan, kewajiban, dan pemujaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Islami dalam KBBI adalah bersifat ke-Islam-an. Secara etimologis (asal-usul kata, lughawi) kata “Islam” berasal dari kata *aslama* yang berakar dari kata *salama*. Ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asal katanya, Islam memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah : 1) ‘Salm’ (السَّلْمُ) yang berarti damai; 2) Berasal dari kata ‘aslama’ (أَسْلَمَ) yang berarti menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat terhadap “Sang Khaliq”; 3) Saliim’ (سَلِيمٌ) yang berarti bersih dan suci; 4) Salam’ (سَلَامٌ) yang berarti selamat dan sejahtera. Islam merupakan agama yang kehadirannya ditengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun semesta (*Rahmatan lil ‘alamin*).

Jika diintegrasikan dalam satu frasa, **Religius/Islami** merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (*equality*), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek **Religius/Islami** dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan (*al-hukma*), peradaban dalam hubungan antar warga (*al-nubuwwah*), kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.

Kalimat “**Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami**” sebagaimana terumuskan dalam “**visi**” dimaksud adalah menjadikan spirit kehidupan beragama Islam menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan membangun hubungan sosial kemasyarakatan. Nilai-nilai Islam yang universal menjadi landasan dan nafas penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

Dinamis

Dinamis adalah semangat untuk mampu mengikuti perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi serta senantiasa berubah ke arah yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan daerah.

Berdaya Saing di bidang Agribisnis:

Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah.

Berdaya saing di bidang agribisnis bermakna kemampuan untuk menciptakan nilai tambah untuk mencapai keunggulan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang agribisnis. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Dengan berdaya saing diharapkan memiliki keunggulan kompetitif dengan berbasis agro produksi, agro industri dan agro teknologi.

Berbasis Perdesaan

Kabupaten Tasikmalaya merupakan wilayah dengan mayoritas berciri perdesaan. Sangat logis apabila perencanaan pembangunan disusun berdasarkan potensi dan keunggulan yang ada di perdesaan. Berbasis perdesaan mengandung pengertian bahwa pembangunan dilakukan berdasarkan pada dua paradigma utama yaitu, Membangun Desa dan Desa Membangun yang diarahkan pada pencapaian Desa yang maju, sejahtera dan demokratis.

Berbasis perdesaan bermakna pula Keberdayaan Masyarakat Perdesaan yaitu meningkatnya derajat kesanggupan-kemampuan warga di kawasan perdesaan yang ditandai dengan: terpenuhinya kebutuhan dasar (*basic needs*); peningkatan penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber daya yang diperlukan; meningkatnya kesadaran akan berbagai potensi, kekuatan dan

kelemahan diri dan lingkungannya; serta meningkatnya kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas.

5.2. Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut.

Misi Pertama, Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlakulkarimah dan Berkualitas.

Hal ini untuk menciptakan sosok masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang agamis, berkarakter/berahlaq mulia, sehat, cerdas, berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki spirit untuk maju dan berkompetisi.

Misi Kedua, Mewujudkan perekonomian yang tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata.

Menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata berbasis ekonomi pertanian dan keunggulan pariwisata yang terintegrasi, mampu menarik investasi daerah, menyerap tenaga kerja dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Misi Ketiga, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*). Penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi spirit *shiddiq, tablig, amanah dan fathonah* guna menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel, dan terpercaya dalam melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme aparatur, efektivitas pelayanan publik, menguatnya partisipasi dan kepuasan publik.

Misi Keempat, meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan.

Menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang mampu menyediakan ruang dan infrastruktur dasar yang memadai dan berkualitas serta selaras dengan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah, konektivitas antar wilayah di Kabupaten Tasikmalaya dan daerah lain.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Guna mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi tersebut.

Tujuan (*goal*) adalah pernyataan-pernyataan yang merupakan penjabaran atau implementasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Sasaran (*objective*) adalah penjabaran dari tujuan, yaitu merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks berikut:

Tabel 5.1

Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021

Visi: “Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/Islami, Dinamis, dan Berdaya Saing di Bidang Agribisnis Berbasis Perdesaan”

Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlaqul-karimah dan Berkualitas.	Meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera.	1. Meningkatnya nilai-nilai empati dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sosial
		2. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan
		3. Tuntasnya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan terlaksananya rintisan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun

Misi	Tujuan	Sasaran
		<p>4. Meningkatnya mutu manajemen tata kelola pendidikan</p> <p>5. Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan bagi anak usia dini dan pendidikan luar sekolah yang merata, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat</p> <p>6. Meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>7. Menurunnya angka putus sekolah terutama peserta didik kurang mampu</p> <p>8. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan inklusif</p> <p>9. Meningkatnya kreativitas siswa di semua jenjang pendidikan</p>
		<p>10. Meningkatnya kemampuan dan budaya baca masyarakat</p> <p>11. Meningkatnya derajat kesehatan keluarga dan gizi masyarakat</p> <p>12. Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dalam penyehatan lingkungan</p> <p>13. Meningkatnya akses dan pemerataan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan</p> <p>14. Meningkatnya pembiayaan kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakat miskin</p> <p>15. Meningkatnya pemenuhan ketersediaan dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan serta sistem informasi kesehatan</p>
		<p>16. Meningkatnya perlindungan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, anak dan masyarakat resiko tinggi</p> <p>17. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk</p> <p>18. Terkendalinya persebaran penduduk</p>

Misi	Tujuan	Sasaran
		19. Tertibnya pengelolaan administrasi kependudukan dan meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan (Akta, KK, KTP)
		20. Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan perlindungan anak
		21. Meningkatnya kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
		22. Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan kesempatan kerja
		23. Meningkatnya daya saing dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah
		24. Meningkatnya prestasi bidang olah raga
		25. Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah
		26. Meningkatnya kualitas hidup penyandang disabilitas dan lanjut usia
		27. Meningkatnya kesejahteraan penduduk miskin
Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berbasis integrasi keunggulan agribisnis daya saing agribisnis dan pariwisata	1. Meningkatnya Kesejahteraan Petani
		2. Meningkatnya produksi dan daya saing produksi usaha pertanian dan perikanan
		3. Meningkatnya kemampuan SDM Masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha
		4. Meningkatnya kemitraan, peran dan kontribusi lembaga perekonomian
		5. Meningkatnya iklim investasi dan daya saing bisnis daerah
		6. Meningkatnya jumlah dan peran UMKM dan koperasi
		7. Meningkatnya ketersediaan sarana dan

Misi	Tujuan	Sasaran
		<p>prasarana perdagangan yang memadai dan terjangkau</p> <p>8. Meningkatnya industri produk pertanian</p> <p>9. Meningkatnya kontribusi BUMD terhadap peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat</p> <p>10. Berkembangnya pusat pertumbuhan perekonomian</p> <p>11. Berkembangnya sektor pariwisata yang terintegrasi dengan pertanian</p> <p>12. Meningkatnya ketahanan pangan berbasis potensi pangan lokal</p>
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik (<i>Good Governance</i>)	Meningkatnya efektivitas pelayanan, kepercayaan dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan	<p>1. Tertatanya kelembagaan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien, serta meningkatkan pelayanan publik</p> <p>2. Tersedianya produk hukum daerah yang memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan</p> <p>3. Meningkatnya kinerja dan kepercayaan publik kepada DPRD</p> <p>4. Terwujudnya keselarasan hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya</p> <p>5. Terwujudnya pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan</p> <p>6. Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan yang memadai</p>

Misi	Tujuan	Sasaran
		<p>7. Terwujudnya sistem informasi manajemen pemerintahan yang modern dan meningkatnya transparansi publik</p> <p>8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas hasil penelitian dan pemanfaatan IPTEK dalam penyelenggaraan pemerintahan</p> <p>9. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang baik dan berkeadilan</p>
		<p>10. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel</p> <p>11. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintahan</p> <p>12. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN</p> <p>13. Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat</p> <p>14. Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis dan meningkatnya partisipasi masyarakat</p> <p>15. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan masyarakat desa yang sejahtera</p> <p>16. Tersedianya data informasi pembangunan daerah</p>
Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang yang berkelanjutan	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah untuk meningkatkan daya saing daerah dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan dan penataan ruang terpadu	<p>1. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah dan layanan dasar</p> <p>2. Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman perkotaan dan perdesaan</p> <p>3. Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan</p>

Misi	Tujuan	Sasaran
		4. Terciptanya masyarakat tangguh bencana dan terwujudnya penanggulangan bencana yang terencana, dan terpadu.
		5. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini memuat strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, serta arah kebijakan setiap strategi yang dipilih sebagai rumusan perencanaan yang komprehensif untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dengan efektif dan efisien untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan secara sistematis strategi dan arah kebijakan. Dengan adanya strategi yang kemudian diikuti dengan arah kebijakan yang tepat, maka pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya dalam lima tahun ke depan diharapkan akan memiliki fokus yang jelas, terarah dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi merupakan satu kunci penting untuk pencapaian tujuan dalam perencanaan pembangunan daerah karena memuat langkah-langkah yang berisikan Program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan merupakan pedoman yang mengarahkan Rumusan Strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun periode RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021. Arah kebijakan akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi yang akan menjadi fokus penanganan permasalahan yang hendak diselesaikan dalam setiap tahunnya setiap periode tahunan selama lima tahun sehingga memiliki kesinambungan untuk setiap periode dalam tujuan dan sasaran sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan.

Strategi dan Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2016-2021

Misi 1: Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlakul-karimah dan Berkualitas.

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya nilai-nilai empati dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sosial	Peningkatan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menanamkan nilai empati dan kepedulian sosial	Melakukan integrasi dalam pengembangan pendidikan agama dan keagamaan semua jenjang pendidikan formal, pengembangan kapasitas BAZDA dan lembaga ekonomi sosial keagamaan, meningkatkan kesadaran zakat profesi dan pemberdayaan fakir miskin, mualaf.
2	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan	Peningkatan peran pemerintah daerah dalam pelayanan keagamaan	Melakukan fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji; bantuan pembangunan sarana dan prasarana keagamaan; bantuan kesejahteraan ajengan, guru diniyah, amil, serta membangun Islamic Center.
3	Tuntasnya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan terlaksananya rintisan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun	Penyelenggaraan pendidikan dasar yang terjangkau dan bermutu dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan menengah	Menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan merintis wajib belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana serta kapasitas pendidikan dasar, menengah dan pesantren;
4	Meningkatnya mutu manajemen tata kelola pendidikan	Peningkatan jumlah sekolah terakreditasi dan nilai akreditasi sekolah	Melakukan peningkatan pemenuhan SPM dan fasilitasi terhadap pelaksanaan akreditasi sekolah jenjang SD dan SMP
5	Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan bagi anak usia dini dan pendidikan luar sekolah yang merata, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat	Penyelenggaraan PAUD dan PLS	Membantu peningkatan ketersediaan PAUD dan lembaga penyelenggara PLS di setiap Desa
6	Meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan	Menyelenggarakan pengembangan kompetensi, fasilitasi penyelenggaraan UKG, fasilitasi pengelolaan sertifikasi guru

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
7	Menurunnya angka putus sekolah terutama peserta didik kurang mampu	Penyediaan bantuan anggaran untuk peserta didik kurang mampu dan berprestasi	Melakukan pendataan peserta didik kurang mampu yang rawan drop out dan pemberian beasiswa bagi peserta didik miskin dan berprestasi
8	Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan inklusif	Pengingterasian dan pengembangan pendidikan inklusif	Meningkatkan jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, pemerataan dan peningkatan mutu PLB dan berkebutuhan khusus
9	Meningkatnya kreativitas siswa di semua jenjang pendidikan	Penyelenggaraan event dan pengeiriman delegasi siswa dalam setiap kompetisi	Melakukan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi bantuan keikutsertaan serta pemberian penghargaan.
10	Meningkatnya kemampuan dan budaya baca masyarakat	Penyediaan perpustakaan dan peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan berbasis Teknologi Informasi	Menyediakan buku/bahan bacaan yang sesuai minat dan kebutuhan baca masyarakat; membangun perpustakaan yang terintegrasi dengan taman bermain di setiap wilayah.
11	Meningkatnya derajat kesehatan keluarga dan gizi masyarakat	Peningkatan pola hidup sehat dan kesadaran terhadap pemenuhan gizi	Melakukan sosialisasi dan pendidikan gizi bagi masyarakat, pengembangan dokter keluarga.
12	Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dalam penyehatan lingkungan	Pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan	Melakukan pelatihan, sosialisasi dan partisipasi masyarakat, dalam penyehatan lingkungan
13	Meningkatnya akses dan pemerataan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana, tenaga medis dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Melakukan peningkatan status RSUD/Puskesmas, pemenuhan SPM; pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, gangguan mental serta gizi masyarakat
14	Meningkatnya pembiayaan kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakat miskin	Peningkatan anggaran dan cakupan penerima jaminan kesehatan	Meningkatkan peran dan fungsi UPCPK, menyediakan bantuan pembiayaan, peningkatan cakupan jaminan kesehatan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
15	Meningkatnya pemenuhan ketersediaan dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan serta sistem informasi kesehatan	Peningkatan mutu manajemen pelayanan, regulasi dan Teknologi Informasi kesehatan	Melakukan peningkatan kapasitas manajemen pelayanan, survey mutu layanan, dan pemanfaatan TI Kesehatan
16	Meningkatnya perlindungan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, anak dan masyarakat resiko tinggi	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, mendekatkan jarak layanan, peningkatan kesadaran ibu hamil, melahirkan dan masyarakat resiko tinggi.	Meningkatkan kapasitas tenaga medis, menambah sarana prasarana, melakukan sosialisasi dan pendampingan.
17	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Peningkatan kepesertaan KB dan kualitas Peserta KB	Menyediakan KB gratis bagi warga miskin, sosialisasi dan pendidikan KB bagi PUS
18	Terkendalnya persebaran penduduk	Pemerataan wilayah pertumbuhan pembangunan, pengendalian urbanisasi dan pendidikan transmigrasi.	Mengembangkan wilayah pertumbuhan baru, peningkatan minat, kemampuan dan kemandirian calon transmigran
19	Tertibnya pengelolaan administrasi kependudukan dan meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan (Akta, KK, KTP)	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan pemanfaatan TI, sosialisasi kepemilikan dokumen kependudukan dan melakukan pelayanan prima
20	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan perlindungan anak	Peningkatan keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan lembaga publik, peningkatan kesadaran kesetaraan gender dalam pembangunan dan perlindungan terhadap anak	Meningkatkan pendidikan politik perempuan, partisipasi dan akses perempuan dalam pembangunan dan terlindunginya anak

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
21	Meningkatnya kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Peningkatan pemberdayaan dan cakupan penanganan PMKS	Melakukan pelatihan, pendampingan dan kemampuan penanganan PMKS
22	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan kesempatan kerja	Peningkatan kompetensi dan daya saing, informasi dan akses ketenagakerjaan, peningkatan pelayanan ketenagakerjaan dan perlindungan serta pengawasan ketenagakerjaan	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, memperluas informasi dan akses ketenagakerjaan, pendampingan penempatan kerja, perlindungan hak-hak pekerja, pengawasan ketenagakerjaan
23	Meningkatnya daya saing dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah	Peningkatan keterlibatan pemuda, kompetensi pemuda dan pemberdayaan OKP	Melakukan peningkatan kompetensi kewirausahaan, membuka akses keterlibatan, memfasilitasi kegiatan OKP
24	Meningkatnya prestasi bidang olah raga	Peningkatan sarana dan prasarana, pembiayaan dan pembinaan prestasi olah raga	Menyelenggarakan event kompetisi, membangun SOR, memberikan penghargaan atlet dan pembina olah raga berprestasi.
25	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Pengembangan event kebudayaan yang terintegrasi dengan wisata, pengembangan nilai dan pelestarian budaya lokal	Mendata dan menetapkan status cagar budaya, menyelenggarakan event budaya dan tradisi
26	Meningkatnya kualitas hidup penyandang disabilitas dan lanjut usia	Peningkatan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dan lansia	Meningkatkan kompetensi, mewujudkan kabupaten ramah anak, disabilitas dan lansia
27	Meningkatnya kesejahteraan penduduk miskin	Peningkatan perlindungan sosial, pemberdayaan akses permodalan bagi RTS	Menyediakan program perlindungan sosial, pemberdayaan peningkatan efektivitas kelembagaan TKPK dan modal sosial masyarakat

Misi 2: Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata.

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Peningkatan akses permodalan, sarana dan prasarana pertanian, kompetensi petani	Meningkatkan kemampuan modal, keterampilan dan sarana prasarana pertanian
2	Meningkatnya produksi dan daya saing produksi usaha pertanian dan perikanan	Peningkatan produksi, produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan	Meningkatkan keterampilan, efisiensi produksi, produktivitas dan daya saing produk usaha pertanian dan pertanian
3	Meningkatnya kemampuan SDM Masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha	Peningkatan kompetensi dan keterampilan pelaku ekonomi serta kemitraan antar pelaku usaha	Meningkatkan daya saing pelaku usaha, kewirausahaan dan profesionalisme pelaku ekonomi.
4	Meningkatnya kemitraan, peran dan kontribusi lembaga perekonomian	Penguatan jejaring antara pelaku dan lembaga perekonomian	Melakukan fasilitasi kerja sama dan kemitraan antar pelaku perekonomian
5	Meningkatnya iklim investasi dan daya saing bisnis daerah	Peningkatan daya saing daerah	Meningkatkan pelayanan perijinan investasi, pengembangan infrastruktur, penyesuaian penataan ruang, penataan regulasi
6	Meningkatnya jumlah dan peran koperasi dan UMKM	Peningkatan profesionalisme pengelolaan koperasi dan UMKM.	Menyediakan fasilitasi pelatihan dan pendampingan, kemudahan perijinan dan akses fasilitasi permodalan
7	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang memadai dan terjangkau	Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana perdagangan	Membangun sarana dan prasarana perdagangan, peningkatan profesionalisme pengelolaan pasar dan pembinaan pedagang.
8	Meningkatnya industri produk pertanian	Peningkatan peran sektor industri yang mendukung pertanian	Menata ruang untuk pengembangan industri, meningkatkan kemampuan, mutu manajemen industri yang mendukung pertanian

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
9	Meningkatnya kontribusi BUMD terhadap peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan profesionalisme pengelolaan BUMD	Meningkatkan kemampuan permodalan, mutu manajemen, pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD
10	Berkembangnya pusat pertumbuhan perekonomian	Meningkatkan kawasan pusat pertumbuhan perekonomian baru	Pengembangan wilayah/kawasan pertumbuhan perekonomian
11	Berkembangnya sektor pariwisata yang terintegrasi dengan pertanian	Pengembangan sektor pariwisata yang terintegrasi dengan pertanian dan perdesaan	Meningkatkan jumlah tujuan wisata, mengembangkan destinasi wisata yang ada, meningkatkan kompetensi pelaku pariwisata dan mengembangkan desa wisata
12	Meningkatnya ketahanan pangan berbasis potensi pangan lokal	Peningkatan ketersediaan, keragaman dan keamanan pangan	Menambah stok, mengembangkan keragaman konsumsi dan menjaga keamanan pangan masyarakat.

Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*good governance*)

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Tertatanya kelembagaan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien, serta meningkatkan pelayanan publik	Penataan kelembagaan OPD berdasarkan kewenangan dan kebutuhan daerah	Menyusun dan menetapkan urusan, kewenangan, SOTK, standar pelayanan
2	Tersedianya produk hukum daerah yang memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Penataan prosedur dan produk hukum daerah	Meningkatkan kompetensi penyusun, kualitas proses penyusunan, kualitas, penyebarluasan produk hukum daerah, pendayagunaan TI untuk dalam pembentukan produk hukum daerah
3	Meningkatnya kinerja dan kepercayaan publik kepada DPRD	Peningkatan kapasitas, fungsi dan peran DPRD	Meningkatkan intensitas hubungan DPRD dan konstituen, membuka ruang konsultasi publik dan meningkatkan kompetensi anggota DPRD.
4	Terwujudnya keselarasan hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya	Penguatan kerjasama, kemitraan dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya serta pengembangan daerah otonom baru	Mengadakan kerjasama peningkatan wilayah perbatasan, penguatan koordinasi dan konsultasi
5	Terwujudnya pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan pengelolaan dan penyelamatan dokumen/arsip daerah	Mendayagunakan teknologi untuk penyelamatan arsip daerah, meningkatkan sarana dan prasarana kearsipan.
6	Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan yang memadai	Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan	Menuntaskan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan, merehabilitasi kantor kecamatan dan desa
7	Terwujudnya sistem informasi manajemen pemerintahan yang modern dan meningkatnya transparansi publik	Pendayagunaan teknologi informasi dan peningkatan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Memanfaatkan sistem informasi, dan membuka informasi dan mempermudah pelayanan penyelenggaraan pemerintahan
8	Meningkatnya kuantitas dan kualitas hasil	Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan	Menjajaki kebutuhan, mengembangkan kebijakan berbasis penelitian menunjang

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	penelitian dan pemanfaatan IPTEK dalam penyelenggaraan pemerintahan	IPTEK sebagai bahan masukan kebijakan	penyelenggaraan pemerintahan
9	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang baik dan berkeadilan	Peningkatan proses partisipasi dan kualitas perencanaan daerah serta publikasi perencanaan daerah	Membuka ruang partisipasi formal, informal dan berbasis TI, menjaga efektivitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah.
10	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Peningkatan tata kelola keuangan dan pemanfaatan aset daerah	Memperbesar belanja layanan publik strategis, mempertahankan WTP, meningkatkan kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD
11	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintahan	Peningkatan kompetensi, kesejahteraan dan etika aparatur pemerintahan	Mewujudkan aparatur yang profesional, melayani dan dipercaya publik
12	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN	Pencegahan KKN melalui efektivitas pengawasan internal, penguatan sistem dan kultur aparatur	Meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik kepada pemerintah
13	Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Peningkatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Menegakkan peraturan daerah dan peraturan Bupati, pelibatan LINMAS, peningkatan deteksi dini, menjalin kemitraan dengan APH dan masyarakat
14	Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis dan meningkatnya partisipasi masyarakat	Peningkatan pendidikan dan partisipasi politik masyarakat serta wawasan kebangsaan yang selaras dengan nilai keagamaan dan budaya	Menumbuhkan kehidupan politik yang demokratis dan meningkatnya kepercayaan dan partisipasi publik
15	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan masyarakat desa yang sejahtera	Perbaikan tata kelola, peningkatan pelayanan desa	Meningkatkan kompetensi, kesejahteraan dan pelayanan pemerintahan desa terhadap masyarakat
16	Tersedianya data informasi pembangunan daerah	Penyelenggaraan Kabupaten Tasikmalaya Satu Data	Melakukan integrasi data informasi pembangunan daerah

Misi 4: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan.

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah dan layanan dasar	Peningkatan jaringan irigasi, sumber daya air, dan perhubungan serta penerangan	Menyediakan dan meningkatkan infrastruktur yang memadai dan aman untuk menunjang pertanian, lalu lintas orang dan barang
2	Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman perkotaan dan perdesaan	Peningkatan ketersediaan PSU Perumahan dan permukiman perkotaan dan perdesaan	Terpenuhinya standar perumahan dan permukiman yang layak, aman dan nyaman
3	Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan	Perwujudan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang konsisten dan terpadu	Terciptanya ruang yang terpadu dan berkelanjutan dan sesuai kondisi dan kebutuhan pengembangan daerah
4	Terciptanya masyarakat tangguh bencana dan terwujudnya penanggulangan bencana yang terencana, dan terpadu.	Peningkatan pengurangan resiko bencana dan mitigasi bencana	Berkurangnya resiko bencana dan meningkatnya daya tahan masyarakat menghadapi bencana
5	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Terjaganya kelestarian lingkungan hidup

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. Kebijakan Umum Daerah

Berdasarkan strategi pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya, dirumuskan kebijakan umum dan program-program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan, dalam rangka mencapai target kinerja tujuan dan sasaran yang direncanakan untuk lima tahun ke depan.

Perumusan kebijakan umum dan program-program prioritas Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Merumuskan kebijakan umum yang akan dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, secara garis besar terdapat empat hal yang diperhatikan, yaitu (1) Kebijakan dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan; (2) Operasionalisasi aparatur dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai; (3) Upaya-upaya yang mengungkit/mendorong kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan sumber daya manusia, sistem dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah; dan (4) upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan Daerah.

Lebih spesifik, kebijakan umum Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021 diarahkan untuk:

1. Melaksanakan program unggulan yang menjadi tema utama (*dedicated*) pembangunan Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021;
2. Melaksanakan program-program dalam mendukung pencapaian target Nasional (SDGs, dan Nawacita serta Common Goal Jawa Barat);

3. Penanganan bencana secara terpadu dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mengutamakan mitigasi bencana serta peningkatan kerjasama lintas SKPD;
4. Melaksanakan optimalisasi penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD;
5. Mengembangkan industri kreatif pariwisata berbasis event (ekonomi, olahraga, seni dan budaya) dan berbasis alam, serta Desa Wisata
6. Fasilitasi pembentukan Kabupaten Tasikmalaya Selatan; dan
7. Mewujudkan desa yang maju, sejahtera dan demokratis melalui paradigma Desa membangun dan membangun Desa (Gerbang Desa).

7.2. Kebijakan Kewilayahan

Kebijakan kewilayahan adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah, oleh karena itu kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Tasikmalaya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021 tidak terlepas dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi:

1. pemantapan lahan sawah beririgasi serta meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian;
2. pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan fungsinya;
3. pengelolaan wilayah pesisir dan laut dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumberdaya, dan kegiatan pembangunan berkelanjutan;
4. pengembangan sistem perkotaan – perdesaan;
5. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah;
6. optimalisasi potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam yang mendorong pertumbuhan sosial ekonomi pada wilayah belum berkembang;
7. pengembangan kawasan permukiman perkotaan dengan mempertimbangkan keserasian, keseimbangan, dan pembangunan berkelanjutan; dan
8. peningkatan fungsi kawasan kepentingan pertahanan dan keamanan.

Kebijakan kewilayahan untuk 5 (lima) tahun ke depan diarahkan untuk peningkatan daya saing daerah melalui kebijakan:

1. melakukan revisi terhadap dokumen RTRTW untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah dan masyarakat.
2. meningkatkan konektivitas antar wilayah dan antar daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten dan Kota lain.
3. meningkatkan pembangunan infrastruktur strategis dan infrastruktur di wilayah perbatasan.

Khusus untuk mewujudkan kawasan strategis pusat pemerintahan ibukota kabupaten dan menunjang pertumbuhan, perkembangan serta memperkuat dan memperlancar mobilitas, aksesibilitas pergerakan orang maupun barang dari dan ke wilayah Ibukota, direncanakan beberapa prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2016-2021 meliputi kegiatan :

1. Pembuatan Bangunan Pelengkap Jalan
2. Penuntasan Pembangunan Gedung Kantor
3. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau/Taman
4. Pembangunan Utilitas
 - a. Jaringan Air Bersih
 - b. Jaringan Listrik
 - c. Jaringan Telepon
 - d. Jaringan drainase perkotaan
 - e. Jaringan teknologi komunikasi dan informasi

7.3. Kebijakan Pendanaan Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Tasikmalaya dalam lima tahun ke depan, maka kebijakan pendanaan pembangunan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan anggaran berorientasikan pada program-program upaya pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia, melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif pada pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan bidang penunjang lain, dengan memenuhi terlebih dahulu kebutuhan dasar pemerintah daerah seperti belanja gaji serta belanja tetap.

2. Mengimplementasikan amanat konstitusi dan kebijakan nasional yang harus dilaksanakan oleh daerah seperti prioritas bidang pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dan bidang kesehatan sebesar 10 % (sepuluh persen) secara bertahap.
3. Alokasi belanja langsung diprioritaskan untuk program Tasik SIAP.
4. Konsistensi pengembangan agribisnis melalui alokasi belanja langsung untuk bidang agribisnis dan pariwisata
5. Pengembangan aktivitas ekonomi dan agribisnis, maka pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan, pengairan dan listrik, akan diarahkan pada sentra-sentra produksi di perdesaan. Proporsi belanja langsung untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur ini sebesar minimal 18 % dari total belanja langsung.
6. Memberikan perhatian khusus kepada 10 kecamatan yang mempunyai nilai IPM terendah untuk memperoleh prioritas pendanaan atau program pembangunan.

7.4. Program Prioritas Bupati: TASIK SIAP

Pada fase ketiga pencapaian RPJPD Tahun 2005-2025 yang sarasannya menjadikan Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah yang berdaya saing, maka Bupati dan Wakil Bupati mengusung program prioritas yang dikemas dalam jargon TASIK SIAP. TASIK SIAP mengandung spirit kesiapan kepemimpinan dan semua pemangku kepentingan untuk memastikan terpenuhinya kewajiban pemerintah daerah kepada masyarakat dan dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan daerah. TASIK SIAP terdiri atas:

1. SIAP 1: Memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan dasar.
2. SIAP 2: Menjadikan sumberdaya manusia berahlaq dan berkualitas.
3. SIAP 3: Berdaya saing di bidang agribisnis, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif.
4. SIAP 4: Mendayagunakan teknologi informasi.
5. SIAP 5: Menjamin kemudahan investasi.

7.5. Program Pembangunan Daerah

Selain program prioritas TASIK SIAP, secara lebih detail untuk pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, mengusung beberapa program pembangunan daerah berdasarkan urusan daerah yang dikelompokkan berdasarkan misi. Program pembangunan daerah tersebut sebagaimana dilihat pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1.

Program Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021

Misi Pertama : Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlakulkarimah dan Berkualitas.

No.	Strategi	Program Prioritas	SKPD Penanggungjawab Urusan
1	Peningkatan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menanamkan nilai empati dan kepedulian sosial	1. Program Peningkatan Kepedulian sosial dan peran Lembaga Keagamaan 2. Program Peningkatan Kepedulian sosial dan peran Lembaga Keagamaan	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
2	Peningkatan peran pemerintah daerah dalam pelayanan keagamaan	1. Program Peningkatan Kepedulian sosial dan peran Lembaga Keagamaan 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan	
3	Penyelenggaraan pendidikan dasar yang terjangkau dan bermutu dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan menengah	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	Urusan Pendidikan
4	Peningkatan jumlah sekolah terakreditasi dan nilai akreditasi sekolah	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	
5	Penyelenggaraan PAUD dan PLS	Program pendidikan anak usia dini	
6	Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan	Program peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan	
7	Penyediaan bantuan anggaran untuk peserta didik kurang mampu dan berprestasi	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	

No.	Strategi	Program Prioritas	SKPD Penanggungjawab Urusan
8	Peningterasian dan pengembangan pendidikan inklusif	1. Program pendidikan inklusif 2. Program pendidikan luar biasa	Urusan Pendidikan
9	Penyelenggaraan event dan pengeiriman delegasi siswa dalam setiap kompetisi	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	
10	Penyediaan perpustakaan dan peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan berbasis Teknologi Informasi	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Urusan Perpustakaan
11	Peningkatan pola hidup sehat dan kesadaran terhadap pemenuhan gizi	Program perbaikan gizi masyarakat	Urusan Kesehatan
12	Pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	
13	Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana, tenaga medis dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	1. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 3. Program obat dan perbekalan kesehatan 4. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	
14	Peningkatan anggaran dan cakupan penerima jaminan kesehatan masyarakat miskin	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	

No.	Strategi	Program Prioritas	SKPD Penanggungjawab Urusan
15	Peningkatan mutu manajemen pelayanan, regulasi dan Teknologi Informasi kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 	Urusan Kesehatan
16	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, mendekatkan jarak layanan, peningkatan kesadaran ibu hamil, melahirkan dan masyarakat resiko tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 2. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 3. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 4. Program pelayanan kesehatan lanjut usia 	
17	Peningkatan kepesertaan KB dan kualitas Peserta KB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program KB 2. Program pelayanan kontrasepsi 3. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
18	Pemerataan wilayah pertumbuhan pembangunan, pengendalian urbanisasi dan pendidikan transmigrasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 2. Program Transmigrasi Lokal 3. Program Transmigrasi Regional 	Urusan Transmigrasi
19	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis Teknologi Informasi	Program penataan administrasi kependudukan	Urusan Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
20	Peningkatan keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan lembaga publik, peningkatan kesadaran kesetaraan gender dalam pembangunan dan perlindungan terhadap anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 2. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 3. Program peningkatan kualitas hidup dan 	Urusan pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak

No.	Strategi	Program Prioritas	SKPD Penanggungjawab Urusan
		perlindungan perempuan 4. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 5. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	
21	Peningkatan pemberdayaan dan cakupan penanganan PMKS	1. Program pemberdayana fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil, dan PMKS 2. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 3. Program pembinaan anak terlantar 4. Program pembinaan eks penyakit sosial 5. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 6. Program Keluarga Harapan	Urusan sosial
22	Peningkatan kompetensi dan daya saing, informasi dan akses ketenagakerjaan, peningkatan pelayanan ketenagakerjaan dan perlindungan serta pengawasan ketenagakerjaan	1. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 2. Program peningkatan kesempatan kerja 3. Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Urusan tenaga kerja
23	Peningkatan keterlibatan pemuda, kompetensi pemuda dan pemberdayaan OKP	1. Program peningkatan peran serta kepemudaan 2. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Urusan pemuda dan olahraga

No.	Strategi	Program Prioritas	SKPD Penanggungjawab Urusan
24	Peningkatan sarana dan prasarana, pembiayaan dan pembinaan prestasi olah raga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 2. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga 	
25	Pengembangan event kebudayaan yang terintegrasi dengan wisata, pengembangan nilai dan pelestarian budaya lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengembangan nilai budaya 2. Program pengelolaan kekayaan budaya 3. Program pengelolaan keragaman budaya 4. Program pengembangan kerja sama pengelolaan kekayaan budaya 	Urusan kebudayaan
26	Peningkatan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dan lansia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 2. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo 	Urusan sosial
27	Peningkatan perlindungan sosial, pemberdayaan akses permodalan bagi RTS	Program koordinasi penanggulangan kemiskinan	Urusan Sosial

Misi Kedua : Mewujudkan perekonomian yang tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata.

No.	Strategi	Program Prioritas	SKPD Penanggungjawab Urusan
1	Peningkatan akses permodalan, sarana dan prasarana pertanian, kompetensi petani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan kesejahteraan petani 2. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan 3. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan 	Urusan pertanian
2	Peningkatan produksi, produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan, perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan 	Urusan pertanian

No.	Strategi	Program Prioritas	SKPD Penanggungjawab Urusan
		2. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan 3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan 4. Program peningkatan produksi hasil peternakan 5. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 6. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 7. Program pengembangan budidaya perikanan 8. Program pengembangan perikanan tangkap	Urusan Kelautan dan Perikanan
3	Peningkatan kompetensi dan keterampilan pelaku ekonomi serta kemitraan antar pelaku usaha	1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Urusan Koperasi dan KUKM
4	Penguatan jejaring antara pelaku dan lembaga perekonomian	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Urusan Koperasi dan KUKM
5	Peningkatan daya saing dan investasi daerah	1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 2. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Urusan penanaman modal
6	Peningkatan profesionalisme pengelolaan koperasi dan UMKM.	1. Program penciptaan iklim usaha kecil yang kondusif 2. Program kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Urusan Koperasi dan KUKM

No.	Strategi	Program Prioritas	SKPD Penanggungjawab Urusan
		3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 4. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	
7	Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan pembinaan pedagang	1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 2. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Urusan perdagangan
8	Peningkatan peran sektor industri yang mendukung pertanian	1. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 2. Program peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi 3. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 4. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Urusan industri
9	Peningkatan profesionalisme pengelolaan BUMD	1. Program penyertaan modal 2. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Urusan penanaman modal
10	Meningkatkan kawasan pusat pertumbuhan perekonomian baru	Pengembangan wilayah/kawasan pertumbuhan perekonomian	Aspek Perencanaan
11	Pengembangan sektor pariwisata yang terintegrasi dengan pertanian dan perdesaan	1. Program pengembangan Desa Wisata 2. Program pengembangan destinasi pariwisata 3. Program pengembangan kemitraan	Urusan pariwisata

No.	Strategi	Program Prioritas	SKPD Penanggungjawab Urusan
		4. Program pengembangan pemasaran pariwisata	
12	Peningkatan ketersediaan, keragaman dan keamanan pangan	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	Urusan pangan

Misi Ketiga : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*).

No.	Strategi	Program Prioritas	SKPD Penanggungjawab Urusan
1	Penataan kelembagaan OPD berdasarkan kewenangan dan kebutuhan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program penataan OPD 2. Program penataan ketatalaksanaan 3. Program peningkatan pelayanan publik 4. Program peningkatan kinerja perangkat daerah 5. Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD 6. Pemantauan, pengevaluasian, serta pelaporan pembangunan daerah 7. Program peningkatan sistem pelaporan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah 	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
2	Penataan prosedur dan produk hukum daerah	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
3	Peningkatan kapasitas, fungsi dan peran DPRD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 2. Program pengawasan 	SKPD yang menangani Kesekretariatan DPRD
4	Penguatan kerjasama, kemitraan dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya serta pengembangan daerah otonom baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 2. Program penataan daerah otonom baru 	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah

No.	Strategi	Program Prioritas	SKPD Penanggungjawab Urusan
5	Peningkatan pengelolaan dan penyelamatan dokumen/arsip daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peneraparan e-digitalisasi arsip 2. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 3. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 4. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 5. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 	Urusan kearsipan
6	Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pembangunan kantor pemerintah 2. Program peningkatan sarana dan prasarana pemerintah 	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
7	Pendayagunaan teknologi informasi dan peningkatan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 2. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 3. Program kerjasama informasi dan media massa 4. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 5. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 	Urusan Komunikasi Dan Informatika
8	Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan IPTEK sebagai bahan masukan kebijakan	Program Pengkajian Penggalian Pembangunan Khazanah Potensi Daerah	SKPD yang menangani Penelitian dan Pengembangan

No.	Strategi	Program Prioritas	SKPD Penanggungjawab Urusan
9	Peningkatan proses partisipasi dan kualitas perencanaan daerah serta publikasi perencanaan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program perencanaan pembangunan daerah 2. Program Kerjasama Pembangunan 	Aspek perencanaan
10	Peningkatan tata kelola keuangan dan pemanfaatan aset daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2. Program peningkatan dan pengembangan pendapatan daerah 3. Program optimalisasi pengelolaan aset daerah 4. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 	SKPD yang menangani Keuangan
11	Peningkatan kompetensi, kesejahteraan dan etika aparatur pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 2. Program Pendidikan Kedinasan 3. Program pembinaan aparatur 4. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 	SKPD yang menangani Kepegawaian
12	Pencegahan KKN melalui efektivitas pengawasan internal, penguatan sistem dan kultur aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 2. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 4. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi informasi 	SKPD yang menangani Pengawasan

No.	Strategi	Program Prioritas	SKPD Penanggungjawab Urusan
		5. Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD 6. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	
13	Peningkatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	1. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 2. Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
14	Peningkatan pendidikan dan partisipasi politik masyarakat serta wawasan kebangsaan yang selaras dengan nilai keagamaan dan budaya	1. Program pengembangan wawasan kebangsaan 2. Program pendidikan politik masyarakat	
15	Perbaikan tata kelola, peningkatan pelayanan desa	1. Program pengembangan ekonomi perdesaan 2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa 3. Program peningkatan kapasitas aparaturng desa 4. Program peningkatan kerjasama antar desa dan pemberdayaan BKAD 5. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 6. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 7. Program peningkatan kerjasama antar desa dan pemberdayaan BKAD	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Strategi	Program Prioritas	SKPD Penanggungjawab Urusan
16	Penyelenggaraan Kabupaten Tasikmalaya Satu Data	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Urusan statistik

Misi Keempat : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan.

No.	Strategi	Program Prioritas	SKPD Penanggungjawab Urusan
1	Peningkatan jaringan irigasi, sumber daya air, dan perhubungan serta penerangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pembangunan jalan dan jembatan 2. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya 3. Program pengembangan&pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 4. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 5. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 6. Program pembangunan infrastruktur perdesaan 7. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 	Urusan Pekerjaan Umum dan penataan ruang
2	Peningkatan ketersediaan PSU Perumahan dan permukiman perkotaan dan perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengembangan perumahan 2. Program lingkungan sehat perumahan 	Urusan perumahan rakyat dan permukiman
3	Perwujudan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang konsisten dan terpadu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program perencanaan tata ruang 2. Program pemanfaatan tata ruang 3. Program pengendalian pemanfaatan ruang 	Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

No.	Strategi	Program Prioritas	SKPD Penanggungjawab Urusan
4	Peningkatan pengurangan resiko bencana dan mitigasi bencana	Program tanggap dan penanggulangan bencana	Urusan sosial
5	Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 2. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 3. Program perlindungan dan konservasi SDA 4. Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH 5. Program peningkatan pengendalian polusi 6. Program pengelolaan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut 	Urusan Lingkungan Hidup

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program prioritas dipisahkan pula menjadi dua yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional pada periode berikutnya.

Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan di dalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan kepentingan untuk diselenggarakannya sangat tinggi.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala SKPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan.

Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategis, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Sehingga adanya suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan.

Tabel 8.1.
Indikasi Rencana Program dan Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021

No.	Bidang Urusan Pemerintahan	Keterkaitan dengan Misi	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Akhir RPJMD	SKPD Penanggungjawab
						Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
A	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																		
1	Pendidikan																		
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Misi 1	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	59.25	62	7,695,475,000	65	7,695,475,000	68	7,867,975,000	71	7,917,975,000	75	8,080,475,000	80	8,130,475,000	80.00	SKPD yang menangani urusan pendidikan
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun						108,305,590,000		109,783,976,300		112,900,683,626		116,646,982,299		119,053,390,944		119,266,241,503		SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD-MI-Sederajat	%	100.12	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100.00	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD-MI-Sederajat	%	100.02	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100.00	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP-MTs Sederajat	%	98.54	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100.00	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP-MTs Sederajat	%	97.68	99	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100.00	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	Rasio Ketersediaan SD/MI terhadap Penduduk Usia 7 -12	-	150.27	165	-	182	-	200	-	220	-	242	-	266	-	266.21	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	Rasio Ketersediaan SMP/MTs terhadap Penduduk Usia 13-15	-	191.31	210	-	231	-	255	-	280	-	308	-	339	-	338.92	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	Rasio Guru SD-MI terhadap Murid SD-MI	-	16.65	18	-	20	-	22	-	24	-	27	-	29	-	29.50	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	Rasio Guru SMP-MTs terhadap Murid SMP-MTs	-	12.58	14	-	15	-	17	-	18	-	20	-	22	-	22.29	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	Rasio Rombel/Guru SDMI	-	1.48	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1.00	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	Sekolah Pendidikan SD Kondisi Bangunan Baik	%	69.27	79	-	81	-	83	-	85	-	87	-	89	-	89.27	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	Sekolah Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik	%	84.22	94	-	94	-	94	-	94	-	94	-	94	-	94.27	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	Angka Putus Sekolah (DO) SD-MI	%	0.000080	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.000020	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	Angka Putus Sekolah (DO) SMP-MTs	%	0.000140	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.000050	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	Angka Lulusan (AL) SDMI	%	100.00	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100.00	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	Angka Lulusan (AL) SMP-MTs	%	100.00	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100.00	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD-MI ke SMP-MTs	%	98.65	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100.00	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	% SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32 siswa	%	56.11	60	-	70	-	80	-	90	-	100	-	100	-	100.00	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	% SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa	%	81.59	85	-	90	-	95	-	100	-	100	-	100	-	100.00	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	% SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel	%	15.70	30	-	45	-	60	-	75	-	90	-	100	-	100.00	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	% SMP yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel	%	29.29	40	-	55	-	70	-	85	-	100	-	100	-	100.00	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	% SD yang memiliki Ruang Guru Lengkap	%	19.10	30	-	45	-	60	-	75	-	90	-	100	-	100.00	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	% SMP yang memiliki ruang guru dan meja + kursi untuk setiap orang	%	26.78	30	-	47	-	64	-	81	-	98	-	100	-	100.00	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	% SMP yang memiliki ruang Kepala Sekolah dan dilengkapi meja kursi	%	31.80	40	-	60	-	80	-	100	-	100	-	100	-	100.00	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	% SD yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik	%	85.86	87	-	90	-	93	-	96	-	99	-	100	-	100.00	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	% SD yang memiliki 6 orang guru	%	51.06	55	-	63	-	71	-	79	-	87	-	95	-	95.00	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	% SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran	%	47.28	50	-	55	-	60	-	65	-	70	-	75	-	75.00	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	% SD yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D4	%	97.34	98	-	99	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100.00	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	% SD yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	%	96.42	98	-	99	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100.00	SKPD yang menangani urusan pendidikan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan	Keterkaitan dengan Misi	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Akhir RPJMD	SKPD Penanggungjawab
						Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
		Misi 1	% SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 ≥ 70%	%	97.91	98	-	99	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100.00	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	% guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35%	%	81.59	83	-	88	-	93	-	98	-	100	-	100	-	100.00	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	% Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat	%	93.76	95	-	96	-	97	-	98	-	100	-	100	-	100.00	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	% Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan	%	65.69	70	-	80	-	90	-	100	-	100	-	100	-	100.00	SKPD yang menangani urusan pendidikan
	Program Pendidikan Menengah						23,125,250,000				27,166,930,000		26,982,303,600		26,908,384,672		24,147,187,365		SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA-SMK-MA Paket C	%	65.19	67	-	69	26,557,250,000	71	-	73	-	75	-	77	-	77.19	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA-SMK-MA Paket C	%	68.88	71	-	73	-	75	-	77	-	79	-	81	-	82.88	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	Rasio Ketersediaan SMA-SMK-MA terhadap Penduduk Usia 16-18 Tahun	%	28.51	30	-	31	-	33	-	35	-	36	-	38	-	38.21	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	Rasio Guru SMA-SMK/MA / Murid SMA-SMKMA	%	13.34	15	-	16	-	18	-	20	-	21	-	20	-	20.00	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	Sekolah Pendidikan SMA-SMK Kondisi Bangunan Baik	%	91.71	94	-	96	-	98	-	99	-	100	-	100	-	100.00	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	Angka Putus Sekolah (DO) SMA-SMK-MA	%	1.18	1	-	1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.03	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	Angka Lulusan (AL) SMA-SMK-MA	%	100.00	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100.00	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP-MTs ke SMASMK-MA	%	80.00	82	-	84	-	86	-	88	-	90	-	92	-	92.00	SKPD yang menangani urusan pendidikan
	Program Pendidikan Non Formal						6,837,800,000		6,837,800,000		6,837,800,000		6,837,800,000		6,837,800,000		6,837,800,000		SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	Angka Melek Huruf (AMH)	%	99.25	99	-	99	-	99	-	99	-	99	-	99	-	99.32	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7.25	7	-	7	-	7	-	7	-	7	-	7	-	7.37	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	Jumlah PKBM Aktif	PKBM	109	110	-	111	-	112	-	113	-	114	-	115	-	115	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	Jumlah Warga Belajar Paket A	PKBM		1,000	-	1,000	-	1,000	-	1,000	-	1,000	-	1,000	-	1,000	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	Jumlah Warga Belajar Paket B	Wb	2200	3,000	-	3,000	-	3,000	-	3,000	-	3,000	-	3,000	-	3,000	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	Jumlah Warga Belajar Paket C	Wb	2010	3,500	-	3,500	-	3,500	-	3,500	-	3,500	-	3,500	-	3,500	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	Jumlah Lembaga Kursus	Lembaga	91	95	-	96	-	97	-	98	-	99	-	100	-	100.00	SKPD yang menangani urusan pendidikan
	Program Pendidikan Inklusif																		SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	Jumlah sekolah yang menerapkan program inklusif	Sekolah	4	39	410,000,000	39	663,500,000	78	663,500,000	78	917,000,000	117	917,000,000	117	1,151,000,000	117	SKPD yang menangani urusan pendidikan
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	82.13	85	623,900,000	87	623,900,000	89	623,900,000	91	623,900,000	93	623,900,000	95	623,900,000	95.00	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) bagi tenaga Pendidik	%	5.27	7	-	37	-	67	-	97	-	100	-	100	-	100.00	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	Guru yang Memenuhi Sertifikasi Jabatan Guru	%	49.59	55	-	60	-	65	-	70	-	75	-	80	-	80.00	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)	%	40.1	50	-	55	-	60	-	65	-	70	-	75	-	75.00	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	Nilai Rata - Rata Ujian Nasional (US/UM) :				-		-		-		-		-		-		SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	SD - MI		7.69	8	-	8	-	8	-	8	-	8	-	8	-	8.00	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	SMP - MTs		5.75	6	-	6	-	6	-	7	-	7	-	7	-	7.00	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	SMA - SMK/ MA		6.18	6	-	7	-	7	-	7	-	7	-	7	-	7.38	SKPD yang menangani urusan pendidikan
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan																		SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi Pendidikan	Dok	1	1	623,900,000	1	623,900,000	1	623,900,000	1	623,900,000	1	623,900,000	1	623,900,000	1	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	Prosentase SD/MI yang menerapkan prinsip - prinsip MBS (Managemen Berbasis Sekolah)	%	90.46	92	-	94	-	96	-	98	-	99	-	100	-	100.00	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	Prosentase SMP/MTs yang menerapkan prinsip - prinsip MBS (Managemen Berbasis Sekolah)	%	83.37	85	-	87	-	89	-	91	-	92	-	100	-	100.00	SKPD yang menangani urusan pendidikan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan	Keterkaitan dengan Misi	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Akhir RPJMD	SKPD Penanggungjawab
						Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
		Misi 1	Prosentase SMA/SMK/MA/MAK yang menerapkan prinsip - prinsip MBS (Managemen Berbasis Sekolah)	%	90.20	92	-	94	-	96	-	98	-	99	-	100	-	100.00	SKPD yang menangani urusan pendidikan
	Program Pelayanan Pendidikan bagi Keluarga Miskin	Misi 1	Jumlah penerima beasiswa jenjang pendidikan dasar (SD/SMP)	Siswa	65,658	66,971	-	69,676	-	71,071	-	72,491	-	73,947	-	74,968	-	74,968	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		Misi 1	Jumlah penerima bantuan siswa miskin daerah jenjang pendidikan dasar (SD/SMP)	Siswa	0	-	-	1,366	-	1,394	-	1,421	-	1,450	-	1,470	-	1,470	SKPD yang menangani urusan pendidikan
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Misi 1	Jumlah perpustakaan sekolah	Buah	573	50	-	50	-	60	-	60	-	60	-	60	-	340	SKPD yang menangani urusan pendidikan
2	Kesehatan	Misi 1																	
	Program Pelayanan Kesehatan Ibu	Misi 1	Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	%	87.20	100	2,000,000,000.00	100	2,000,000,000.00	100	2,000,000,000.00	100	2,000,000,000.00	100	2,000,000,000.00	100	2,000,000,000.00	100	SKPD yang menangani urusan kesehatan
		Misi 1	Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	91.22	100	1,500,000,000.00	100	1,500,000,000.00	100	1,500,000,000.00	100	1,500,000,000.00	100	1,500,000,000.00	100	1,500,000,000.00	100	SKPD yang menangani urusan kesehatan
		Misi 1	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	50.83	63	200,000,000.00	67	250,000,000.00	71	300,000,000.00	75	350,000,000.00	80	400,000,000.00	80	400,000,000.00	80	SKPD yang menangani urusan kesehatan
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita	Misi 1	Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	97.96	100	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	100	SKPD yang menangani urusan kesehatan
		Misi 1	Angka kelangsungan hidup bayi	o/oo	991	991	1,000,000,000.00	992	1,000,000,000.00	993	1,000,000,000.00	994	1,000,000,000.00	995	1,000,000,000.00	995	1,000,000,000.00	995	SKPD yang menangani urusan kesehatan
		Misi 1	Cakupan balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	%	75.58	100	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	100	SKPD yang menangani urusan kesehatan
	Program Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan dasar	Misi 1	Cakupan anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	%	100	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	SKPD yang menangani urusan kesehatan
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Misi 1	Cakupan warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	%	100	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	SKPD yang menangani urusan kesehatan
	Program Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Misi 1	Angka usia harapan hidup	th	68.69	69	500,000,000.00	69	500,000,000.00	69	500,000,000.00	69	500,000,000.00	69	500,000,000.00	69	500,000,000.00	69.1	SKPD yang menangani urusan kesehatan
		Misi 1	Cakupan orang usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	24.25	100	350,000,000.00	100	350,000,000.00	100	350,000,000.00	100	350,000,000.00	100	350,000,000.00	100	350,000,000.00	100	SKPD yang menangani urusan kesehatan
	Program Pelayanan Kesehatan Pada Penyakit Tidak Menular	Misi 1	Cakupan penderita hipertensi mendapatkan pelayanan secondary prevention sesuai standar.	%	7	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	SKPD yang menangani urusan kesehatan
		Misi 1	Cakupan penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	%	5	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	SKPD yang menangani urusan kesehatan
	Program Pelayanan Kesehatan Pada Penyakit Menular	Misi 1	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA	%	54.41	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	SKPD yang menangani urusan kesehatan
		Misi 1	Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.	%	10	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	SKPD yang menangani urusan kesehatan
		Misi 1	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	91.74	92	150,000,000.00	94	200,000,000.00	96	250,000,000.00	98	300,000,000.00	100	350,000,000.00	100	350,000,000.00	100	SKPD yang menangani urusan kesehatan
		Misi 1	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	SKPD yang menangani urusan kesehatan
	Program Pelayanan Kesehatan Jiwa	Misi 1	Cakupan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	%	100	100	300,000,000.00	100	300,000,000.00	100	300,000,000.00	100	300,000,000.00	100	300,000,000.00	100	300,000,000.00	100	SKPD yang menangani urusan kesehatan
	Program Pelayanan Higiene Sanitasi Pangan	Misi 1	Cakupan anak di satuan pendidikan dasar mendapatkan pangan yang aman dan sehat.	%	70	100	400,000,000.00	100	400,000,000.00	100	400,000,000.00	100	400,000,000.00	100	400,000,000.00	100	400,000,000.00	100	SKPD yang menangani urusan kesehatan
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Misi 1	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0.07	0.07	500,000,000	0	500,000,000	0	500,000,000	0	500,000,000	0	500,000,000	0	500,000,000	0.02	SKPD yang menangani urusan kesehatan
		Misi 1	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	SKPD yang menangani urusan kesehatan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan	Keterkaitan dengan Misi	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Akhir RPJMD	SKPD Penanggungjawab	
						Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Misi 1	Cakupan kecamatan mempunyai cakupan PHBS Rumah tangga mencapai 50%	%	50	50	300,000,000.00	65	400,000,000.00	70	500,000,000.00	75	600,000,000.00	80	700,000,000.00	80	700,000,000.00	80	SKPD yang menangani urusan kesehatan	
		Misi 1	Cakupan kecamatan mempunyai cakupan Desa Slaga Aktif mencapai 50%	%	35	35	300,000,000.00	45	400,000,000.00	55	500,000,000.00	65	600,000,000.00	80	700,000,000.00	80	700,000,000.00	80	SKPD yang menangani urusan kesehatan	
	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Serta Iaringannya	Misi 1	Cakupan Puskesmas	%	102	102	300,000,000.00	102	300,000,000.00	102	300,000,000.00	102	300,000,000.00	102	300,000,000.00	102	300,000,000.00	102	SKPD yang menangani urusan kesehatan	
		Misi 1	Cakupan Puskesmas Pembantu	%	43.5	43.5	600,000,000.00	43.8	600,000,000.00	44.1	600,000,000.00	44.4	600,000,000.00	44.7	600,000,000.00	44.7	600,000,000.00	44.7	SKPD yang menangani urusan kesehatan	
		Misi 1	Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk (1:30.000)	1/30,000	1/43,340	1/42,341	3,000,000,000.00	1/42,341	-	1/41,333	3,000,000,000.00			1/40,372	3,000,000,000.00	1/39,454	3,000,000,000.00	1/39,454	SKPD yang menangani urusan kesehatan	
		Misi 1	Rasio Puskesmas Pembantu (Pustu) per Satuan Penduduk	1/10,000	1/11,346	1/11,346	-	1/11,000	1,200,000,000	1/11,000			1/10,849	1,200,000,000.00	1/10,849			1/10,849	SKPD yang menangani urusan kesehatan	
	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Misi 1	Pembangunan Rumah Sakit Tipe D / RS Pratama Cikatomas	buah	0	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000.00	1	15,000,000,000.00	1	5,000,000,000.00	1	5,000,000,000.00	1	5,000,000,000.00	1	SKPD yang menangani urusan kesehatan	
		Misi 1	Rintisan Pembangunan Rumah Sakit Tipe D / RS Pratama Ciawi, Manoniva, Karangnunggal	buah	0	-	-	3	1,500,000,000.00	3	9,000,000,000.00	3	2,100,000,000.00	3	3,000,000,000.00	3	3,000,000,000.00	3	SKPD yang menangani urusan kesehatan	
		Misi 1	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	%	0.17	0.17	240,000,000	0.18	240,000,000.00	0.19	240,000,000.00	0.2	240,000,000.00	0.21	240,000,000.00	0.21	240,000,000.00	0.21	SKPD yang menangani urusan kesehatan	
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Misi 1	Cakupan Puskesmas Dengan Pendampingan Tim Akreditasi Provinsi	%	5	2	1,000,000,000	2	1,000,000,000.00	2	1,000,000,000.00	2	1,000,000,000.00	2	1,000,000,000.00	2	1,000,000,000.00	2	SKPD yang menangani urusan kesehatan	
		Misi 1	Rasio dokter per satuan penduduk	%	0.17	0.17		0.18		0.19			0.2	0.21		0.21		0.21	0.21	SKPD yang menangani urusan kesehatan
		Misi 1	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	%	0.6	0.6		0.6		0.65			0.65	0.7		0.7		0.7	0.7	SKPD yang menangani urusan kesehatan
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Misi 1	Cakupan ketersediaan obat essential di Puskesmas	%	80	80	15,000,000,000.00	85	16,000,000,000.00	90	17,000,000,000.00	95	18,000,000,000.00	100	19,000,000,000.00	100	19,000,000,000.00	100	19,000,000,000.00	SKPD yang menangani urusan kesehatan
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Misi 1	Cakupan penduduk miskin dengan jaminan kesehatan	%	40	60	20,000,000,000.00	70	25,000,000,000.00	80	30,000,000,000.00	90	35,000,000,000.00	100	40,000,000,000.00	100	40,000,000,000.00	100	40,000,000,000.00	SKPD yang menangani urusan kesehatan
		Misi 1	Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin	%	31	30	1,150,000,000	30	1,150,000,000	30	1,150,000,000	30	1,150,000,000	30	1,150,000,000	30	1,150,000,000	30	1,150,000,000	SKPD yang menangani urusan kesehatan
	Program Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Misi 1	Cakupan Puskesmas yang tersedia perangkat Sistem Informasi Kesehatan untuk akses pelayanan e-health	%	5	15	300,000,000	35	400,000,000	55	500,000,000	75	600,000,000	95	700,000,000	95	700,000,000	95	700,000,000	SKPD yang menangani urusan kesehatan
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD	Misi 1	Peningkatan Kelas RS SMC menjadi Kelas B	Kelas	C	C	500,000,000	C	500,000,000	B	1,000,000,000	B	500,000,000	B	500,000,000	B	500,000,000	B	500,000,000	SKPD yang menangani urusan kesehatan
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Misi 1	Program Akreditasi RSUD SMC	Status Akreditasi	-	Akreditasi Penuh	500,000,000	Akreditasi Penuh		Akreditasi Penuh		Akreditasi Penuh	500,000,000	Madya		Madya		Madya	Madya	SKPD yang menangani urusan kesehatan
	Program BLUD RS SMC	Misi 1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RS SMC	%	30,000,000,000	100	36,000,000,000	100	45,000,000,000	100	50,000,000,000	100	70,000,000,000	100	75,000,000,000	100	80,000,000,000	100	80,000,000,000	SKPD yang menangani urusan kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																			
	Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya																			
	Proram pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya																			
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Misi 4	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah setempat	persen	39.16	41	1,431,000,000	43	1,750,000,000	45	2,000,000,000	48	2,250,000,000	50	2,500,000,000	52	2,750,000,000	55	3,000,000,000	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Misi 4	Terbangunnya gedung kantor pemerintahan di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya	unit	18	1	15,000,000,000	3	24,000,000,000	3	25,500,000,000	3	27,000,000,000	3	28,500,000,000	-	-	31	31	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

No.	Bidang Urusan Pemerintahan	Keterkaitan dengan Misi	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Akhir RPJMD	SKPD Penanggungjawab
						Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
		Misi 4	Terehabitasinya kantor kecamatan	buah	20	3	1,600,000,000	4	2,000,000,000	4	2,000,000,000	4	2,000,000,000	4	2,000,000,000	-	-	39	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Misi 4	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota	titik genangan	0	-	-	-	-	2	2,000,000,000	2	2,000,000,000	2	2,000,000,000	2	2,000,000,000	8	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Misi 4	Persentase pembangunan jalan lingkak 4 wilayah dan perbatasan	%			78,313,968,219	10	117,470,952,328	23	133,133,745,972	23	148,796,539,616	23	164,459,333,260	23	140,965,142,794	100	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Misi 4	Persentase pembangunan jembatan di wilayah perbatasan					10		23		23		23		23			SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
	Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Misi 4	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	51.34	59		67		76		87		99		100		100	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Misi 4	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	84.37	87		89		92		95		97		100		100	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Misi 4	Ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan	%				20		40		60		80		100		100	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Misi 4	Jumlah pemeliharaan jaringan irigasi	Buah	195	309		423		537		651		765		879		879	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
	Program Perencanaan Tata Ruang	Misi 4	Jumlah rancangan produk hukum daerah mengenai perencanaan tata ruang	buah	1	0	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	6	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Misi 4	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	buah	0	-	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	5	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Misi 4	Jumlah wilayah/ kawasan yang memiliki peta dasar dan penggunaan lahan skala 1: 5000	buah	6	-	1,200,000,000	2	1,200,000,000	2	1,200,000,000	2	1,200,000,000	2	1,200,000,000	2	1,200,000,000	16	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Misi 4	Jumlah dokumen rencana tata ruang	buah	2	5	320,000,000	2	1,500,000,000	2	1,500,000,000	2	1,500,000,000	2	1,500,000,000	2	1,500,000,000	17	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Misi 4	Jumlah dokumen kajian bidang penataan ruang	buah	0	-	750,000,000	1	750,000,000	1	750,000,000	1	750,000,000	1	750,000,000	1	750,000,000	5	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
	Program Pemanfaatan Ruang	Misi 4	Jumlah rancangan produk hukum daerah mengenai pemanfaatan ruang	buah	0	-	250,000,000	-	250,000,000	1	250,000,000	-	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	3	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Misi 4	Jumlah rancangan produk hukum daerah mengenai pengendalian pemanfaatan ruang	buah	0	-	250,000,000	-	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	4	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Misi 4	Jumlah pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah	kegiatan	1	3	75,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	24	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Misi 4	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	buah	0	-	-	1	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Misi 4	Jumlah dokumen kajian perwujudan program pemanfaatan ruang	buah	0	-	-	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	5	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Misi 4	Jumlah pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang	buah	1	-	-	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	6	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

No.	Bidang Urusan Pemerintahan	Keterkaitan dengan Misi	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Akhir RPJMD	SKPD Penanggungjawab
						Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
		Misi 4	Persentase Penyediaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan	persen	0	-	1	3,000,000,000	1	3,500,000,000	1	4,000,000,000	1	4,500,000,000	1	4,500,000,000	5	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Misi 4	Rekomendasi IMB yang dikeluarkan	unit		500	100,000,000	500	100,000,000	500	100,000,000	500	100,000,000	500	100,000,000	500	100,000,000	3,000	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Misi 4	Jumlah pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang	buah	0	-	1	100,000,000	-	-	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	4	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	
		Misi 4	Jumlah instrumen pengendalian dan pemanfaatan ruang	kegiatan	0	-	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman																		
	Program Pengembangan Perumahan	Misi 4	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	persen	6.56	3	400,000,000	3	450,000,000	3	500,000,000	3	550,000,000	3	600,000,000	3	6,500,000,000	25.00	SKPD yang menangani Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Misi 4	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi	unit	6783	400	7,000,000,000	500	7,500,000,000	500	7,500,000,000	500	7,500,000,000	500	7,500,000,000	500	7,500,000,000	9,683	SKPD yang menangani Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Misi 4	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	ha	115.3	1	100,000,000	1	200,000,000	1	300,000,000	1	400,000,000	1	500,000,000	1	600,000,000	109	SKPD yang menangani Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Misi 4	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	persen	55.4	2	2,000,000,000	2	3,000,000,000	2	4,000,000,000	2	5,000,000	2	6,000,000,000	2	7,000,000,000	67	SKPD yang menangani Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Misi 4	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah setempat	persen	39.16	2	1,431,000,000	2	1,750,000,000	2	2,000,000,000	2	2,250,000,000	2	2,500,000,000	2	2,750,000,000	51	SKPD yang menangani Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Misi 4	Persentase luas jalan lingkungan terhadap luas wilayah kabupaten	persen	35.51	1	6,000,000,000	1	6,000,000,000	1	6,000,000,000	1	6,000,000,000	1	6,000,000,000	1	6,000,000,000	42	SKPD yang menangani Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran			persen	52.78	53	50,000,000	55	6,000,000,000	57	200,000,000	59	200,000,000	61	200,000,000	63	200,000,000	63	SKPD yang menangani Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																		
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Misi 3	Terlaksananya pertemuan Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)	Frekuensi	0	6	200,000,000	7	225,000,000	8	250,000,000	8	250,000,000	8	250,000,000	8	250,000,000	45	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Misi 3	Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	%	100	100	1,091,950,000	100	2,650,000,000	100	2,275,000,000	100	4,525,000,000	100	3,085,000,000	100	3,485,000,000	100	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Misi 3	Cakupan patroli petugas Satpol PP	orang	0.23	48	225,000,000	60	300,000,000	100	480,000,000	150	550,000,000	200	600,000,000	250	630,000,000	6	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Misi 3	Jumlah Gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Kali	46	40	691,950,000	37	1,700,000,000	34	1,400,000,000	30	3,175,000,000	25	1,930,000,000	20	1,930,000,000	146	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Misi 3	Jumlah unjuk rasa yang diamankan	Kali	15	14	100,000,000	13	110,000,000	12	120,000,000	11	130,000,000	10	140,000,000	9	140,000,000	55	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Misi 3	Terlaksananya siskamswakarsa di daerah	orang	0	78	50,000,000	100	100,000,000	150	150,000,000	150	150,000,000	150	150,000,000	150	150,000,000	778	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No.	Bidang Urusan Pemerintahan	Keterkaitan dengan Misi	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Akhir RPJMD	SKPD Penanggungjawab
						Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Misi 3	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan	orang	0	500	500,000,000	500	500,000,000	550	550,000,000	550	550,000,000	550	550,000,000	550	550,000,000	3,200	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Misi 3	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi kemitraan wawasan kebangsaan	orang	0	200	200,000,000	200	200,000,000	250	250,000,000	250	250,000,000	250	250,000,000	250	250,000,000	1,400	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Misi 3	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	%	52.55			1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Misi 3	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	%	0.525			0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	1	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Misi 3	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi narkoba	orang	100	100	100,000,000	150	150,000,000	150	150,000,000	150	150,000,000	150	150,000,000	150	150,000,000	850	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Misi 3	Terwujudnya Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyaarakat	%	0	-	-	100	750,000,000	100	750,000,000	100	900,000,000	100	1,050,000,000	100	1,050,000,000	100	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	Program pendidikan politik masyarakat	Misi 3	Partisipasi Pemilihan Bupati/Wakil Bupati	%	60.33									61	1,500,000,000			61	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Misi 3	Partisipasi Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur	%	65.94					67	1,500,000,000							67	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Misi 3	Partisipasi Pemilihan Legislatif	%	73.54							75	1,500,000,000					75	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Misi 3	Partisipasi Pemilihan Presiden/Wakil Presiden	%	68.61							70	1,500,000,000					70	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Misi 3	Kegiatan pembinaan terhadap LSM,Ormas dan OKP	orang				350	100,000,000	350	100,000,000	350	100,000,000	350	100,000,000	350	100,000,000	1,750	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah	Misi 3	Penegakan PERDA	%	100	100	464,000,000	100	1,200,000,000	100	1,045,000,000	100	1,200,000,000	100	1,400,000,000	100	1,525,000,000	100	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Misi 3	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan evaluasi Penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat	Kali				4	200,000,000	4	250,000,000	4	300,000,000	4	300,000,000	4	300,000,000	20	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Misi 3	Jumlah Sosialisasi dan penyuluhan Perda dan Perkada Lainnya	Kali	0	1	228,000,000	1	2,600,000,000	1	2,040,000,000	1	2,400,000,000	1	2,800,000,000	1	2,800,000,000	5	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No.	Bidang Urusan Pemerintahan	Keterkaitan dengan Misi	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Akhir RPJMD	SKPD Penanggungjawab
						Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Misi 3	Meningkatnya Pengumpulan Informasi Barang Kena Cukai Ilegal	merk hasil tembakau	18	10	233,417,921	11	250,000,000	12	250,000,000	13	250,000,000	14	250,000,000	15	250,000,000	15	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Misi 3	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	%	0.0082	0		1		1		1		1		1		1	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Misi 3	Jumlah PPNS per Perda yang ada	%	14	16		18		20		22		24		26		26	SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
6	Sosial																		
	Program pembinaan anak terlantar		Jumlah anak terlantar yang tertangani	orang	20	20	150,000,000	20	200,000,000	20	250,000,000	40	300,000,000	40	300,000,000	40	300,000,000	40	
			Jumlah tenaga pembinaan anak terlantar yang dilatih	orang		95	100,000,000	148	150,000,000	60	200,000,000	60	250,000,000	60	250,000,000	60	300,000,000	100	
	Program pembinaan panti asuhan/panti jompo		Terlathinya keterampilan penghuni panti asuhan/jompo	%	100	100	50,000,000	100	50,000,000	100	75,000,000	100	75,000,000	100	75,000,000	100	75,000,000	100	
	Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba, dan penyakit sosial lainnya)		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan keterampilan	orang	70	75	200,000,000	80	225,000,000	85	250,000,000	90	275,000,000	90	275,000,000	95	300,000,000	100	
	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial		Terlaksananya kerjasama yang baik antara masyarakat dan dunia usaha	%	100	100	100,000,000	100	100,000,000	100	120,000,000	100	125,000,000	100	125,000,000	100	150,000,000	100	
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Jumlah orang yang tertangani	orang	200	250	875,000,000	275	900,000,000	300	950,000,000	300	950,000,000	300	950,000,000	300	1,000,000,000	300	
	Program Pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Misi 1	Cakupan Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	-	50	1,000,000,000	60	1,225,000,000	70	2,250,000,000	80	2,750,000,000	90	3,000,000,000	100	325,000,000	100	SKPD yang menangani Sosial
	Program pembinaan penyandang cacat dan trauma	Misi 1	Peningkatan Kapasitas Sarana Sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi)	%	0	16	500,000,000	16	500,000,000	16	500,000,000	16	500,000,000	16	500,000,000	20	600,000,000	100	SKPD yang menangani Sosial
	Tanggap dan Penanggulangan Bencana	Misi 4	Jumlah masyarakat yang mengikuti Sosialisasi dan pelatihan Penanggulangan Bencana	orang	3900	500	250,000,000	500	250,000,000	500	250,000,000	500	250,000,000	500	250,000,000	500	250,000,000	6900	SKPD yang menangani Kebencanaan
		Misi 4	Jumlah Desa Tangguh bencana	Desa	7	3	750,000,000	3	750,000,000	3	750,000,000	3	750,000,000	3	750,000,000	3	750,000,000	25	SKPD yang menangani Kebencanaan
		Misi 4	Tersedianya dokumen mitigasi bencana	Dokumen	7	5	300,000	5	300,000,000	3	180,000,000							20	SKPD yang menangani Kebencanaan
		Misi 4	Tersedianya sarana Penanggulangan Bencana	Paket		1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	7	SKPD yang menangani Kebencanaan
		Misi 4	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	90	90	7,000,000,000	90	7,000,000,000	90	7,000,000,000	90	7,000,000,000	90	7,000,000,000	90	7,000,000,000	90	SKPD yang menangani Kebencanaan
		Misi 4	Persentase Penanganan Rehab/rekonstruksi	%	0	60	500,000,000	65	500,000,000	70	1,000,000,000	75	1,000,000,000	80	1,000,000,000	90	1,000,000,000	90	SKPD yang menangani Kebencanaan
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Misi 3	Sosialisasi pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam bagi Satlumas	orang	0	78	50,000,000	100	100,000,000	150	150,000,000	150	150,000,000	150	150,000,000	150	150,000,000	778	SKPD yang menangani Kebencanaan
B	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																		
1	Tenaga Kerja																		
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Misi 1	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	0	12,52	300,000,000	14,15	390,000,000	20,22	450,000,000	33,81	500,000,000	45,15	5,750,000,000	46,33	5,750,000,000	46,33	SKPD yang menangani Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Misi 1	Jumlah Wirausaha Baru	Wirausaha	0	200	5,000,000,000	200	5,000,000,000	200	5,000,000,000	200	5,000,000,000	200	5,000,000,000	200	5,000,000,000	1200	SKPD yang menangani Tenaga Kerja

No.	Bidang Urusan Pemerintahan	Keterkaitan dengan Misi	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Akhir RPJMD	SKPD Penanggungjawab	
						Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Misi 1	Cakupan Penanganan Perselisihan buruh dan pengusaha	%	0	100	25,000,000	100	30,000,000	100	35,000,000	100	40,000,000	100	45,000,000	100	48,000,000	100	SKPD yang menangani Tenaga Kerja	
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																			
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Misi 1	Jumlah perempuan yang mengikuti pembinaan & pelatihan tataboga, tata, tata busana	Orang	40	100	50,000,000.00	100	250,000,000.00	100	350,000,000.00	100	450,000,000.00	100	550,000,000.00	100	650,000,000.00	600	SKPD yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Misi 1	Cakupan Peningkatan Pemberdayaan perempuan kepala keluarga (PEKKA)	%	0	20	300,000,000	40	450,000,000	60	600,000,000	80	750,000,000	100	950,000,000	100	950,000,000	100	SKPD yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Misi 1	Meningkatnya melek hurup perempuan usia 15 Tahun	%	99.16	100	800,000,000.00	100	1,000,000,000.00	100	1,200,000,000.00	100	1,400,000,000.00	100	1,600,000,000.00	100	1,600,000,000	100	SKPD yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Misi 1	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	88	100	350,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	100	SKPD yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Misi 1	Terwujudnya Pembinaan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Jenis Kegiatan	0	2	400,000,000	2	400,000,000	2	400,000,000	3	600,000,000	3	600,000,000	3	600,000,000	3	SKPD yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Misi 1	Tercapainya Sosialisasi Pengarusutamaan Gender	%	0	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	SKPD yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
3	Pangan	Misi 2																		
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian	Misi 2	Pendampingan Lumbung Pangan Masyarakat	Kelompok	20	30	700,000,000	159	725,000,000	164	750,000,000	169	800,000,000	169	850,000,000	169	850,000,000	860	SKPD yang menangani Pangan	
		Misi 2	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Ton	62	70	1,000,000,000	80	1,100,000,000	90	1,200,000,000	100	1,300,000,000	110	1,400,000,000	110	1,400,000,000	110	SKPD yang menangani Pangan	
		Misi 2	Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat	Desa	0	50	1,450,000,000	60	1,750,000,000	70	2,000,000,000	80	2,250,000,000	90	2,500,000,000	90	2,500,000,000	90	SKPD yang menangani Pangan	
		Misi 2	Panel Harga	Laporan	12	12	45,000,000	12	50,000,000	12	55,000,000	12	60,000,000	12	65,000,000	12	65,000,000	72	SKPD yang menangani Pangan	
		Misi 2	Lembaga Akses Pangan masyarakat (LAPM)	LAPM	0	2	200,000,000	3	300,000,000	4	400,000,000	5	500,000,000	6	600,000,000	6	600,000,000	6	SKPD yang menangani Pangan	
		Misi 2	Pendampingan Kawasan Rumah Pangan Lestari	Desa	24	80	880,000,000	82	890,000,000	84	900,000,000	86	910,000,000	88	920,000,000	88	920,000,000	88	SKPD yang menangani Pangan	
		Misi 2	Fasilitasi Pameran pangan lokal tingkat provinsi dan pusat	Frekuensi	2	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	12	SKPD yang menangani Pangan	
		Misi 2	Pendampingan Mandiri Pangan	Desa	26	20	300,000,000	23	400,000,000	26	450,000,000	29	560,000,000	29	560,000,000	29	560,000,000	29	SKPD yang menangani Pangan	
		Misi 2	Pemutakhiran data kerentanan dan kerawanan pangan (FSVA)	Peta	0	1	150,000,000	1	175,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	SKPD yang menangani Pangan	
4	Pertanahan																			
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan tanah	Misi 3	Penataan Penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah	%	0	20	300,000,000	30	300,000,000	40	300,000,000	45	300,000,000	50	300,000,000	50	300,000,000	50	300,000,000	SKPD yang menangani Pertanahan
			Penyuluhan hukum pertanahan	%	0	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	SKPD yang menangani Pertanahan
	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Misi 3	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	%	0	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	SKPD yang menangani Pertanahan
	Program Pengembangan sistem informasi pertanahan	Misi 3	Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan	%	0							100	500,000,000						SKPD yang menangani Pertanahan	
5	Lingkungan Hidup																			
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Misi 4	Persentase pengurangan sampah di perkotaan	persen	38.77	2	1,500,000,000	2	2,000,000,000	2	2,000,000,000	2	2,000,000,000	2	2,000,000,000	3	2,000,000,000	50.77	SKPD yang menangani Lingkungan Hidup	
		Misi 4	Jumlah TPA/ TPAS/ TPAST yang terbangun	unit	1	1	1,750,000,000	1	27,600,000,000	1	18,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	7	SKPD yang menangani Lingkungan Hidup	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Misi 4	Persentase penanganan sampah	%		0.5	3,000,000,000	0.5	3,000,000,000	0.5	3,000,000,000	0.5	3,000,000,000	0.5	3,000,000,000	0.5	3,000,000,000	3	SKPD yang menangani Lingkungan Hidup	
		Misi 4	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	paket		1	500,000,000	2	1,000,000,000	2	1,000,000,000	2	1,000,000,000	2	1,000,000,000	3	1,500,000,000	12	SKPD yang menangani Lingkungan Hidup	
		Misi 4	Jumlah tempat pembuangan sampah (TPS)	paket		2	1,500,000,000	2	1,500,000,000	2	1,500,000,000	2	1,500,000,000	2	1,500,000,000	2	1,500,000,000	12	SKPD yang menangani Lingkungan Hidup	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan	Keterkaitan dengan Misi	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Akhir RPJMD	SKPD Penanggungjawab
						Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
		Misi 4	Ketersediaan motor angkut sampah	unit		59	1,475,000,000	59	1,475,000,000	59	1,475,000,000	58	1,450,000,000	58	1,450,000,000	58	1,450,000,000	351	SKPD yang menangani Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Misi 4	Penegakan hukum lingkungan	dokumen	3	3	600,000,000	8	1,450,000,000	7	850,000,000	5	800,000,000	5	800,000,000	5	800,000,000	33	SKPD yang menangani Lingkungan Hidup
		Misi 4	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	perusahaan	64	17	150,000,000	18	360,000,000	18	360,000,000	18	410,000,000	18	460,000,000	18	460,000,000	107	SKPD yang menangani Lingkungan Hidup
		Misi 4	Peningkatan kebersihan dan pengelolaan sampah	unit	5	5	3,300,000,000	2	1,500,000,000	2	1,500,000,000	2	1,500,000,000	1	1,600,000,000	1	1,600,000,000	13	SKPD yang menangani Lingkungan Hidup
		Misi 4	Meningkatnya jumlah ruang khusus merokok di OPD Kab. Tasikmalaya	unit	8	2	80,000,000	2	80,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	12	SKPD yang menangani Lingkungan Hidup
		Misi 4	Meningkatnya jumlah Instalasi Pengelolaan Air Limbah	unit		1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	6	SKPD yang menangani Lingkungan Hidup
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Misi 4	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	ha	30	30	1,000,000,000	10	500,000,000	10	500,000,000	10	500,000,000	10	500,000,000	10	500,000,000	110	SKPD yang menangani Lingkungan Hidup
		Misi 4	Jumlah sumber mata air yang dikonservasi	buah	33			5	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	25	SKPD yang menangani Lingkungan Hidup
		Misi 4	Meningkatnya jumlah taman keanekaragaman hayati	buah		2	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	7	SKPD yang menangani Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Misi 4	Sosialisasi kebijakan, peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	orang	400	400	300,000,000	400	300,000,000	400	300,000,000	400	300,000,000	400	300,000,000	400	300,000,000	2400	SKPD yang menangani Lingkungan Hidup
		Misi 4	Kerjasama kemitraan pengelolaan lingkungan hidup	sekolah/ pesantren	20	10	1,000,000,000	5	900,000,000	5	900,000,000	5	1,000,000,000	5	1,000,000,000	5	1,000,000,000	35	SKPD yang menangani Lingkungan Hidup
		Misi 4	Publikasi lingkungan hidup	kali	4	4	500,000,000	4	500,000,000	4	500,000,000	4	500,000,000	4	500,000,000	4	500,000,000	24	SKPD yang menangani Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Misi 4	Cakupan Penanganan Pencemaran status mutu air	%	35	35	250,000,000	45	300,000,000	55	360,000,000	60	420,000,000	65	313,000,000	65	313,000,000	65	SKPD yang menangani Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	Misi 4	Luas kawasan yang dikonservasi	paket		2	2,000,000,000	2	2,000,000,000	2	2,000,000,000	2	2,000,000,000	2	2,000,000,000	2	2,000,000,000	12	SKPD yang menangani Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Misi 4	Jumlah dan jenis data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan	dokumen	1	3	650,000,000	3	550,000,000	3	600,000,000	3	650,000,000	3	650,000,000	3	650,000,000	18	SKPD yang menangani Lingkungan Hidup
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah	Misi 4	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah setempat	persen	39.16	1	1,431,000,000	2	1,750,000,000	2	2,000,000,000	2	2,250,000,000	2	2,500,000,000	2	2,750,000,000	50.16	SKPD yang menangani Lingkungan Hidup
6	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil:																		
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Misi 1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	rasio	0.98	0.98	1,000,000,000	0.98	1,100,000,000	0.98	1,200,000,000	1.00	1,300,000,000	1.00	1,500,000,000	1.00	1,750,000,000	1.00	SKPD yang menangani Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Misi 1	Rasio bayi berakte kelahiran	rasio	0.43	0.44	300,000,000	0.45	400,000,000	0.46	500,000,000	0.47	600,000,000	0.48	700,000,000	0.49	800,000,000	0.48	SKPD yang menangani Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Misi 1	Cakupan Penerbitan KTP el	%	98	98.25	500,000,000	98.50	600,000,000	98.75	700,000,000	99.00	800,000,000	99.25	900,000,000	99.50	1,000,000,000	99.25	SKPD yang menangani Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Misi 1	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	%	43.06	43.50	500,000,000	44.00	600,000,000	44.50	700,000,000	45.00	800,000,000	45.50	900,000,000	46.00	1,000,000,000	45.50	SKPD yang menangani Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Misi 1	Ketersediaan database kependudukan	ada/tidak	ada	ada	200,000,000	ada	300,000,000	ada	400,000,000	ada	500,000,000	ada	600,000,000	ada	700,000,000	ada	SKPD yang menangani Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Misi 1	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah/ belum	sudah	sudah	1,000,000,000	sudah	1,100,000,000	sudah	1,200,000,000	sudah	1,300,000,000	sudah	1,400,000,000	sudah	1,500,000,000	sudah	SKPD yang menangani Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Bidang Urusan Pemerintahan	Keterkaitan dengan Misi	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Akhir RPJMD	SKPD Penanggungjawab
						Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
		Misi 1	Cakupan Penerbitan KK	%	92	93	1,000,000,000	94	1,100,000,000	95	1,200,000,000	96	1,300,000,000	97	1,400,000,000	98	1,500,000,000	97	SKPD yang menangani Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Misi 1	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	%	43	44	500,000,000	45	600,000,000	46	600,000,000	47	700,000,000	48	800,000,000	49	900,000,000	48	SKPD yang menangani Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Misi 1	Cakupan Penerbitan Akte Kematian	%	0.33	8.33	200,000,000	8.55	300,000,000	9.00	400,000,000	9.50	500,000,000	10	600,000,000	10.50	700,000,000	10	SKPD yang menangani Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		
	Program peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa			%	100	100	1,000,000,000	100	2,000,000,000	100	2,500,000,000	100	3,000,000,000	100	3,500,000,000	100	4,500,000,000		
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Misi 2	Cakupan pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	%	0	100	2,500,000,000	100	3,000,000,000	100	3,500,000,000	100	4,000,000,000	100	4,500,000,000	100	5,000,000,000	5,000,000,000	SKPD yang menangani Pemberdayaan Msy dan Desa
	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Misi 2	Cakupan Pembinaan BumDes	%	0	100	100,000,000	100	500,000,000	100	1,000,000,000	100	1,500,000,000	100	2,000,000,000	100	2,500,000,000	2,500,000,000	SKPD yang menangani Pemberdayaan Msy dan Desa
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Misi 2	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	0	100	1,000,000,000	100	2,000,000,000	100	2,500,000,000	100	3,000,000,000	100	3,500,000,000	100	4,000,000,000	4,000,000,000	SKPD yang menangani Pemberdayaan Msy dan Desa
	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Misi 2	Cakupan pembinaan PKK	%	0	100	100,000,000	100	200,000,000	100	300,000,000	100	400,000,000	100	500,000,000	100	600,000,000	600,000,000	SKPD yang menangani Pemberdayaan Msy dan Desa
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Misi 1																	
	Program Kesehatan reproduksi remaja			%	100	100	50,000,000	100	250,000,000	100	350,000,000	100	450,000,000	100	550,000,000	100	750,000,000	100	
	Program Keluarga Berencana	Misi 1	Meningkatnya Prevalensi peserta KB	%	65.9	80	250,000,000	90	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	SKPD yang menangani Pengendalian Penduduk dan KB
	Program pelayanan kontrasepsi	Misi 1	Tersedianya Alat Kontrasepsi	%	0	80	1,000,000,000	100	1,200,000,000	100	1,200,000,000	100	1,200,000,000	100	1,200,000,000	100	1,200,000,000	100	SKPD yang menangani Pengendalian Penduduk dan KB
	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Misi 1	Cakupan Pembinaan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	%	287,683 KK	60	500,000,000	70	750,000,000	80	1,000,000,000	90	1,250,000,000	100	1,500,000,000	100	1,750,000,000	100	SKPD yang menangani Pengendalian Penduduk dan KB
9	Perhubungan																		
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Misi 4	Persentase pembangunan terminal di 5 kecamatan	%		10	5,243,975,478	10	7,865,963,218	13	8,914,758,313	23	9,963,553,409	23	11,012,348,505	23	9,439,155,861	23	SKPD yang menangani Perhubungan
	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Misi 4	Cakupan kelengkapan perlengkapan jalan	%		10		20		40		60		70		100		290	SKPD yang menangani Perhubungan
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Misi 4	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%				50		75		100		100		100		100	SKPD yang menangani Perhubungan
10	Komunikasi Dan Informatika;																		
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Misi 3	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana bidang kominfo	paket	-	1	200,000,000	1	300,000,000	2	400,000,000	2	500,000,000	2	600,000,000	2	600,000,000	10	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
	Program kerjasama informasi dan media massa	Misi 3	Jumlah surat kabar nasional/lokal	buah	64	64	1,500,000,000	70	2,300,000,000	75	2,700,000,000	80	3,100,000,000	85	3,300,000,000	90	2,900,000,000	90	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Misi 3	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	buah	26	26		30		32		34		36		38		38	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah

No.	Bidang Urusan Pemerintahan	Keterkaitan dengan Misi	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Akhir RPJMD	SKPD Penanggungjawab	
						Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			
		Misi 3	Jumlah media online	buah	13	13		15		20		25		30		35		35	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah	
		Misi 3	Jumlah media luar ruang	kali	3	3	150,000,000	4	250,000,000	6	300,000,000	8	350,000,000	10	400,000,000	12	450,000,000	43	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah	
		Misi 3	Jumlah pelayanan Informasi & dokumentasi	buah	6	4	50,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	24	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah	
		Misi 3	Cakupan wilayah yang memperoleh akses informasi (KIM)	%	-	-	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	26	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah	
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Misi 3	Jumlah Website Milik SKPD dan Kecamatan sebagai layanan akses informasi publik	Website	28			35	500,000,000.00									63	SKPD yang menangani Kominfo	
		Misi 3	Jumlah SKPD dan Kecamatan yang terhubung melalui infrastruktur jaringan data penda	SKPD dan Kecamatan				12	1,500,000,000.00	12	1,500,000,000.00	12	1,500,000,000.00	12	1,500,000,000.00	15	1,500,000,000.00	63	SKPD yang menangani Kominfo	
		Misi 3	Jumlah Hotspot Publik Milik Penda	Titik				10	250,000,000.00	10	250,000,000.00	10	250,000,000.00	10	250,000,000.00	10	250,000,000.00	50	SKPD yang menangani Kominfo	
		Misi 3	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah yang terintegrasi	SIM				2	500,000,000.00	1	500,000,000.00	1	500,000,000.00	2	500,000,000.00	2	500,000,000.00	8	SKPD yang menangani Kominfo	
11	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah																			
	Program penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Misi 2	Tersedianya RUKM Centre	Unit	0			1	2,000,000,000									1	SKPD yang menangani Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Misi 2	Meningkatnya koperasi aktif	Koperasi	393	413	150,000,000	433	157,500,000	455	165,375,000	478	173,643,750	502	182,325,938	527	191,442,234	527	SKPD yang menangani Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
		Misi 2	Meningkatnya Jumlah UMKM	UMKM	33731	33,931		34,131		34,331		34,531		34,731		34,931		35,131	SKPD yang menangani Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Misi 2	Jumlah Fasilitas Merek Produk UKM Teregistrasi HAKI	Merek	0			100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	500	SKPD yang menangani Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Misi 2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	%	0	10	350,000,000	10	350,000,000	10	350,000,000	10	350,000,000	10	350,000,000	10	350,000,000	60	SKPD yang menangani Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
12	Penanaman Modal																			
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Misi 2	Jumlah Pelaku Usaha yang dibina	Pelaku Usaha	50	25	50,000,000	50	150,000,000	50	150,000,000	50	150,000,000	50	150,000,000	50	150,000,000	275	SKPD yang menangani Penanaman Modal	
		Misi 2	Jumlah Promosi Investasi	Promosi	5	5	750,000,000	5	750,000,000	5	750,000,000	5	750,000,000	5	750,000,000	5	750,000,000	30	SKPD yang menangani Penanaman Modal	
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Misi 2	Jumlah investor (PMDN/PMA)	Investor	684	718	-	754	500,000,000	792	600,000,000	831	50,000,000	873	50,000,000	917	150,000,000	4,885	SKPD yang menangani Penanaman Modal	
		Misi 2	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	Rp.	174,299,000,000	183,013,950,000		192,164,648,000		201,772,880,000		211,861,524,000		222,454,600,000		233,577,330,000		1,244,844,932,000		SKPD yang menangani Penanaman Modal
		Misi 2	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi	Rp.	17,910,000,000	8,714,950,000		9,150,698,000		9,608,232,000		10,088,644,000		20,681,720,000		21,715,806,000		79,960,050,000		SKPD yang menangani Penanaman Modal
		Misi 2	Tenaga kerja	Orang	1,933	2,030		2,131		2,238		2,350		2,467		2,590		13,806		SKPD yang menangani Penanaman Modal
	Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu	Misi 2																		SKPD yang menangani Penanaman Modal
	Program Pelayanan Kebijakan Teknis Perijinan	Misi 2	Cakupan Pelayanan Kebijakan Teknis Perijinan	%	200,000,000	100	765,000,000	100	803,250,000	100	843,412,500	100	885,583,125	100	929,862,281	100	976,355,395	976,355,395		SKPD yang menangani Penanaman Modal

No.	Bidang Urusan Pemerintahan	Keterkaitan dengan Misi	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Akhir RPJMD	SKPD Penanggungjawab
						Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Misi 2	Terlaksananya Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	%	0	100	600,000,000	100	630,000,000	100	661,500,000	100	694,575,000	100	729,303,750	100	765,768,938	765,768,938	SKPD yang menangani Penanaman Modal
	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	Misi 2	Terlaksananya Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	%	0	100	25,000,000	100	26,250,000	100	27,562,500	100	28,940,625	100	30,387,656	100	31,907,039	31,907,039	SKPD yang menangani Penanaman Modal
13	Kepemudaan dan Olahraga																		
	Program Pendidikan Pemuda dan Olah raga	Misi 1	Jumlah prestasi tingkat propinsi	Siswa	26	27	500,000,000	28	500,000,000	29	500,000,000	30	500,000,000	31	500,000,000	32	500,000,000	177	SKPD yang menangani Kepemudaan dan Olahraga
		Misi 1	Jumlah prestasi tingkat Nasional	Siswa	1	2	500,000,000	4	500,000,000	5	500,000,000	7	500,000,000	8	500,000,000	8	500,000,000	34	SKPD yang menangani Kepemudaan dan Olahraga
	Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Misi 1	Persentase ketersediaan kompleks pengembangan olahraga	%	0	10	500,000,000	10	500,000,000	13	500,000,000	23	500,000,000	23	500,000,000	23	500,000,000	23	SKPD yang menangani Kepemudaan dan Olahraga
14	Statistik;																		
	Program Penyediaan Data Pembangunan	Misi 3	Tersedianya Buku Kabupaten Tasikmalaya dalam Angka	%	100	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	SKPD yang menangani Statistik
		Misi 3	Tersedianya Buku PDRB Kabupaten Tasikmalaya	%	100	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	SKPD yang menangani Statistik
	Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Misi 3	Meningkatnya Kapasitas Basis Data Perencanaan Pembangunan	%	Tersedia Sistem Basis Data	10	500,000,000	20	1,000,000,000	20	1,000,000,000	20	1,000,000,000	20	1,000,000,000	10	500,000,000	100	SKPD yang menangani statistik
15	Persandian																		
	Program Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	Misi 3	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota.																SKPD yang menangani Persandian
	Program Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah kabupaten/kota	Misi 3	Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah kabupaten/kota																SKPD yang menangani Persandian
16	Kebudayaan																		
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Misi 1	Apresiasi pemerintah terhadap seniman dan budayawan	Orang	0	4	200,000,000	4	200,000,000	6	300,000,000	6	300,000,000	6	350,000,000	6	350,000,000	32	SKPD yang menangani Kebudayaan
		Misi 1	Jumlah grup kesenian	grup	50			73	100,000,000	85	150,000,000	100	200,000,000	150	300,000,000	150	300,000,000	150	SKPD yang menangani Kebudayaan
		Misi 1	Tersedianya Gedung Kesenian	unit						1	3,000,000,000					1	10,000,000,000	2	SKPD yang menangani Kebudayaan
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Misi 1	Perlindungan bangunan cagar budaya	buah	9	9	150,000,000	9	150,000,000	9	200,000,000	9	200,000,000	9	300,000,000	9	300,000,000	9	SKPD yang menangani Kebudayaan
		Misi 1	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya		3			1	500,000,000	1	750,000,000	1	900,000,000			6		6	SKPD yang menangani Kebudayaan
		Misi 1	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	buah	41			41	100,000,000	41	100,000,000	53	150,000,000	57	200,000,000	57	200,000,000	57	SKPD yang menangani Kebudayaan
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Misi 1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kegiatan	8	8	405,000,000	10	450,000,000	12	500,000,000	15	750,000,000	18	850,000,000	53	850,000,000	53	SKPD yang menangani Kebudayaan
17	Perpustakaan																		
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Misi 1	Jumlah perpustakaan	Buah	1	-	500,000,000	-	500,000,000	-	500,000,000	-	500,000,000	1	500,000,000	-	500,000,000	1	SKPD yang menangani Perpustakaan
		Misi 1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	9883	10,000		10,000		11,000		11,000		12,000		12,000		98596	SKPD yang menangani Perpustakaan
		Misi 1	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eksemplar	14713	2,000	100,000,000	3,000	120,000,000	4,000	140,000,000	5,000	160,000,000	6,000	180,000,000	6,000	180,000,000	34713	SKPD yang menangani Perpustakaan
18	Kearsipan																		
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Misi 1	E-Filing penyelenggaraan kearsipan	Paket	1	1	100,000,000			1	100,000,000			1	100,000,000			3	SKPD yang menangani Kearsipan
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Misi 1	Pengelolaan arsip secara baku	Arsip (boks)	758	20	80,000,000	20	80,000,000	20	80,000,000	20	80,000,000	20	80,000,000	20	80,000,000	20	SKPD yang menangani Kearsipan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan	Keterkaitan dengan Misi	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Akhir RPJMD	SKPD Penanggungjawab
						Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Misi 1	Cakupan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	%	100	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	SKPD yang menangani Kearsipan
	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Misi 1	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi	%	100	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	SKPD yang menangani Kearsipan
C Urusan Pilihan																			
1 Kelautan dan Perikanan																			
	Program pengembangan budidaya perikanan	Misi 2	Produksi perikanan	Ton	56,890	48,989	12,750,000,000	51,438	13,900,000,000	54,010	18,050,000,000	56,711	16,050,000,000	59,546	14,350,000,000	61,630	14,500,000,000	59,546	SKPD yang menangani Kelautan dan Perikanan
	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Misi 2	Produksi perikanan tangkap	Ton	1,183.86	1,347	61,450,000,000	1,388	5,050,000,000	1,429	5,050,000,000	1,472	5,650,000,000	1,516	5,050,000,000	1,539	5,000,000,000	1,516	SKPD yang menangani Kelautan dan Perikanan
		Misi 2	Cakupan bina kelompok nelayan	Kelompok	-	3		5		5		5		5		5		5	SKPD yang menangani Kelautan dan Perikanan
		Misi 2	Produksi perikanan kelompok nelayan																SKPD yang menangani Kelautan dan Perikanan
	Program Peningkatan Usaha Perikanan	Misi 2	Meningkatnya Produksi dan Usaha Pengolahan Hasil Pertanian				800,000,000		800,000,000		2,500,000,000		2,000,000,000		1,800,000,000		1,800,000,000		SKPD yang menangani Kelautan dan Perikanan
		Misi 2	Produksi Hasil Olahan	Ton	108,560	113,988		119,687		125,672		131,955		138,553		144,000		138,553	SKPD yang menangani Kelautan dan Perikanan
		Misi 2	Jumlah Usaha Pengolahan Hasil	Unit	123.00	149		164		180		198		218		240		218	SKPD yang menangani Kelautan dan Perikanan
2 Pariwisata																			
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Misi 2	Kunjungan wisata		924,974	992,864	375,000,000	1,082,114	600,000,000	1,200,996	900,000,000	1,356,923	1,200,000,000	1,560,199	1,500,000,000	1,560,199	1,560,199	8,649,568	SKPD yang menangani Pariwisata
		Misi 2	- Wisatawan Nusantara	orang	921,575	989,295		1,078,331		1,196,948		1,352,551		1,555,434		1,555,434		8,649,568	SKPD yang menangani Pariwisata
		Misi 2	- Wisatawan Mancanegara	orang	3,399	3,569		3,783		4,048		4,372		4,765		4,765		28,701	SKPD yang menangani Pariwisata
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Misi 2	Jumlah obyek wisata/ daya tarik wisata (DTW) yang siap dikunjungi				740,000,000		6,000,000,000		6,500,000,000		7,500,000,000		7,500,000,000		7,500,000,000		SKPD yang menangani Pariwisata
		Misi 2	- Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW)	DTW	11	1		2		3		3		3		23		46	SKPD yang menangani Pariwisata
		Misi 2	- Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW) unggulan yang telah direhabilitasi dan siap dikunjungi	DTW	6	1		1		1		1		1		11		22	SKPD yang menangani Pariwisata
	Program Pengembangan Kemitraan	Misi 2	Partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan				220,000,000		400,000,000		500,000,000		600,000,000		700,000,000		700,000,000		SKPD yang menangani Pariwisata
		Misi 2	- Pembinaan usaha jasa wisata	Keg.		1		2		4		4		4		15		30	SKPD yang menangani Pariwisata
		Misi 2	- Jumlah masyarakat yg berperan aktif dalam kepariwisataan (kompepar)	Orang		200		250		300		400		450		450		2,050	SKPD yang menangani Pariwisata
3 Pertanian																			
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Misi 2	Cakupan bina kelompok petani	Kelompok	2,215	2,215	200,000,000	2,215	300,000,000	2,215	400,000,000	2,215	400,000,000	2,215	500,000,000	2,215	600,000,000	2,215	SKPD yang menangani Pertanian
		Misi 2	Cakupan bina kelompok petani	Kelompok		3	90,000,000	6	180,000,000	9	270,000,000	12	360,000,000	15	450,000,000			45	SKPD yang menangani Pertanian
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	Misi 2	Frekuensi Gelar Produk dan Pameran Hasil Pertanian	Kali		1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	6	SKPD yang menangani Pertanian

No.	Bidang Urusan Pemerintahan	Keterkaitan dengan Misi	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Akhir RPJMD	SKPD Penanggungjawab
						Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
		Misi 2	Terlaksananya promosi hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan	Keg		1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000			5	SKPD yang menangani Pertanian
	Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Misi 2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar																SKPD yang menangani Pertanian
		Misi 2	Produksi padi	Ton	813,064	843,709	4,500,000,000	844,975	4,725,000,000	846,242	4,961,250,000	847,511	5,209,312,500	848,783	5,469,778,125	857,271	5,527,210,795	865,759	SKPD yang menangani Pertanian
		Misi 2	Produksi Palawija	Ton	458,366	463,760	4,500,000,000	463,760	4,725,000,000	464,455	4,961,250,000	465,152	5,209,312,500	465,850	5,469,778,125	470,509	5,527,210,795	475,168	SKPD yang menangani Pertanian
		Misi 2	Produksi Sayuran	Ton	19,624	14,649	1,000,000,000	14,838	1,100,000,000	14,974	1,200,000,000	15,138	1,300,000,000	15,275	1,400,000,000	15,428	1,500,000,000	15,581	SKPD yang menangani Pertanian
		Misi 2	Produksi Buah-Buahan	Ton	334,179	337,317	6,250,000,000	340,559	6,562,500,000	343,833	6,890,625,000	347,139	7,235,156,250	350,479	7,596,914,063	353,984	7,676,681,661	357,489	SKPD yang menangani Pertanian
		Misi 2	Produksi Tanaman Obat/Biofarmaka	kg	6,899	9,139	200,000,000	9,231	210,000,000	9,323	220,500,000	9,416	231,525,000	9,511	243,101,250	9,606	245,653,813	9,701	SKPD yang menangani Pertanian
		Misi 2	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan	%		1	1,330,000,000	1	1,330,000,000	1	1,330,000,000	1	1,330,000,000	1	1,330,000,000			5	SKPD yang menangani Pertanian
	Program Pengembangan Pertanian Ramah Lingkungan	Misi 2	Luas Pertanian Ramah Lingkungan	Ha	8,828	8,500	15,000,000,000	8,500	15,000,000,000	8,500	15,000,000,000	8,500	15,000,000,000	8,500	15,000,000,000	8,585	15,000,000,000	8,585	SKPD yang menangani Pertanian
	Program Pengembangan dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian	Misi 2	Luas Irigasi Tersier	Ha	15,112	1,500	6,000,000,000	1,500	6,300,000,000	2,000	6,615,000,000	2,000	6,945,750,000	2,000	7,293,037,500	2,000	7,369,614,394	11,000	SKPD yang menangani Pertanian
		Misi 2	JUT (Jalan Usaha Tani)	Km	19	3	675,000,000	3	708,750,000	3	744,187,500	3	781,396,875	3	820,466,719	3	829,081,620	3	SKPD yang menangani Pertanian
		Misi 2	Perluasan areal lahan pertanian melalui cetak sawah	Ha	50	100	1,100,000,000	100	1,155,000,000	100	1,212,750,000	100	1,273,387,500	100	1,337,056,875	100	1,351,095,972	600	SKPD yang menangani Pertanian
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Misi 2	Luas Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Ha	6,500	5,000	13,000,000,000	5,100	13,100,000,000	5,200	13,200,000,000	5,300	13,300,000,000	5,400	13,400,000,000	5,500	13,500,000,000	5,500	SKPD yang menangani Pertanian
	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan	Misi 2	Luas Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan	Ha	0	50	3,000,000,000	55	3,200,000,000	60	3,500,000,000	65	3,700,000,000	65	4,000,000,000	65	4,500,000,000	65	SKPD yang menangani Pertanian
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Misi 2	Tersedianya fasilitas penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Unit		4	970,500,000	6	950,000,000	9	2,460,000,000	10	2,420,000,000	10	2,420,000,000			39	SKPD yang menangani Pertanian
	Program Pengendalian Penanggulangan Penyakit Hewan dan Penjaminan Pangan Asal Ternak	Misi 2	Meningkatnya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular				1,600,000,000		1,350,000,000		1,200,000,000		1,450,000,000		1,450,000,000		1,450,000,000		SKPD yang menangani Pertanian
		Misi 2	Vaksinasi AI	Ekor	200,000	200,000		260,000		270,000		280,000		290,000		300,000		290,000	SKPD yang menangani Pertanian
		Misi 2	Vaksinasi Rabies	Ekor	6,000	6,000		6,000		5,800		5,700		5,600		550,000		5,600	SKPD yang menangani Pertanian
		Misi 2	Eliminasi HPR	Ekor	4,000	5,000		6,000		7,000		8,000		9,000		9,000		9,000	SKPD yang menangani Pertanian
		Misi 2	Meningkatnya Pelayanan Pengobatan Penyakit Hewan																SKPD yang menangani Pertanian
		Misi 2	Pelayanan Pengobatan	Ekor	15,400	16,000		16,350		16,500		16,650		16,800		16,850		16,800	SKPD yang menangani Pertanian
		Misi 2	Meningkatnya Pelayanan Kesmaret				1,050,000,000		2,350,000,000		950,000,000		450,000,000		450,000,000		500,000,000		SKPD yang menangani Pertanian
		Misi 2	Pemeriksaan Hewan Qurban	Ekor	5,500	5,600		5,700		5,800		5,900		6,000		6,100		6,000	SKPD yang menangani Pertanian
		Misi 2	Fasilitasi Penerbitan NKV	Dokumen	-	5		10		15		20		25		30		25	SKPD yang menangani Pertanian
		Misi 2	Monitoring dan Surveillance Residu Kimia dan Cemaran Mikroba Produk Asal Ternak	Sampel	20	50		75		100		125		150		160		150	SKPD yang menangani Pertanian
	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Misi 2	Meningkatnya Produksi				9,800,000,000		10,950,000,000		11,000,000,000		11,500,000,000		11,000,000,000		12,000,000,000		SKPD yang menangani Pertanian

No.	Bidang Urusan Pemerintahan	Keterkaitan dengan Misi	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Akhir RPJMD	SKPD Penanggungjawab	
						Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			
		Misi 2	Daging	Ton	62,456.41	64,255		66,183		68,168		70,213		72,320		73,405		72,320	SKPD yang menangani Pertanian	
		Misi 2	Telur	Ton	12,138.00	12,714		13,096		13,489		13,893		14,310		14,525		14,310	SKPD yang menangani Pertanian	
		Misi 2	Susu	Ton	3,428.00	3,395		3,496		3,601		3,709		3,821		3,878		3,821	SKPD yang menangani Pertanian	
	Program Peningkatan Usaha Peternakan	Misi 2	Meningkatnya Produksi dan Usaha Pengolahan Hasil Peternakan					1,250,000,000		1,550,000,000		1,950,000,000		1,950,000,000		1,950,000,000			SKPD yang menangani Pertanian	
		Misi 2	Produksi Hasil Olahan	Ton	946,708.00	965,642		984,955		1,004,654		1,024,747		1,045,242		1,057,785		1,045,242	SKPD yang menangani Pertanian	
		Misi 2	Jumlah Usaha Pengolahan Hasil	Unit	130.00	133		136		139		142		145		148		145	SKPD yang menangani Pertanian	
4	Kehutanan																			
	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Misi 2	Tingkat Capaian Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan (%)	%	40	45	180,000,000	48	233,000,000	50	333,000,000	52	385,000,000	55	438,000,000	55	491,000,000	55	SKPD yang menangani Kehutanan	
	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Misi 2	Persentase Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	30	15	1,941,380,000	15	1,941,380,000	15	1,941,380,000	10	1,941,380,000	10	1,941,380,000	5	1,941,380,000	100	SKPD yang menangani Kehutanan	
	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Misi 2	Rehabilitasi Sumber Mata Air	Mata Air		10	372,000,000	15	345,000,000	20	345,000,000	25	345,000,000	30	345,000,000	30	345,000,000	30	SKPD yang menangani Kehutanan	
	Program perencanaan dan pengembangan hutan	Misi 2	Tersusunannya Dokumen Perencanaan Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Dokumen		2	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000	3	SKPD yang menangani Kehutanan	
5	Energi dan Sumber Daya Mineral																			
	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Misi 4	Pendataan Hasil Produksi Pertambangan	Kec		7	50,000,000	7	50,000,000	8	50,000,000	12	75,000,000	12	75,000,000	12	75,000,000	12	SKPD yang menangani Energi dan Sumber Daya Mineral	
	Program Bidang Air Bawah Tanah	Misi 4	Pengawasan dan Pengendalian Pengguna Air Tanah	Kec.	20	20	50,000,000	20	50,000,000	20	50,000,000	20	50,000,000	20	50,000,000	20	50,000,000	20	SKPD yang menangani Energi dan Sumber Daya Mineral	
		Misi 4	Pembuatan Sumur Pantek	Unit	7	3	200,000,000	5	350,000,000	5	350,000,000	5	350,000,000	5	350,000,000	5	350,000,000	23	SKPD yang menangani Energi dan Sumber Daya Mineral	
		Misi 4	Inventarisasi Potensi Air Tanah Dengan Metode Pengukuran Geolistrik	Kec.	6	5	50,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	61	SKPD yang menangani Energi dan Sumber Daya Mineral	
		Misi 4	Pembuatan Sumur Bor Dalam	Unit	3	3	1,000,000,000	3	1,000,000,000	3	1,000,000,000	3	1,000,000,000	3	1,000,000,000	3	1,000,000,000	15	SKPD yang menangani Energi dan Sumber Daya Mineral	
	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Misi 4	Pemasangan Sambungan Rumah-Instalasi Rumah (SR-IR) bagi Keluarga Miskin	Kec	39	39	350,000,000	39	350,000,000	39	350,000,000	39	350,000,000	39	350,000,000	39	350,000,000	39	SKPD yang menangani Energi dan Sumber Daya Mineral	
		Misi 4	Pemasangan SR-IR bagi Sarana Keagamaan	Kec	39	39	100,000,000	39	150,000,000	39	150,000,000	39	150,000,000	39	200,000,000	39	200,000,000	39	SKPD yang menangani Energi dan Sumber Daya Mineral	
		Misi 4	Ratio Elektrifikasi	%	73.32	75		84		89		95		100		100		100	SKPD yang menangani Energi dan Sumber Daya Mineral	
6	Perdagangan																			
	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Misi 2	Jumlah Kasus Pengaduan Konsumen yang Diselesaikan	%		100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	100	SKPD yang menangani Perdagangan
	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Misi 2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%		10	1,000,000,000	20	2,000,000,000	20	2,000,000,000	20	2,000,000,000	20	2,000,000,000	10	2,000,000,000	100	100	SKPD yang menangani Perdagangan
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	Misi 2	Persentase pembangunan/revitalisasi pasar di 5 kecamatan	%		10		10		13		23		23		23		100	100	SKPD yang menangani Perdagangan
7	Perindustrian																			
	Program peningkatan kemampuan teknologi industri																			
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Misi 2	Peningkatan Pembinaan IKM	%		10	1,000,000,000	10	1,000,000,000	10	1,000,000,000	10	1,000,000,000	10	1,000,000,000	10	1,000,000,000	60	60	SKPD yang menangani Perindustrian
	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Misi 2	Terwujudnya Sentra Industri Potensial	Sentra				1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	5	5	SKPD yang menangani Perindustrian
8	Transmigrasi																			

No.	Bidang Urusan Pemerintahan	Keterkaitan dengan Misi	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Akhir RPJMD	SKPD Penanggungjawab	
						Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Misi 1	Bertambahnya Wilayah Transmigrasi	Lokasi		1	400,000,000	2	800,000,000	2	825,000,000	2	850,000,000	2	875,000,000	2	875,000,000	2	SKPD yang menangani Transmigrasi	
	Program Transmigrasi Lokal	Misi 1	Jumlah Transmigran Lokal	KK		40	30,000,000	50	40,000,000	60	50,000,000	70	60,000,000	80	70,000,000	80	70,000,000	80	SKPD yang menangani Transmigrasi	
	Program Transmigrasi Regional	Misi 1	Jumlah Transmigran swakarsa	KK		11	50,000,000	15	75,000,000	15	75,000,000	15	50,000,000	20	75,000,000	20	50,000,000	20	SKPD yang menangani Transmigrasi	
D. Aspek Perencanaan, Pengawasan Serta Aspek Penunjang Lainnya																				
1 Perencanaan																				
	Program kerjasama pembangunan	Misi 3	Jumlah kerjasama	buah	3	3	350,000,000	4	400,000,000	5	425,000,000	5	425,000,000	5	450,000,000	5	450,000,000	5	5	
	Program peningkatan perencanaan dan anggaran SKPD		jumlah dokumen perencanaan SKPD	buah	3	3	350,000,000	3	400,000,000	3	425,000,000	3	425,000,000	3	450,000,000	3	450,000,000	3	3	
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya		Jumlah dokumen perencanaan bidang sosbud	buah	-	5	500,000,000	5	500,000,000	6	800,000,000	6	800,000,000	7	850,000,000	7	850,000,000	7	7	
	Program perencanaan pembangunan daerah	Misi 3	Tersedianya dokumen RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Dokumen	1													1	SKPD yang menangani perencanaan	
		Misi 3	Tersedianya Dokumen RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Dokumen	1	1	500,000,000										1	500,000,000	1	SKPD yang menangani Perencanaan
		Misi 3	Tersedianya Dokumen : RKPD yg telah ditetapkan dgn	Dokumen	1	1	250,000,000	1	250,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	350,000,000	6	SKPD yang menangani Perencanaan	
2 Keuangan																				
	Program optimalisasi pengelolaan aset daerah	Misi 3	Peningkatan Aset Daerah yang mempunyai bukti kepemilikan yang sah	Bidang Tanah	213	25	6,808,200,000	15	550,000,000	15	1,300,000,000	15	400,000,000	15	670,000,000	15	510,000,000	15	SKPD yang menangani Keuangan	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Misi 3	Opini Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	WDP/WTP	WTP	WTP	377,000,000	WTP	370,000,000	WTP	420,000,000	WTP	324,000,000	WTP	490,000,000	WTP	505,000,000	WTP	SKPD yang menangani Keuangan	
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Misi 3	Penyusunan APBD yang tepat waktu	Ketepatan Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	260,200,000	Tepat waktu	2,489,000,000	Tepat waktu	2,421,000,000	Tepat waktu	2,503,000,000	Tepat waktu	2,585,000,000	Tepat waktu	2,663,000,000	Tepat waktu	SKPD yang menangani Keuangan	
		Misi 3	Kesesuaian pengalokasian anggaran terhadap peraturan perundangan dalam hal :																SKPD yang menangani Keuangan	
		Misi 3	1. Pendidikan	Kesesuaian	Sesuai	Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai	SKPD yang menangani Keuangan	
		Misi 3	2. Kesehatan	Kesesuaian	Sesuai	Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai	SKPD yang menangani Keuangan	
		Misi 3	3. ADD	Kesesuaian	Sesuai	Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai	SKPD yang menangani Keuangan	
	Program peningkatan dan pengembangan pendapatan daerah	Misi 3	Pertumbuhan PAD	%	-	5	5,497,600,000	5	5,489,000,000	5	5,691,000	5	5,973,000,000	5	5,451,000,000	5	4,879,000,000	5	SKPD yang menangani Keuangan	
3 Kepegawaian;																				
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Rasio pegawai yang berkompeten sesuai dengan bidangnya	%	100	100	550,000,000	100	400,000,000	100	400,000,000	100	400,000,000	100	400,000,000	100	400,000,000	100	100	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Misi 3	Persentase keterlaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	%		100	3,500,000,000	100	4,930,000,000	100	5,050,000,000	100	5,200,000,000	100	5,739,230,000	100	5,525,000,000	100	SKPD yang menangani Kepegawaian	
4 Pendidikan dan pelatihan;																				
	Program Pendidikan dan Pelatihan	Misi 3	Persentase keterlaksanaan program peningkatan keterampilan dan profesionalisme jumlah ASN	%		100	4,427,336,700	100	8,132,500,000	100	19,093,550,000	100	19,959,930,000	100	23,685,223,000	100	8,749,300,000	100	SKPD yang menangani Pendidikan dan Pelatihan	
5 Penelitian dan pengembangan;																				

No.	Bidang Urusan Pemerintahan	Keterkaitan dengan Misi	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Akhir RPJMD	SKPD Penanggungjawab
						Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
	Program Pengkajian Penggalan Pembangunan Khazanah Potensi Daerah	Misi 3	Jumlah Kajian Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Komprehensif dan Ilmiah	Kali	19	4	700,000,000.00	4	1,100,000,00.00	5	1,300,000,000.00	4	1,500,000,000	5	1,500,000,000	3	600,000,000	44	SKPD yang menangani Penelitian dan Pengembangan
6	fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.																		
a	Pengawasan;																		
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Misi 3	Prosentase cakupan obrik yang diperiksa	%		47	1,744,229,000	47	2,018,651,900	47	2,215,516,200	47	2,437,067,850	47	2,675,275,445	47	11,090,740,395	47	SKPD yang menangani Pengawasan
		Misi 3	Prosentase jumlah SKPD yang menerapkan SPIP	%		2	100,000,000		110,000,000	3	231,000,000	5	254,000,000	5	279,500,000	9	1,000,000,000	24	SKPD yang menangani Pengawasan
	Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Misi 3	Prosentase Laporan yg dikerjakan	%		100	304,080,000	100	611,488,000	100	672,636,800	100	739,900,480	100	813,890,528	100	3,141,995,808	100	SKPD yang menangani Pengawasan
b	Sekretariat Daerah;																		
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah																		
	Program Peningkatan Kepedulian sosial dan peran Lembaga Keagamaan	Misi 1	Meningkatnya jumlah zakat, infaq dan sadaqoh																
		Misi 1	Zakat Fitrah	Rp	966,755,925	990,924,823		1,015,697,944		1,041,090,392		1,067,117,652		1,093,795,593		1,121,140,483		6,329,766,888	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Misi 1	Zakat Profesi	Rp	1,700,613,819	1,743,129,164		1,786,707,394		1,831,375,078		1,877,159,455		1,924,088,442		1,972,190,653		11,134,650,186	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Misi 1	Meningkatnya jumlah muzaki																SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Misi 1	Zakat Fitrah	Muzaki	1,080,123	1,107,126		1,134,804		1,163,174		1,192,254		1,222,060		1,252,612		1,252,612	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Misi 1	Zakat Profesi	Muzaki	2,635	2,701		2,768		2,838		2,909		2,981		3,056		3,056	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
	Program Peningkatan Pemahaman Nilai Keagamaan	Misi 1	Cakupan penanganan konflik sosial berlatar belakang agama	%		100		100		100		100		100		100		100	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Misi 1	Cakupan Ajengan Masuk Sekolah (AMS)	%		15		15		15		15		15		15		90	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Misi 1	Persentase anak usia sekolah yang mengikuti program Magrib Mengaji	%		10		20		30		40		50		60		60	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Misi 1	Persentase masyarakat yang mampu baca tulis huruf arab (Usia 15 tahun ke atas)	%		40		50		60		70		80		90		90	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Misi 1	Jumlah sarana keagamaan yang mendapat bantuan	Mesjid Kecamatan				8		8		8		8		7		39	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Misi 1	Meningkatnya prestasi pada kegiatan keagamaan																SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Misi 1	MTQ	Ranking	1	1		1		1		1		1		1		1	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah

No.	Bidang Urusan Pemerintahan	Keterkaitan dengan Misi	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Akhir RPJMD	SKPD Penanggungjawab
						Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
		Misi 1	STQ	Ranking	5	3		3		2		2		1		1		1	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Misi 1	Mufakat	Ranking	1	1		1		1		1		1		1		1	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
	Program Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidikan Keagamaan	Misi 1	Jumlah Bantuan Stimulan Guru Madrasah Diniyah	Rp/Bulan	0	150,000		150,000		150,000		150,000		150,000		150,000		150,000	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Misi 1	Jumlah Guru Madrasah Diniyah		21,375	21,425		21,475		21,525		21,575		21,625		21,675		21,725	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Misi 1	Jumlah Insentif Ajengan			1,500,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Misi 1	Jumlah Insentif Amil Desa			100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan	Misi 1	Terbangunnya Islamic Center	%	0	10		30		100								100	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Misi 1	Madrasah	Madrasah	4530	4,575		4,621		4,667		4,714		4,761		4,809		4,857	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Misi 1	Pondok Pesantren	Pondok Pesantren	750	758		765		773		780		788		796		804	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Misi 1	Masjid	Masjid	4650	4,673		4,697		4,720		4,744		4,767		4,791		4,815	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Misi 1	Cakupan Pondok Pesantren Mendapat Bantuan Operasional	%	0	10		15		20		25		30		35		35	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
	Programa Pelayanan Kegiatan Keagamaan	Misi 1	Cakupan Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji	%		100		100		100		100		100		100		100	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Misi 1	Cakupan Fasilitas Kegiatan PHBI Tingkat Kabupaten dan Kecamatan	%	0	100		100		100		100		100		100		100	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Misi 3	Jumlah kerjasama Pemerintah Daerah	MoU	0	7	30,000,000	8	30,000,000	9	30,000,000	10	30,000,000	11	30,000,000	12	30,000,000	57	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Misi 3					1,400,000,000		1,000,000,000		1,100,000,000		1,200,000,000		1,250,000,000		1,300,000,000		SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Misi 3	Rancangan produk hukum yg terfasilitasi	%	100	100		100		100		100		100		100		100	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Misi 3	Produk hukum yg tersosialisasikan	%	100	100		100		100		100		100		100		100	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Misi 3	Produk hukum yg dipublikasikan secara on line	%	100	100		100		100		100		100		100		100	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Misi 3	Prosentase Fasilitas Persiapan Daerah Otonomi Baru	%	100	100	187,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	10,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Misi 3	Cakupan Pelayanan Administrasi Kecamatan	Kecamatan	39	1	50,000,000	39	150,000,000	1	60,000,000	39	175,000,000	1	65,000,000	39	200,000,000	39	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Misi 3	Cakupan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Kecamatan	0			10	1,500,000,000	10	1,500,000,000	10	1,500,000,000	9	1,350,000,000			39	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
	Penataan Kelembagaan	Misi 3					1,400,000,000		1,850,000,000		475,000,000		350,000,000		500,000,000		600,000,000		SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Misi 3	Kesesuaian SKPD berdasarkan PP	%	100	100		100		100		100		100		100		100	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Misi 3	SKPD yang memiliki UTU	%	100	100		100		100		100		100		100		100	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
		Misi 3	SKPD yang memiliki informasi jabatan	%	100	100		100		100		100		100		100		100	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah

No.	Bidang Urusan Pemerintahan	Keterkaitan dengan Misi	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Akhir RPJMD	SKPD Penanggungjawab		
						Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)				
		Misi 3	SKPD yang telah dijab	%	37	37	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah		
		Misi 3	SKPD yang telah diatur Tahubja	buah	1	-	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah		
	Penataan Ketatalaksanaan	Misi 3					80,000,000	450,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	10	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah		
		Misi 3	Jumlah Pedoman dan Metoda Kerja yang disusun	buah	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah		
		Misi 3	Penerapan SPM	Lap/draf urusan	1/15	1	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah		
	Peningkatan Pelayanan Publik	Misi 3	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Kategori Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah		
	Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran	Misi 3	Ketersediaan dokumen perencanaan(Renstra,Renja,DPA)	%	100	100	155,000,000	100	125,000,000	100	125,000,000	100	125,000,000	100	125,000,000	100	125,000,000	100	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah		
	Pemantauan, Pengevaluasian serta Pelaporan Pembangunan daerah	Misi 3	Ketersediaan E-procurement	%		100	947,750,000	100	3,372,750,000	100	3,400,000,000	100	3,900,000,000	100	3,900,000,000	100	3,900,000,000	100	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah		
		Misi 3	Pengadaan barjas melalui ULP	paket	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah		
	Peningkatan Sistem Pelaporan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Misi 3	Ketepatan waktu penyerahan laporan kinerja dan keuangan	%	100	100	385,000,000	100	430,000,000	100	430,000,000	100	430,000,000	100	430,000,000	100	430,000,000	100	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah		
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Misi 3	Cakupan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	jumlah orang		903	535,000,000	861	2,600,000,000	861	2,600,000,000	861	2,600,000,000	861	2,600,000,000	861	2,600,000,000	861	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah		
		Misi 3	Frekuensi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	kali		1	50,000,000	66	300,000,000	1	50,000,000	198	2,500,000,000	4	500,000,000	63	3,400,000,000	333	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah		
c	Sekretariat Dewan																				
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Misi 3	Terfasilitasinya pembahasan Ranperda	Frekuensi	10	29	433,333,300	29	533,333,300	29	533,333,300	29	533,333,300	29	533,333,300	29	533,333,300	10	533,333,300	155	SKPD yang menangani Kesekretariatan DPRD
		Misi 3	Terfasilitasinya penyelenggaraan kegiatan Penyerapan aspirasi (Reses)	Frekuensi	3	3	3,807,240,000	3	6,347,010,000	3	6,347,010,000	3	6,347,010,000	3	6,347,010,000	3	6,347,010,000	3	6,347,010,000	18	SKPD yang menangani Kesekretariatan DPRD
		Misi 3	Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	Frekuensi	8	8	2,084,770,000	8	5,656,930,000	8	5,656,930,000	8	5,656,930,000	8	5,656,930,000	8	5,656,930,000	8	5,656,930,000	48	SKPD yang menangani Kesekretariatan DPRD
		Misi 3	Terfasilitasinya penyelenggaraan Fungsi	Frekuensi	120	120	1,383,200,000	120	1,800,000,000	120	1,800,000,000	120	1,800,000,000	120	1,800,000,000	120	1,800,000,000	120	1,800,000,000	720	SKPD yang menangani Kesekretariatan DPRD

BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Skenario dan asumsi hasil pembangunan daerah tahun 2016-2021 berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025, hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai tahun 2015, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2021.

Indikator kinerja daerah yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari Indikator makro serta indikator kinerja daerah lainnya yang disusun berdasarkan bidang urusan. Target indikator makro Kabupaten Tasikmalaya untuk Tahun 2016 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 9.1
Target Indikator Makro Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021

No	Indikator Makro	Kondisi Awal Tahun 2015	Target					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Pembangunan Manusia*	63.17	63.75	64.38	64.99	65.60	66.21	66.81
	Angka Harapan Hidup (th)	68.36	68.52	68.63	68.73	68.83	68.94	69.04
	Angka Harapan Sekolah (AHS)	12.44	12.78	13.19	13.60	14.01	14.42	14.83
	Rata-rata Lama Sekolah (th)	6.88	6.94	7.01	7.08	7.15	7.22	7.28
	Pengeluaran (Ribuan Rp)	6,934.28	6,997.09	7,049.55	7,102.02	7,154.49	7,206.96	7,259.42
	Indeks Kesehatan	74.40	74.65	74.81	74.97	75.13	75.29	75.45
	Indeks Pendidikan	57.49	58.61	59.99	61.36	62.74	64.11	65.49

No	Indikator Makro	Kondisi Awal Tahun 2015	Target					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Indeks Harapan Sekolah	69.11	70.97	73.26	75.55	77.84	80.12	82.41
	Indeks Rata-Rata Lama Sekolah	45.87	46.26	46.72	47.18	47.64	48.10	48.57
	Indeks Pengeluaran	58.95	59.22	59.45	59.68	59.90	60.13	60.35
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	1,735,998	1,742,942	1,749,914	1,756,913	1,763,941	1,770,997	1,778,081
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
4	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	208,120	202,181	197,740	193,260	188,742	184,184	179,586
	Proporsinya terhadap jumlah penduduk total	11.99	11.69	11.39	11.09	10.79	10.49	10.19
5	PDRB (berlaku) (Rp Trilyun)	25,309	27,389	29,657	32,113	34,758	37,591	40,424
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Konstan 2000)	4.76	4.5-5.0	4.5-5.0	4.5-5.0	4.5-5.0	4.5-5.0	4.5-5.0
7	PDRB Per Kapita (Berlaku Juta)	13,550	15,720	16,973	18,337	19,815	21,411	23,007
8	Jumlah Penduduk yang Berkerja (Jiwa)	952,610	958,618	964,202	969,816	975,459	981,132	986,835
9	Proporsi jumlah penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk total (%)	54.87	55.00	55.10	55.20	55.30	55.40	55.50
10	Pengangguran Terbuka (%)	5.70	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7

Ket : *) Perhitungan IPM dengan metode baru

Adapun indikator kinerja daerah yang disusun berdasarkan misi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah sebagaimana tercantum pada tabel 9.2. berikut:

Tabel 9.2
Target Indikator Kinerja Daerah berdasarkan Misi dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian Indikator Kinerja						Kondisi Akhir RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
A Indikator Makro										
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	63.17	63.75	64.38	64.99	65.60	66.21	66.81	66.81
	Angka Harapan Hidup	Tahun	68.36	68.52	68.63	68.73	68.83	68.94	69.04	69.04
	Angka Harapan Sekolah (AHS)	Tahun	12.44	12.78	13.19	13.60	14.01	14.42	14.83	14.83
	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6.88	6.94	7.01	7.08	7.15	7.22	7.28	7.28
	Indeks Pendidikan	-	57.49	58.61	59.99	61.36	62.74	64.11	65.49	65.49
	Indeks Harapan Sekolah	-	69.11	70.97	73.26	75.55	77.84	80.12	82.41	82.41
	Indeks Rata-Rata Lama Sekolah	-	45.87	46.26	46.72	47.18	47.64	48.10	48.57	48.57
	Indeks Kesehatan	-	74.40	74.65	74.81	74.97	75.13	75.29	75.45	75.45
	Indeks Pengeluaran	-	58.95	59.22	59.45	59.68	59.90	60.13	60.35	60.35
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	1,735,998	1,742,942	1,749,914	1,756,913	1,763,941	1,770,997	1,778,081	1,778,081
3	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
4	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	208,120	202,181	197,740	193,260	188,742	184,184	179,586	179,586
5	Proporsinya terhadap jumlah penduduk total	%	11.99	11.69	11.39	11.09	10.79	10.49	10.19	10.19
6	PDRB (berlaku)	Rp Trilyun	25,309	27,389	29,657	32,113	34,758	37,591	40,424	40,424
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Konstan 2000)	%	4.76	4.5-5.0	4.5-5.0	4.5-5.0	4.5-5.0	4.5-5.0	4.5-5.0	4.5-5.0
8	PDRB Per Kapita	Rp Juta	13,550	15,720	16,973	18,337	19,815	21,411	23,007	23,007
9	Jumlah Penduduk yang Berkerja	Jiwa	952,610	958,618	964,202	969,816	975,459	981,132	986,835	986,835
10	Proporsi jumlah penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk total	%	54.87	55.00	55.10	55.20	55.30	55.40	55.50	55.50
11	Pengangguran Terbuka	%	5.70	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7
B Urusan Wajib										
1 Pendidikan										
	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	59.25	62	65	68	71	75	80	80.00
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD-MI-Sederajat	%	100.12	100	100	100	100	100	100	100.00
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD-MI-Sederajat	%	100.02	100	100	100	100	100	100	100.00
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP-MTs Sederajat	%	98.54	100	100	100	100	100	100	100.00
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP-MTs Sederajat	%	97.68	99	100	100	100	100	100	100.00
	Rasio Ketersediaan SD/MI terhadap Penduduk Usia 7 -12	-	150.27	165	182	200	220	242	266	266.21
	Rasio Ketersediaan SMP/MTs terhadap Penduduk Usia 13-15	-	191.31	210	231	255	280	308	339	338.92
	Rasio Guru SD-MI terhadap Murid SD-MI	-	16.65	18	20	22	24	27	29	29.50
	Rasio Guru SMP-MTs terhadap Murid SMP-MTs	-	12.58	14	15	17	18	20	22	22.29
	Rasio Rombel/Guru SDMI	-	1.48	1	1	1	1	1	1	1.00
	Sekolah Pendidikan SD Kondisi Bangunan Baik	%	69.27	79	81	83	85	87	89	89.27
	Sekolah Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik	%	84.22	94	94	94	94	94	94	94.27
	Angka Putus Sekolah (DO) SD-MI	%	0.000080	0	0	0	0	0	0	0.000020
	Angka Putus Sekolah (DO) SMP-MTs	%	0.000140	0	0	0	0	0	0	0.000050
	Angka Lulusan (AL) SDMI	%	100.00	100	100	100	100	100	100	100.00
	Angka Lulusan (AL) SMP-MTs	%	100.00	100	100	100	100	100	100	100.00
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD-MI ke SMP-MTs	%	98.65	100	100	100	100	100	100	100.00
	% SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32 siswa	%	56.11	60	70	80	90	100	100	100.00
	% SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa	%	81.59	85	90	95	100	100	100	100.00
	% SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel	%	15.70	30	45	60	75	90	100	100.00
	% SMP yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel	%	29.29	40	55	70	85	100	100	100.00
	% SD yang memiliki Ruang Guru Lengkap	%	19.10	30	45	60	75	90	100	100.00
	% SMP yang memiliki ruang guru dan meja + kursi untuk setiap orang	%	26.78	30	47	64	81	98	100	100.00
	% SMP yang memiliki ruang Kepala Sekolah dan dilengkapi meja kursi	%	31.80	40	60	80	100	100	100	100.00
	% SD yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik	%	85.86	87	90	93	96	99	100	100.00
	% SD yang memiliki 6 orang	%	51.06	55	63	71	79	87	95	95.00
	% SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran	%	47.28	50	55	60	65	70	75	75.00
	% SD yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D4	%	97.34	98	99	100	100	100	100	100.00
	% SD yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	%	96.42	98	99	100	100	100	100	100.00
	% SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 ≥ 70%	%	97.91	98	99	100	100	100	100	100.00

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian Indikator Kinerja						Kondisi Akhir RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	% guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35%	%	81.59	83	88	93	98	100	100	100.00
	% Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik	%	93.76	95	96	97	98	100	100	100.00
	% Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan	%	65.69	70	80	90	100	100	100	100.00
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA-SMK-MA Paket C	%	65.19	67	69	71	73	75	77	77.19
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA-SMK-MA Paket C	%	68.88	70.88	72.88	74.88	76.88	78.88	80.88	80.88
	Rasio Ketersediaan SMA-SMK-MA terhadap Penduduk Usia 16-18 Tahun	%	28.51	30	31	33	35	36	38	38.21
	Rasio Guru SMA-SMKMA/ Murid SMA-SMKMA	%	13.34	15	16	18	20	21	20	20.00
	Sekolah Pendidikan SMA-SMK Kondisi Bangunan Baik	%	91.71	94	96	98	99	100	100	100.00
	Angka Putus Sekolah (DO) SMA-SMK-MA	%	1.18	1	1	0	0	0	0	0.03
	Angka Lulusan (AL) SMA-SMK-MA	%	100.00	100	100	100	100	100	100	100.00
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP-MTs ke SMASMK-MA	%	80.00	82	84	86	88	90	92	92.00
	Angka Melek Huruf (AMH)	%	99.25	99	99	99	99	99	99	99.32
	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7.25	7	7	7	7	7	7	7.37
	Jumlah PKBM Aktif	PKBM	109	110	111	112	113	114	115	115
	Jumlah Warga Belajar Paket A	PKBM		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1000
	Jumlah Warga Belajar Paket B	Wb	2200	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3000
	Jumlah Warga Belajar Paket C	Wb	2010	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3500
	Jumlah Lembaga Kursus	Lembaga	91	95	96	97	98	99	100	100.00
	Jumlah sekolah yang menerapkan program inklusif	Sekolah	4	39	39	78	78	117	117	117
	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	82.13	85	87	89	91	93	95	95.00
	Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) bagi tenaga Pendidik	%	5.27	7	37	67	97	100	100	100.00
	Guru yang Memenuhi Sertifikasi Jabatan Guru	%	49.59	55	60	65	70	75	80	80.00
	Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG	%	40.1	50	55	60	65	70	75	75.00
	Nilai Rata - Rata Ujian Nasional (US/ UM) :									
	SD - MI		7.69	8	8	8	8	8	8	8.00
	SMP - MTs		5.75	6	6	6	7	7	7	7.00
	SMA - SMK/ MA		6.18	6	7	7	7	7	7	7.38
	Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi Pendidikan	Dok	1	1	1	1	1	1	1	1
	Prosentase SD/MI yang menerapkan prinsip - prinsip MBS (Managemen Berbasis Sekolah)	%	90.46	92	94	96	98	99	100	100.00
	Prosentase SMP/MTs yang menerapkan prinsip - prinsip MBS (Managemen Berbasis Sekolah)	%	83.37	85	87	89	91	92	100	100.00
	Prosentase SMA/SMK/MA/MAK yang menerapkan prinsip - prinsip MBS (Managemen Berbasis Sekolah)	%	90.20	92	94	96	98	99	100	100.00
	Jumlah penerima beasiswa jenjang pendidikan dasar (SD/SMP)	Siswa	65,658	66,971	69,676	71,071	72,491	73,947	74,968	74,968
	Jumlah penerima bantuan siswa miskin daerah jenjang pendidikan dasar (SD/SMP)	Siswa	0	-	1,366	1,394	1,421	1,450	1,470	1,470
	Jumlah perpustakaan sekolah	Buah	573	50	50	60	60	60	60	340
2	Kesehatan									
	Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	%	87.20	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	91.22	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	50.83	63	67	71	75	80	80	80
	Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	97.96	100	100	100	100	100	100	100
	Angka kelangsungan hidup bayi	o/oo	991	991	992	993	994	995	995	995
	Cakupan balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	%	75.58	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	%		100	100	100	100	100	100	100
	Angka usia harapan hidup	th	68.69	69	69	69	69	69	69	69.1
	Cakupan orang usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	24.25	100	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian Indikator Kinerja						Kondisi Akhir RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Cakupan penderita hipertensi mendapatkan pelayanan <i>secondary prevention</i> sesuai standar.	%	7	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	%	5	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA	%	54.41	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.	%	10	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Desa/keurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	91.74	92	94	96	98	100	100	100
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	%		100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan anak di satuan pendidikan dasar mendapatkan pangan yang aman dan sehat.	%	70	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0.07	0.07	0	0	0	0	0	0.02
	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan kecamatan mempunyai cakupan PHBS Rumah tangga mencapai 50%	%	50	50	65	70	75	80	80	80
	Cakupan kecamatan mempunyai cakupan Desa Siaga Aktif mencapai 50%	%	35	35	45	55	65	80	80	80
	Cakupan Puskesmas	%	102	102	102	102	102	102		
	Cakupan Puskesmas Pembantu	%	43.5	43.5	43.8	44.1	44.4	44.7	44.7	44.7
	Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk (1:30.000)	1/30,000	1/43,340	1/42,341	1/42,341	1/41,333		1/40,372	1/39,454	1/39,454
	Rasio Puskesmas Pembantu (Pustu) per Satuan Penduduk	1/10,000	1/11,346	1/11,346	1/11,000	1/11,000	1/10,849	1/10,849	1/10,849	1/10,849
	Pembangunan Rumah Sakit Tipe D / RS Pratama Cikatomas	buah	0	-	1	1	1	1	1	1
	Rintisan Pembangunan Rumah Sakit Tipe D / RS Pratama Ciawi, Manonjwa, Karangnunggal	buah	0	-	3	3	3	3	3	3
	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	%	0.17	0.17	0.18	0.19	0.2	0.21	0.21	0.21
	Cakupan Puskesmas Dengan Pendampingan Tim Akreditasi Propinsi	%	5	2	2	2	2	2	2	2
	Rasio dokter per satuan penduduk	%	0.17	0.17	0.18	0.19	0.2	0.21	0.21	0.21
	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	%	0.6	0.6	0.6	0.65	0.65	0.7	0.7	0.7
	Cakupan ketersediaan obat essential di Puskesmas	%	80	80	85	90	95	100	100	100
	Cakupan penduduk miskin dengan jaminan kesehatan	%	40	60	70	80	90	100	100	100
	Cakupan pelayanan kesehatan naslen masyarakat miskin	%	31	30	30	30	30	30	30	30
	Cakupan Puskesmas yang tersedia perangkat Sistem Informasi Kesehatan untuk akses pelayanan e-health	%	5	15	35	55	75	95	95	95
	Peningkatan Kelas RS SMC menjadi Kelas B	Kelas	C	C	C	B	B	B	B	B
	Program Akreditasi RSUD SMC	Status Akreditas	Belum terakreditasi	Akreditasi Penuh	Akreditasi Penuh	Akreditasi Penuh	Akreditasi Penuh	Madya	Madya	Madya
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RS SMC	%	30,000,000,000.00	100	100	100	100	100	100	100
3	Pekerjaan Umum									
	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah setempat	persen	39.16	41	43	45	48	50	52	55
	Terbangunnya gedung kantor pemerintahan di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya	unit	18	1	3	3	3	3	-	31
	Terehabilitasinya kantor kecamatan	buah	20	22	24	27	29	32	35	35
	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota	persen	0	5	10	15	15	15	75	75
	Persentase pembangunan jalan lingkar 4 wilayah dan	%			10	23	23	23	23	100
	Persentase pembangunan jembatan di wilayah perbatasan	%			10	23	23	23	23	
	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	51.34	59	67	76	87	99	100	100
	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	84.37	87	89	92	95	97	100	100
	Ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan	%			20	40	60	80	100	100
	Jumlah pemeliharaan jaringan irigasi	Buah	195	309	423	537	651	765	879	879
	Jumlah masyarakat yang mengikuti Sosialisasi dan pelatihan Penanggulangan Bencana	orang	3900	500	500	500	500	500	500	6900
	Jumlah Desa Tangguh bencana	Desa	7	3	3	3	3	3	3	25
	Tersedianya dokumen mitigasi bencana	Dokumen	7	5	5	3				20

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian Indikator Kinerja						Kondisi Akhir RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Tersedianya sarana Penanggulangan Bencana	Paket		1	1	1	1	1	1	7
	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	90	90	90	90	90	90	90	90
	Persentase Penanganan Rehab/rekonstruksi	%	0	60	65	70	75	80	90	90
	Jumlah rancangan produk hukum daerah mengenai perencanaan tata ruang	buah	1	-	1	1	1	1	1	6
	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	buah	0	-	1	1	1	1	1	5
	Jumlah wilayah/ kawasan yang memiliki peta dasar dan penggunaan lahan skala 1: 5000	buah	6	-	2	2	2	2	2	16
	Jumlah dokumen rencana tata ruang	buah	2	5	2	2	2	2	2	17
	Jumlah dokumen kajian bidang penataan ruang	buah	0	-	1	1	1	1	1	5
	Jumlah rancangan produk hukum daerah mengenai pemanfaatan ruang	buah	0	-	-	1	-	1	1	3
	Jumlah rancangan produk hukum daerah mengenai penendalian pemanfaatan	buah	0	-	-	1	1	1	1	4
	Jumlah pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah	kegiatan	1	3	4	4	4	4	4	24
	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	buah	0	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah dokumen kajian perwujudan program pemanfaatan ruang	buah	0	-	1	1	1	1	1	5
	Jumlah pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan	buah	1	-	1	1	1	1	1	6
	Persentase Penyediaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan	persen	0	10	20	20	20	20	10	100
	Rekomendasi IMB yang dikeluarkan	unit		500	500	500	500	500	500	3,000
	Jumlah pelaksanaan pengendalian pemanfaatan	buah	0	-	1	-	1	1	1	4
	Jumlah instrumen pengendalian dan pemanfaatan ruang	kegiatan	0	-	1	1	1	1	1	5
4	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman									
	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	persen	6.56	8	9	11	14	16	20	19.59
	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi	unit	0	500	500	500	500	500	500	3,000
	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	persen	0	10	20	20	20	20	10	100
	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	persen	55.4	58	61	64	67	71	74	451
	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah setempat	persen	39.16	41	43	45	48	50	52	51
	Persentase luas jalan lingkungan terhadap luas wilayah	persen	35.51	37	39	41	43	45	48	51
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan									
	Terlaksananya pertemuan Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)	Frekuensi	0	6	7	8	8	8	8	45
	Terlaksananya siskamswakarsa di daerah	orang	0	78	100	150	150	150	150	778
	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan	orang	0	500	500	550	550	550	550	3,200
	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi kemitraan wawasan kebangsaan	orang	0	200	200	250	250	250	250	1,400
	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	%	52.55		1	1	1	1	1	5
	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	%	0.525		0	0	0	0	0	1
	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi narkoba	orang	100	100	150	150	150	150	150	850
	Kegiatan pembinaan politik daerah :									
	Partisipasi Pemilihan Bupati/Wakil Bupati	%	60.33					61		61
	Partisipasi Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur	%	65.94			67				67
	Partisipasi Pemilihan Legislatif	%	73.54				75			75
	Partisipasi Pemilihan Presiden/Wakil Presiden	%	68.61				70			70
	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	orang			350	350	350	350	350	1,750
	Sosialisasi pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam baei Satlinmas	orang	0	78	100	150	150	150	150	778
6	Sosial									
	Cakupan Penanganan penandang masalah	%	-	54	58	64	80	85	87	86.92
	Peningkatan Kapasitas Sarana Sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi)	%	0	16	16	16	16	16	20	100

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian Indikator Kinerja						Kondisi Akhir RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
7	Ketenagakerjaan									
	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	0	12,52	14,15	20,22	33,81	45,15	46,33	46,33
	Jumlah Wirausaha Baru	Wirausaha	0	200	200	200	200	200	200	1200
	Cakupan Penanganan Perselisihan buruh dan	%	0	100	100	100	100	100	100	100
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
	Jumlah perempuan yang mengikuti pembinaan & pelatihan tataboga, tata, tata	Orang	40	100	100	100	100	100	100	600
	Cakupan Peningkatan Pemberdayaan perempuan kenala keluarga (PEKKA)	%	0	20	40	60	80	100	100	100
	Meningkatnya melek huruf perempuan usia 15 Tahun	%	99,16	100	100	100	100	100	100	100
	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	88	100	100	100	100	100	100	100
	Terwujudnya Pembinaan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Jenis Kegiatan	0	2	2	2	3	3	3	3
	Tercapainya Sosialisasi Pengarusutamaan Gender	%	0	100	100	100	100	100	100	100
9	Pangan									
	Pendampingan Lumbung Pangan Masyarakat	Kelompok	20	30	159	164	169	169	169	860
	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Ton	62	70	80	90	100	110	110	110
	Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat	Desa	0	50	60	70	80	90	90	90
	Panel Harga	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	72
	Lembaga Akses Pangan masyarakat (LAPM)	LAPM	0	2	3	4	5	6	6	6
	Pendampingan Kawasan Rumah Pangan Lestari	Desa	24	80	82	84	86	88	88	88
	Fasilitasi Pameran pangan lokal tingkat provinsi dan pusat	Frekuensi		2	2	2	2	2	2	12
	Pendampingan Mandiri Pangan	Desa	26	20	23	26	29	29	29	29
	Penyempurnaan data kerentanan dan kerawanan pangan (FSVA)	Peta	0	1	1	1	1	1	1	1
10	Pertanahan,									
	Peningkatan Aset Daerah yang mempunyai bukti kepemilikan yang sah	Bidang Tanah	213	25	15	15	15	15	15	15
11	Lingkungan Hidup									
	Persentase penanganan sampah	%		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3
	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	paket		1	2	2	2	2	3	12
	Jumlah tempat pembuangan sampah (TPS)	paket		2	2	2	2	2	2	12
	Ketersediaan motor angkut sampah	unit		59	59	59	58	58	58	351
	Penegakan hukum lingkungan	dokumen	3	3	8	7	5	5	5	33
	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	perusahaan	64	17	18	18	18	18	18	107
	Peningkatan kebersihan dan pengelolaan sampah	unit	5	5	2	2	2	1	1	13
	Meningkatnya jumlah ruang khusus merokok di OPD Kab. Tasikmalaya	unit	8	2	2	2	2	2	2	12
	Meningkatnya Jumlah Instalasi Pengelolaan Air Limbah	unit		1	1	1	1	1	1	6
	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	ha	30	30	10	10	10	10	10	110
	Jumlah sumber mata air yang dikonservasi	buah	33		5	5	5	5	5	25
	Meningkatnya jumlah taman keanekaragaman hayati	buah		2	1	1	1	1	1	7
	Sosialisasi kebijakan, peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	orang	400	400	400	400	400	400	400	2400
	Kerjasama kemitraan pengelolaan lingkungan hidup	sekolah/ pesantren	20	10	5	5	5	5	5	35
	Publikasi lingkungan hidup	kali	4	4	4	4	4	4	4	24
	Cakupan Penanganan Pencemaran status mutu air	%	35	35	45	55	60	65	65	65
	Luas kawasan yang dikonservasi	paket		2	2	2	2	2	2	12
	Jumlah dan jenis data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan	dokumen	1	3	3	3	3	3	3	18
	Prosentase produk sampah yang tertangani	persen	38,77	41	43	45	47	49	52	52
	Jumlah TPA/ TPAS/ TPAST yang terbangun	unit	1	1	1	1	1	1	1	7
12	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,									
	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	rasio	0,98	0,98	0,98	0,98	1,00	1,00	1,00	1,00
	Rasio bayi berakte kelahiran	rasio	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49	0,48
	Cakupan Penerbitan KTP el	%	98	98,25	98,50	98,75	99,00	99,25	99,50	99,25
	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	%	43,06	43,50	44,00	44,50	45,00	45,50	46,00	45,50
	Ketersediaan database kependudukan	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah/ belum	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah
	Cakupan Penerbitan KK	%	92	93	94	95	96	97	98	97

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian Indikator Kinerja						Kondisi Akhir RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	%	43	44	45	46	47	48	49	48
	Cakupan Penerbitan Akte Kematian	%	0.33	8.33	8.55	9.00	9.50	10	10.50	10
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
	Cakupan pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	%	0	100	100	100	100	100	100	5,000,000,000.00
	Cakupan Pembinaan BumDes	%	0	100	100	100	100	100	100	2,500,000,000.00
	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	0	100	100	100	100	100	100	4,000,000,000.00
	Cakupan pembinaan PKK	%	0	100	100	100	100	100	100	600,000,000.00
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
	Meningkatnya Prevalensi peserta KB	%	65.9	80	90	100	100	100	100	100
	Tersedianya Alat Kontrasepsi	%	0	80	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Pembinaan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	%	287,683 KK	60	70	80	90	100	100	100
15	Perhubungan									
	Persentase pembangunan terminal di 5 kecamatan	%		10	10	13	23	23	23	100
	Cakupan kelengkapan perlengkapan jalan	%		10	20	40	60	70	100	290
	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%			50	75	100	100	100	100
16	Komunikasi Dan Informatika;									
	Jumlah Website Milik SKPD dan Kecamatan sebagai layanan akses informasi publik	Website	28		35					63
	Jumlah SKPD dan Kecamatan yang terhubung melalui infrastruktur jaringan data	SKPD dan Kecamatan			12	12	12	12	15	63
	Jumlah Hotspot Publik Milik Penda	Titik			10	10	10	10	10	50
	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah yang terintegrasi	SIM			2	1	1	2	2	8
17	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah									
	Tersedianya KUKM Centre	Unit	0		1					1
	Meningkatnya koperasi aktif	Koperasi	393	413	433	455	478	502	527	527
	Meningkatnya Jumlah UMKM	UMKM	33731	33,931	34,131	34,331	34,531	34,731	34,931	35,131
	Jumlah Fasilitas Merek Produk UKM Terregistrasi HAKI	Merek	0		100	100	100	100	100	500
	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	%	0	10	10	10	10	10	10	60
18	Penanaman Modal									
	Jumlah Pelaku Usaha yang dibina	Pelaku Usaha	50	25	50	50	50	50	50	275
	Jumlah Promosi Investasi	Promosi	5	5	5	5	5	5	5	30
	Jumlah investor (PMDN/PMA)	Investor	684	718	754	792	831	873	917	4,885
	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	Rp.	174,299,000,000	183,013,950,000	192,164,648,000	201,772,880,000	211,861,524,000	222,454,600,000	233,577,330,000	1,244,844,932,000
	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi	Rp.	17,910,000,000	8,714,950,000	9,150,698,000	9,608,232,000	10,088,644,000	20,681,720,000	21,715,806,000	79,960,050,000
	Tenaga kerja	Orang	1,933	2,030	2,131	2,238	2,350	2,467	2,590	13,806
	Cakupan Pelayanan Kebijakan Teknis Perijinan	%	200,000,000	100	100	100	100	100	100	#REF!
	Terlaksananya Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	%	0	100	100	100	100	100	100	#REF!
	Terlaksananya Program Penyediaan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	%	0	100	100	100	100	100	100	#REF!
19	Kepemudaan dan Olahraga									
	Jumlah prestasi tingkat propinsi	Siswa	26	27	28	29	30	31	32	177
	Jumlah prestasi tingkat Nasional	Siswa	1	2	4	5	7	8	8	34
	Persentase ketersediaan komplek pengembangan	%	0	10	10	13	23	23	23	100
20	Statistik;									
	Tersedianya Buku Kabupaten Tasikmalaya dalam Angka	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya Buku PDRB Kabupaten Tasikmalaya	%	100	100	100	100	100	100	100	100
21	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kewenangan dan Persandian									
	Meningkatnya Kapasitas Basis Data Perencanaan	%	Tersedia Sistem Basis Data	10	20	20	20	20	10	100
	Tersedianya dokumen RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Dokumen	1							1
	Tersedianya Dokumen RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Dokumen	1						1	1
	Tersedianya Dokumen : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6
	Meningkatnya jumlah zakat, infaq dan sodagoh									
	Zakat Fitrah	Rp	966,755,925	990,924,823	1,015,697,944	1,041,090,392	1,067,117,652	1,093,795,593	1,121,140,483	6,329,766,888
	Zakat Profesi	Rp	1,700,613,819	1,743,129,164	1,786,707,394	1,831,375,078	1,877,159,455	1,924,088,442	1,972,190,653	11,134,650,186
	Meningkatnya jumlah muzaki									

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian Indikator Kinerja						Kondisi Akhir RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Zakat Fitrah	Muzaki	1,080,123	1,107,126	1,134,804	1,163,174	1,192,254	1,222,060	1,252,612	1,252,612
	Zakat Profesi	Muzaki	2,635	2,701	2,768	2,838	2,909	2,981	3,056	3,056
	Cakupan penanganan konflik sosial berlatar belakang agama	%		100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Ajengan Masuk Sekolah (AMS)	%		15	15	15	15	15	15	90
	Persentase anak usia sekolah yang mengikuti program Magrib Mengaji	%		10	20	30	40	50	60	60
	Persentase masyarakat yang mampu baca tulis huruf arab (Usia 15 tahun ke atas)	%		40	50	60	70	80	90	90
	Jumlah sarana keagamaan yang mendapat bantuan	Mesjid Kecamatan			8	8		8	8	7
	Meningkatnya prestasi pada kegiatan keagamaan									
	MTQ	Ranking	1	1	1	1	1	1	1	1
	STQ	Ranking	5	3	3	2	2	1	1	1
	Mufakat	Ranking	1	1	1	1	1	1	1	1
	Jumlah Bantuan Stimulan Guru Madrasah Diniyah	Rp/Bulan	0	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
	Jumlah Guru Madrasah Diniyah		21,375	21,425	21,475	21,525	21,575	21,625	21,675	21,725
	Jumlah Insentif Ajengan			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
	Jumlah Insentif Amil Desa			100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	Terbangunnya Islamic Center	%	0	10	30	100				100
	Madrasah	Madrasah	4530	4,575	4,621	4,667	4,714	4,761	4,809	4857
	Pondok Pesantren	Pondok Pesantren	750	758	765	773	780	788	796	804
	Masjid	Masjid	4650	4,673	4,697	4,720	4,744	4,767	4,791	4815
	Cakupan Pondok Pesantren Mendapat Bantuan Operasional	%	0	10	15	20	25	30	35	35
	Cakupan Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji	%		100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Fasilitasi Kegiatan PHBI Tingkat Kabupaten dan Kecamatan	%	0	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah kerjasama Pemerintah Daerah	MoU	0	7	8	9	10	11	12	57
	Rancangan produk hukum yg terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Produk hukum yg tersosialisasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Produk hukum yg dipublikasikan secara on line	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Prosentase Fasilitasi Persiapan Daerah Otonomi Baru	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Pelayanan Administrasi Kecamatan	Kecamatan	39	1	39	1	39	1	39	39
	Cakupan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Kecamatan	0		10	10	10	9		39
	Kesesuaian SKPD berdasarkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	SKPD yang memiliki UTU	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	SKPD yang memiliki informasi jabatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	SKPD yang telah dijabat	%	37	37	100	100	100	100	100	100
	SKPD yang telah diatur Tahubja	buah	1	-	2	1	1	1	1	6
	Jumlah Pedoman dan Metoda Kerja yang disusun	buah	4	1	1	1	1	1	1	10
	Penerapan SPM	Lap/draf urusan	1/15	1	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6
	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Kategori Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Ketersediaan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, DPA)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Ketersediaan E-procurement	%		100	100	100	100	100	100	100
	Pengadaan barjas melalui ULP	paket	574	574	574	574	574	574	574	574
	Ketepatan waktu penyerahan laporan kinerja dan keuangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	jumlah orang		903	861	861	861	861	861	861
	Frekuensi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	kali		1	66	1	198	4	63	333
	Terfasilitasinya pembahasan Ranperda	Frekuensi	10	29	29	29	29	29	10	155
	Terfasilitasinya penyelenggaraan kegiatan Penyerapan aspirasi (Reses)	Frekuensi	3	3	3	3	3	3	3	18
	Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	Frekuensi	8	8	8	8	8	8	8	48
	Terfasilitasinya penyelenggaraan Fungsi	Frekuensi	120	120	120	120	120	120	120	720
	Meningkatnya Pelanggaran Peraturan Daerah yang di	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan evaluasi Penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keterbacaan Umum dan Ketentraman masyarakat	Kali			4	4	4	4	4	20
	Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan patroli petugas Satpol pp	orang	0.23	48	60	100	150	200	250	6
	Jumlah Gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Kali	46	40	37	34	30	25	20	146
	Jumlah unjuk rasa yang diamankan	Kali	15	14	13	12	11	10	9	55

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian Indikator Kinerja						Kondisi Akhir RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Terwujudnya Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	%	0	-	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Pengumpulan Informasi Barang Kena Cukai Ilegal	merk hasil tembakau	18	10	11	12	13	14	15	15
	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	%	0,0082	0	1	1	1	1	1	1
	Jumlah PPNS per Perda yang ada	%	14	16	18	20	22	24	26	26
	Penegakan PERDA	%	60	70	75	85	90	95	100	100
	Jumlah Sosialisasi dan penyuluhan Perda dan Perkada Lainnya	Kali	0	1	1	1	1	1	1	5
	Opini Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	WDP/WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Penyusunan APBD yang tepat waktu	Ketepatan Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
	Kesesuaian pengalokasian anggaran terhadap peraturan perundangan dalam hal:									
	1. Pendidikan	Kesesuaian	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
	2. Kesehatan	Kesesuaian	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
	3. ADD	Kesesuaian	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
	Pertumbuhan PAD	%	-	5	5	5	5	5	5	5
	Jumlah Kajian Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Konprehensif dan Ilmiah	Kali	19	4	4	5	4	5	3	44
	Prosentase cakupan obruk yang diperiksa	%		47	47	47	47	47	47	47
	Prosentase Laporan yg dikerjakan	%		100	100	100	100	100	100	
	Prosentase jumlah SKPD yang menerapkan SPIP	%		2		3	5	5	9	24
	Persentase keterlaksanaan program peningkatan keterampilan dan profesionalisme jumlah ASN	%		100	100	100	100	100	100	100
	Persentase keterlaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	%		100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana bidang kominfo	paket	-	1	1	2	2	2	2	10
	Jumlah surat kabar nasional/lokal	buah	64	64	70	75	80	85	90	90
	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	buah	26	26	30	32	34	36	38	38
	Jumlah media online	buah	13	13	15	20	25	30	35	35
	Jumlah media luar ruang	kali	3	3	4	6	8	10	12	43
	Jumlah pelayanan Informasi & dokumentasi	buah	6	4	4	4	4	4	4	24
	Cakupan wilayah yang memperoleh akses informasi (KIM)	%	-	-	5	5	5	5	5	26
	22 Kebudayaan									
	Apresiasi pemerintah terhadap seniman dan budayawan	Orang	0	4	4	6	6	6	6	32
	Jumlah grup kesenian	grup	50	73	85	100	150	150	150	150
	Tersedianya Gedung Kesenian	unit			1				1	2
	Perlindungan bangunan cagar budaya	buah	9	9	9	9	9	9	9	9
	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya		3		1	1	1		6	6
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	buah	41		41	41	53	57	57	57
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kegiatan	8	8	10	12	15	18	53	53
	23 Perpustakaan									
	Jumlah perpustakaan	Buah	1	-	-	-	-	1	-	1
	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	9883	10,000	10,000	11,000	11,000	12,000	12,000	98596
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eksemplar	14713	2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	6,000	34713
	24 Kearsipan									
	E-Filing penyelenggaraan kearsipan	Paket	1	1		1		1		3
	Pengelolaan arsip secara baku	Arsip (boks)	758	20	20	20	20	20	20	20
	Cakupan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	C Urusan Pilihan									
	1 Kelautan dan Perikanan									
	Produksi perikanan	Ton	56,890	48,989	51,438	54,010	56,711	59,546	61,630	59,546
	Produksi perikanan tangkap	Ton	1,183,86	1,347	1,388	1,429	1,472	1,516	1,539	1,516
	Cakupan bina kelompok nelayan	Kelompok	-	3	5	5	5	5	5	5
	Produksi perikanan kelompok nelayan									
	Meningkatnya Produksi dan Usaha Pengolahan Hasil									
	Produksi Hasil Olahan	Ton	108,560	113,988	119,687	125,672	131,955	138,553	144,000	138,553
	Jumlah Usaha Pengolahan Hasil	Unit	123,00	149	164	180	198	218	240	218
	2 Pariwisata									
	Kunjungan wisata		924,974	992,864	1,082,114	1,200,996	1,356,923	1,560,199	1,560,199	#REF!
	- Wisatawan Nusantara	orang	921,575	989,295	1,078,331	1,196,948	1,352,551	1,555,434	1,555,434	8,649,568

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian Indikator Kinerja						Kondisi Akhir RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	-Wisatawan Mancanegara	orang	3,399	3,569	3,783	4,048	4,372	4,765	4,765	28,701
	Jumlah obyek wisata/daya tarik wisata (DTW) yang siap kunjungan									
	- Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW)	DTW	11	1	2	3	3	3	23	46
	- Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW) unggulan yang telah direhabilitasi dan siap kunjungan	DTW	6	1	1	1	1	1	11	22
	Partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan									
	- Pembinaan usaha jasa wisata	Keg.		1	2	4	4	4	15	30
	- Jumlah masyarakat yg berperan aktif dalam kepariwisataan (kompepar)	Orang		200	250	300	400	450	450	2,050
3	Pertanian									
	Cakupan bina kelompok petani	Kelompok	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215
	Frekuensi Gelar Produk dan Pameran Hasil Pertanian	Kali		1	1	1	1	1	1	6
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar									
	Produksi padi	Ton	813,064	843,709	844,975	846,242	847,511	848,783	857,271	865,759
	Produksi Palawija	Ton	458,366	463,760	463,760	464,455	465,152	465,850	470,509	475,168
	Produksi Sayuran	Ton	19,624	14,649	14,838	14,974	15,138	15,275	15,428	15,581
	Produksi Buah-Buahan	Ton	334,179	337,317	340,559	343,833	347,139	350,479	353,984	357,489
	Produksi Tanaman Obat/Biofarmaka	kg	6,899	9,139	9,231	9,323	9,416	9,511	9,606	9,701
	Luas Pertanian Ramah Lingkungan	Ha	8,828	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,585	8,585
	Luas Irigasi Tersier	Ha	15,112	1,500	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000	11,000
	JUT (Jalan Usaha Tani)	Km	19	3	3	3	3	3	3	3
	Perluasan areal lahan pertanian melalui cetak sawah	Ha	50	100	100	100	100	100	100	600
	Luas Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Ha	6,500	5,000	5,100	5,200	5,300	5,400	5,500	5,500
	Luas Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan	Ha	0	50	55	60	65	65	65	65
	Cakupan bina kelompok petani	Kelompok		3	6	9	12	15		45
	Terlaksananya promosi hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan	Keg		1	1	1	1	1		5
	Tersedianya fasilitas penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Unit		4	6	9	10	10		39
	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan	%		1	1	1	1	1		5
	Meningkatnya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular									
	Vaksinasi AI	Ekor	200,000	200,000	260,000	270,000	280,000	290,000	300,000	290,000
	Vaksinasi Rabies	Ekor	6,000	6,000	6,000	5,800	5,700	5,600	5,500	5,600
	Eliminasi HPR	Ekor	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000	9,000	9,000
	Meningkatnya Pelayanan Pengobatan Penyakit Hewan									
	Pelayanan Pengobatan	Ekor	15,400	16,000	16,350	16,500	16,650	16,800	16,850	16,800
	Meningkatnya Pelayanan Kesmavet									
	Pemeriksaan Hewan Qurban	Ekor	5,500	5,600	5,700	5,800	5,900	6,000	6,100	6,000
	Fasilitasi Penerbitan NKV	Dokumen		5	10	15	20	25	30	25
	Monitoring dan Surveillance Residu Kimia dan Cemaran Mikroba Produk Asal Ternak	Sampel	20	50	75	100	125	150	160	150
	Meningkatnya Produksi									
	Daging	Ton	62,456.41	64,255	66,183	68,168	70,213	72,320	73,405	72,320
	Telur	Ton	12,138.00	12,714	13,096	13,489	13,893	14,310	14,525	14,310
	Susu	Ton	3,428.00	3,395	3,496	3,601	3,709	3,821	3,878	3,821
	Meningkatnya Produksi dan Usaha Pengolahan Hasil Peternakan									
	Produksi Hasil Olahan	Ton	946,708.00	965,642	984,955	1,004,654	1,024,747	1,045,242	1,057,785	1,045,242
	Jumlah Usaha Pengolahan Hasil	Unit	130.00	133	136	139	142	145	148	145
4	Kehutanan									
	Tingkat Capaian Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan (%)	%	40	45	48	50	52	55	55	55
	Persentase Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	30	15	15	15	10	10	5	100
	Rehabilitasi Sumber Mata Air	Mata Air		10	15	20	25	30	30	30
	Tersusunannya Dokumen Perencanaan Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Dokumen		2	2	2	2	3	3	3
5	Energi dan Sumber Daya Mineral									
	Pendataan Hasil Produksi Pertambangan	Kec		7	7	8	12	12	12	12
	Pengawasan dan Pengendalian Pengguna Air Tanah	Kec.	20	20	20	20	20	20	20	20
	Pembuatan Sumur Pantek	Unit	7	3	5	5	5	5	5	23
	Inventarisasi Potensi Air Tanah Dengan Metode Pengukuran Geolistrik	Kec.	6	5	10	10	10	10	10	61
	Pembuatan Sumur Bor Dalam	Unit	3	3	3	3	3	3	3	15
	Pemasangan Sambungan Rumah-Instalasi Rumah (SR-IR) bagi Keluarga Miskin	Kec	39	39	39	39	39	39	39	39

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian Indikator Kinerja						Kondisi Akhir RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Pemasangan SR-IR bagi Sarana Keagamaan	Kec	39	39	39	39	39	39	39	39
	Ratio Elektrifikasi	%	73.32	75	84	89	95	100	100	100
6	Perdagangan									
	Jumlah Kasus Pengaduan Konsumen yang Diselesaikan	%		100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%		10	20	20	20	20	10	100
	Persentase pembangunan/revitalisasi pasar di 5 kecamatan	%		10	10	13	23	23	23	100
7	Perindustrian									
	Peningkatan Pembinaan IKM	%		10	10	10	10	10	10	60
	Terwujudnya Sentra Industri Potensial	Sentra		-	1	1	1	1	1	5
8	Ketransmigrasian									
	Bertambahnya Wilayah Transmigrasi	Lokasi		1	2	2	2	2	2	2
	Jumlah Transmigran Lokal	KK		40	50	60	70	80	80	80
	Jumlah Transmigran swakarsa	KK		11	15	15	15	20	20	20

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1. Pedoman Transisi dan Perubahan

RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025, RTRW Kabupaten Tasikmalaya, serta memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan penjelasan Pasal 40 ayat (2) huruf j, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa pada masa transisi, untuk menghindari kekosongan, seperti peralihan periode kepemimpinan maka RPJMD lama yang akan berakhir menjadi pedoman sementara bagi pemerintahan kepala daerah baru terpilih selama belum ada RPJMD baru.

Berdasarkan klausula tersebut maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 akan menjadi pedoman penyusunan rencana sampai dengan tahun 2022. Hal demikian dimaksudkan untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pasca berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati. Dengan demikian program dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 adalah program sampai dengan tahun 2022. Selain itu, Penyusunan perencanaan pembangunan pada masa transisi mengacu pada RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025.

Berkenaan dengan perubahan RPJMD, hanya bisa dilakukan jika terjadi perubahan mendasar seperti terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan agar tercipta koordinasi, sinergi, konsistensi serta keberlanjutan program, sehingga efektif dan efisien baik dalam pembiayaan maupun waktu. Lebih jauh, agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan tahun 2015. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dan merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021, diperlukan kaidah pelaksanaan yang menjamin terciptanya tata pemerintahan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (RPJMD) Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya, serta menjamin konsistensi antara RPJP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 dengan RPJMD 2016-2021, Renstra SKPD, dan RKPD
2. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya agar melaksanakan program dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
3. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021. Hal tersebut dimaksudkan agar program-program yang direncanakan dalam renstra SKPD dapat terintegrasi dengan baik dengan RPJMD, sehingga diharapkan visi dan misi pada tahun 2021 dapat dicapai.

4. RPJM Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 untuk setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya harus berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, agar Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya.
5. Penyusunan RKPD Kabupaten Tasikmalaya harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.
6. RKPD Kabupaten Tasikmalaya akan menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja.
7. RKPD Kabupaten Tasikmalaya merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya.
8. Renja SKPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).
9. Dalam melaksanakan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021 setiap SKPD perlu memperkuat peran para pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
10. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan dasar evaluasi dalam laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan.

BAB XI P E N U T U P

Proses pembangunan pada hakikatnya untuk kemaslahatan manusia atau sebesar-besarnya kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Oleh karena itu maka seluruh ikhtiar yang direncanakan dalam dokumen perencanaan ini ditujukan pada upaya pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan manusia/warga Kabupaten Tasikmalaya. Kesejahteraan dan kebahagiaana itu tercermin dalam sosok manusia Kabupaten Tasikmalaya yang beriman, bertaqwa serta berahlaqul-karimah, sehat jasmani dan rohaninya, cerdas intelektual, sosial, emosional dan spiritualnya.

Dokumen RPJMD 2016-2021 ini merupakan pelaksanaan pembangunan jangka panjang fase ketiga untuk mewujudkan **"KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, MAJU DAN SEJAHTERA TAHUN 2025"**. Tentu merupakan fase sangat penting yang menjadi tolakan untuk lepas-landas pada pencapaian visi Kabupaten Tasikmalaya 2025. Oleh karena itu, ikhtiar sungguh-sungguh harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan dan pemangku kewajiban.

Pencapaian visi di atas diupayakan dengan penetapan visi pembangunan tahun 2016-2021 yaitu: **"KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, DINAMIS, DAN BERDAYA SAING DI BIDANG AGRIBISNIS BERBASIS PERDESAAN"**. Untuk pencapaian misi tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlaqulkarimah dan berkualitas.
2. Mewujudkan perekonomian yang tangguh di bidang agribisnis dan pariwisata.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan.

Selain visi dan misi di atas, sebagai pelaksanaan janji politik pada kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 ini dilengkapi dengan program prioritas Bupati yang dikemas dalam jargon TASI SIAP yang isinya sebagai berikut:

1. SIAP 1: Memastikan pemenuhan 6 (enam) Standar Pelayanan Minimal pelayanan dasar
2. SIAP 2: Menjadikan Sumberdaya manusia berahlaq dan berkualitas.
3. SIAP 3: Berdaya saing di bidang agribisnis, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif.
4. SIAP 4: Mendayagunakan teknologi informasi.
5. SIAP 5: Menjamin kemudahan investasi.

Betapapun baiknya sebuah RPJMD, tidak akan memiliki makna yang berarti bila tidak diimplementasikan dengan konsisten dan baik. Keberhasilan implementasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya sangat tergantung dari kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD serta seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu Tahun 2016-2021.

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

UU RUZHANUL ULUM